



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PHPU. BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PALOPO
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN
ALAT BUKTI TAMBAHAN)**

J A K A R T A

JUMAT, 7 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 168/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Farid Kasim dan Nurhaenih

TERMOHON

KPU Kab. Palopo

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

Jumat, 7 Februari 2025, Pukul 13.32– 16.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. KUASA HUKUM PEMOHON:**

1. Muhammad Nursal
2. Andi Syafrani

B. Ahli dari Pemohon:

1. Charles Simabura

C. Saksi dari Pemohon:

1. Junaid

D. Termohon:

1. Upi Hastati

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yirfan Idham

F. Ahli dari Termohon:

1. Agus Riwanto

G. Saksi dari Termohon:

1. Muhatzhir Muh. Hamid

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Nursari
2. M. Farid Wajdi

I. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Haryo Susetiyo

J. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Bonar Jhonson

K. Bawaslu:

1. Widiyanto Hendra
2. Ardiansah Indra Panca Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Pemohon?

2. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:14]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Ya.

4. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:16]

Kami yang hadir, Kuasa Hukum Muhammad Nursal dan Andi Syafrani, serta beserta Ahli Charles Simabura, dan Pak Junaid sebagai Saksi.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Oke, terima kasih. Termohon, silakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:32]

Perkenankan, kami dari Kuasa Termohon, hadir di sini atas nama Irfan Idham, dari Kantor Hukum Titah Law Firm bersama kami dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir juga Ahli kami atas nama Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., dan Saksi kami atas nama Bapak Muhatzhir. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Oke. Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:58]

Baik, terima kasih, Majelis, yang hadir hari ini saya Nursari sebagai Kuasa, dan Farid sebagai kuasa, kemudian di samping kiri saya ada Ahli atas nama Haryo Susetiyo, dan Saksi Bonar Jhonson, Majelis.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Oke, terima kasih. Bawaslu?

12. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [02:21]

Ya, izin, Yang Mulia. Saya Widiyanto Hendra, Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan kawan saya Ardiansah, Anggota Bawaslu Kota Palopo. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Terima kasih. Siang ini agenda persidangan kita adalah pembuktian untuk mendengarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli untuk Perkara 168/PHPU.WAKO/2025.

Silakan, kita ambil sumpah dulu. Pertama, kita undang dulu Para Saksi, untuk diambil sumpahnya.

Silakan, Saksi, Pak Junaidi, silakan Pak. Kemudian Pak Muhatzhir Muh. Hamid, dan kemudian Pak Bonar Jhonson.

Geser sedikit Pak Bonar. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:19]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Para saksi yang beragama Islam terlebih dahulu, ya. Ya, ikuti lafadz sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [03:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:52]

Ya. Lalu, yang beragama Protestan. Ya, ikuti lafal janji yang akan tuntunkan, sebagai Saksi, ya. Ya, ikuti.

Saya bersum ... Saya berjanji sebagai Ahli eh ... sebagai Saksi maaf ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dari saya ... wah maaf. Ulangi. Saya ulangi, ya, saya ulangi, ya. "Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya".

17. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI [04:30]

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing.

Para Ahli, Ahli Pemohon, Dr. Charles Simabura, silakan. Ahli Termohon, Prof. Agus Riwanto. Online ya, saya sudah ada kan apa pemegang apa ... kitab, segala macam, Prof ... Prof Agus?

19. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [05:08]

Sudah, Yang Mulia. Sudah ada, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Silakan berdiri.

Kemudian Ahli berikutnya, Pak Haryo Susetiyo, Katolik. Silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:19]

Ya.

22. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Silakan, dipandu oleh, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur.

23. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:23]

Ya. Terima kasih, Yang Mulai Ketua.

Ya, Ahli yang beragama Islam, ya, terlebih dahulu ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:34]

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

25. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:34]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:38]

Ya, baik. Lalu yang beragama Katolik, ya, ikuti lafal janji yang akan saya tuntunkan sebagai Ahli.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

27. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI[06:12]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:28]

Ya, terima kasih. Dikembalikan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Silakan, ketempat masing-masing.
Prof. Agus, silakan duduk.

Ini kalau diizinkan, kita diminta dulu keterangannya Prof. Agus, ya, kita dari Ahli dulu. Setuju enggak, Pemohon bagaimana?

30. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [06:48]

Setuju, Yang Mulia, tapi izin, Yang Mulia, jika berkenan kami ingin meminta klarifikasi, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Dari?

32. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [06:54]

Dari Termohon Prinsipal, Yang Mulia. Karena berdasarkan keputusan DKPP, Yang Mulia, 3 orang KPU Pale ... Palopo itu sudah diberhentikan secara tetap.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Ya.

34. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [07:02]

Ket ... termasuk Ketua KPU, apakah yang ... yang hadir di sini adalah orang yang sudah diberhentikan tetap?

Yang kedua. Kami melihat, Yang Mulia, Saksi dari Termohon ini adalah anggota KPU. Apakah yang bersaksi ini adalah anggota yang telah dipecat atau diberhentikan tetap oleh DKPP? Sehingga dia menjadi saksi fakta di perkara ini, Yang Mulia, untuk Termohon.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:22]

Oke, terima kasih. Ini nanti kita, kita selesaikan soal itu. Kita catat, kita selesaikan Ahli dulu, ya? Setuju? Termohon setuju, ya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [07:31]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:32]

Pihak Terkait? Setuju.

Jadi, ini karena yang paling jauh, banyak makan apa ini ... arus, jadi kita silakan.

Prof. Agus dipersilakan menyampaikan keahliannya, berkait dengan soal yang kita hadapi di sidang ini. Dikasih waktu maksimal 7 menit, Prof, nanti akan ada sesi pendalaman. Kita khususkan untuk Prof. Agus dulu, selesai itu, kita putus sambungan dengan Prof. Agus, baru kita masuk Ahli yang ada di ruangan ini.

Silakan, Prof. Agus.

38. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [08:05]

Baik, Prof.

Yang saya hormati, Ketua Majelis Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, dan Bapak/Ibu semua hadirin di ruangan sidang.

Izinkan saya pada kesempatan yang terhormat ini, saya Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas 11 Maret memiliki sedikit pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang yakni menjadi Ketua dan Anggota KPU Sragen Tahun 2003-2013, akan menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai Ahli HTN dalam Perkara Perselisihan PPHU Perkara Register Nomor 168/PHPU.WAKO-XIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon Farid Kasim-Nurhaenih, kedua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Palopo Tahun 2024.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan dalam 5 pokok pikiran.

Pertama, perihal penyelenggara penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Kedua, Perihal penyelesaian ... waktu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan. Ketiga, perihal kewenangan KPU dalam pelaksanaan tahapan pencalonan pemilihan. Yang keempat, Perihal kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan. Yang kelima, perihal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pencalonan.

Yang Mulia. Yang pertama, perihal penyelenggaraan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa Undang-Undang Pemilu mengatur 4 jenis pelanggaran pemilu dalam 2 jenis sengketa pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut adalah Pelanggaran dana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan pelanggaran atas undang-undang yang lain.

Sedangkan dua jenis sengketa pemilihan, meliputi sengketa proses pemilu di Bawaslu dan sengketa proses pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing tersebut memiliki karakter, prosedur, dan authority yang berbeda-beda.

Dalam pemilihan diatur kewenangan institusi dan batasan kewenangan masing-masing. Untuk pelanggaran administrasi, kewenangan penyelesaiannya di tangan KPU, untuk sengketa antarpeserta pemilu, penyelesaian Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya, untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan

penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota, kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangannya diberikan kepada peradilan khusus.

Bahwa penyelesaian terhadap sengketa pemilihan memiliki dua tujuan.

Pertama, korektif terhadap kecurangan oleh mekanisme verifikasi (ucapan tidak terdengar jelas) dan hukuman (ucapan tidak terdengar jelas) bagi mereka yang melakukan kecurangan, baik secara administratif maupun pidana.

2. Menegakkan electoral justice system dalam pemilihan untuk memastikan agar sengketa dan proses pemilu dapat berlangsung sesuai perencanaan dan ditaatinya peraturan, serta dilakukannya tindakan ... administrasi, diharapkan tercipta ketertiban dalam semua proses pemilu.

Yang Mulia. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 juncto Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan, 85/2020, tanggal 29 September 2022. Pada pokoknya mengatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih diperiksa dan di adili oleh Mahkamah.

Yang Mulia. Yang kedua ingin saya sampaikan, perihal waktu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan. Pasal 157 pemilihan menyatakan bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan peserta pemilu dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota, maka yang memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ke MK dalam pembatalan hasil penetapan perolehan suara oleh KPU adalah peserta pemilihan yang seharusnya hanya tahapan-tahapan hasil perhitungan suara saja, bukan pada tahap-tahap sebelumnya, termasuk tahapan pencalonan.

Bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi pada setiap tahapan pemilihan, berupa temuan Bawaslu, maupun laporan, maka postur penyelesaiannya hukum dilakukan sesuai dengan tahapan jadwal pemilihan. Maka terhadap penyelesaian sengketa administrasi pemilihan pada tahap pencalonan diselesaikan pada tahap yang disediakan.

Bahwa dengan penyelenggaraan tahap pemilihan hanya pada waktu yang telah ditetapkan semata-mata untuk memastikan bahwa penyelenggaraan (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemilihan.

Yang Mulia, ketiga yang ingin saya sampaikan, perihal Kewenangan KPU dalam pelaksanaan tahapan pencalonan. Bahwa dalam tahapan pencalonan pemilihan Kewenangan KPU diatur PKPU 8/2024 tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang meliputi:

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon.

2. Pendaftaran pasangan calon.
3. Penelitian persyaratan administrasi calon.
4. Penetapan pasangan calon.

Bahwa merupakan ranah KPU dalam melaksanakan tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon. Adapun dimaksud persyaratan Administrasi Calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PKPU Pencalonan, yaitu Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi penelitian persyaratan administrasi, perbaikan persyaratan administrasi calon, penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

Bahwa KPU tidak berwenang untuk mengetahui kebenaran substansial terhadap dokumen persyaratan calon, termasuk ijazah yang digunakan dalam pencalonan sebagai calon kepala daerah, adapun yang memiliki wewenang atau otoritas terhadap kebenaran terhadap dokumen pencalonan, termasuk ijazah adalah lembaga satuan pendidikan yang mengeluarkan izin ... yang mengeluarkan ijazah atau melalui putusan pengadilan tata usaha negara.

Bahwa jika KPU ragu terhadap berkas syarat pencalonan administrasi termasuk ijazah, maka KPU mempedomani Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 2024 (PKPU Pencalonan) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran syarat administrasi calon sebagaimana dimaksud Pasal 112 PKPU, maka KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan institusi yang berwenang. Bahwa yang dimaksud instansi berwenang itu adalah lembaga satuan penyelenggara pendidikan atau sekolah.

Yang Mulia, yang keempat ingin saya sampaikan perihal kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan. Bahwa dalam sengketa proses administrasi pencalonan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berupa laporan atau temuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa KPU memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi selebih waktunya 7 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan. Bahwa jika terjadi sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antarpeserta dengan penyelenggara pemilu, maka Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa (ucapan tidak terdengar jelas) yang diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Pemilihan ... Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu provinsi, kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan, menerima rangkaian laporan, yang kedua mempertemukan pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dan keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat sebagai mediator dalam Ketentuan Pasal 144.

Yang Mulia, yang terakhir ingin saya sampaikan perihal penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pencalonan pemilihan. Bahwa jika terjadi dugaan pelanggaran administrasi dan tahapan pencalonan berupa ketidakabsahan dokumen persyaratan calon, termasuk ijazah, maka harus dilakukan melalui prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa jika KPU ragu terhadap keabsahan berkas dokumen administrasi pencalonan berupa ijazah, maka KPU dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual dilakukan terhadap lembaga yang mengeluarkan dokumen.

Bahwa dokumen dikeluarkan oleh lembaga dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang mempersoalkan sesuai asas dalam hukum administrasi yaitu ... tidak bersalah.

Bahwa terhadap perkara a quo yang dipersoalkan adalah mengenai KPU Kota Palopo tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palopo yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2021 tentang putusan musyawarah mufakat adanya dugaan penggunaan dugaan ijazah yang tidak memenuhi syarat dimana putusan Bawaslu Kota Palopo antara lain.

Meminta Para Pihak melaksanakan isi putusan dan kesepakatan. Kedua, melaksanakan klarifikasi pada instansi terkait. Ketiga, calon bersedia buat pernyataan kebenaran dokumen ijazah.

Bahwa proses musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa administrasi sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan.

Yang Mulia, Ketua dan Hakim Anggota. Bahwa KPU Kota Palopo telah melaksanakan putusan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [16:52]

Mohon diringkas Prof. waktunya sudah habis.

40. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [16:56]

i. Baik.

41. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Saya kasih kesempatan 1 menit lagi.

42. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [16:58]

Dalam klarifikasi kepada lembaga mengeluarkan ijazah dinyatakan dokumen ijazah dimaksud benar dan penyelenggara pendidikan

menyatakan bertanggung jawab atas pernyataan dibuktikan dengan 3 dokumen.

Bahwa KPU melakukan perubahan dari semula menuhi syarat karena diduga dokumen ijazah yang tidak menuhi syarat pasca-KPU melakukan klarifikasi dalam proses mediasi musyawarah yang dihadiri Para Pihak, kemudian KPU melakukan perubahan menjadi x [!sic]. hal ini semata-mata memastikan akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan.

Yang Mulia, bahwa perkara a quo seharusnya pihak menyelesaikan di ranah hukum administrasi dengan melakukan banding administrasi ke pengadilan tata usaha negara untuk memastikan apakah dokumen benar atau salah dan hanya dapat dilakukan pada saat tahapan penyelenggaraan berlangsung sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Putusan MK Nomor 110 Tahun 2011. Apakah calon telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana dan sudah dilakukan, namun karena alat bukti dan bukti oleh PTUN Kota Palopo diberhentikan.

Dalam perkara a quo pasca-KPU Kota Palopo menetapkan paslon Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan putusan atau rekomendasi tidak disengketa ... disengketakan administrasi Ke PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153, maka namun setelah selesai tahap pemungutan suara dan terdapat calon yang kalah dalam pencalonan suara, kasus a quo dibawa ke Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan adalah tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Pemilihan karena ruang penyelesaian tahapan ini telah diatur dan disediakan pranatanya oleh pembuat undang-undang.

Bahwa jika dalam tahapan pencalonan dengan pemilihan tidak ada pihak yang mensengketakan Ke PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154, maka dianggap telah selesai dan dihadapi di tahapan pencalonan dan dianggap tidak dapat pelanggaran hukum administrasi pemilihan karena pelanggaran administrasi pemilihannya dapat dilakukan pada tahapan pemilihan tengah berlangsung dan diputus Pengadilan TUN dalam waktu 21 hari dapat dilakukan kasasi ke MA dan MA akan memutus dalam waktu 30 hari. Putusan MA bersifat final dan mengikat dan KPU wajib menjalankan Putusan PTUN dan MA paling lama 7 hari sebagai yang diatur dalam Pasal 154.

Bahwa ketentuan tersebut untuk memastikan agar ada kepastian hukum dalam limitasi waktu penyelesaian adanya dengan pelanggaran administrasi lebih dari itu dalam rangka untuk memujudkan keadilan serta menjalankan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu sebagai yang diatur dalam pemikiran/idea yaitu pertama, transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam menyusun peraturan penyelesaian sengketa. Kedua, efektif dan kompetitif. Yang ketiga, bebas dan biaya wajar. Dan keempat, kerangka hukum. Dan kelima, hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum. Dan keenam, penegakan hukum dalam

membuat kebutuhan secara penuh dan tepat waktu. Dan terakhir, konsep ... konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu.

43. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Cukup, Prof.
Cukup, ya?

44. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [16:55]

Demikian ketentuan yang disampaikan semoga akan dapat membantu, Yang Mulia dan Hakim Anggota dalam menentukan kebenaran dan memutus PHPU ini dengan seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan.
Assalamualaikum wr.wb.

45. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Walaikumsalam.
Saya mau tanya kepada Termohon (...)

46. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:08]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Keterangan tertulis Ahli sudah dimasukkan atau belum?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:11]

Keterangan Ahli tertulis kami belum masukkan, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [20:15]

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:15]

Namun, yang kami masukkan bukti tambahan berupa keterangan affidavit, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Dari?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:19]

Dari Prof. Bayu, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [20:22]

Oke. Kita tidak akan dengar apa ... tanya jawab karena ini tidak memenuhi ketentuan. Kita sudah ingatkan semuanya harus dimasukkan satu hari sebelum sidang pembuktian ini. Jadi, kalau keterangan tertulis Prof. Agus tidak masuk, itu tidak sesuai dengan yang kita beritahu.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:39]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:40]

Kemarin kami sudah sampaikan di bawah (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [20:44]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:44]

Kemarin. Namun memang kami sampaikan di bawah, kemarin affidavit atau keterangan tambahan yang kami sampaikan pada saat mendaftar kemarin, itu kami telah masukkan. Nah, keterangan Prof. Agus memang kemarin agak telat kami masukkan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [20:59]

Oke.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [20:59]

Namun mohon izin, Yang Mulia, di persidangan yang terhormat ini agar dapat dipertimbangkan apa yang menjadi keterangan dari (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [21:05]

Nanti kita pertimbangkan, tapi ini (...)

62. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [21:06]

Prof. Agus. Karena sudah disampaikan, Yang Mulia, dalam sidang (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [21:06]

Sudah (...)

64. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [21:10]

Ya. Yang Mulia, siap.

65. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Saya sampaikan sesuai dengan ketentuan, 1 hari sebelumnya kalau tidak disampaikan itu tidak bisa dibawa ke forum persidangan ini.
Prof. Agus, terima kasih, Prof, ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [21:19]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [21:21]

Apa (...)

68. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [21:21]

Sama-sama, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Ya, terima kasih.
Jadi, tidak ada pendalaman soal ini, karena Termohon ... apa namanya ... tidak menyertakan keterangan tertulis Ahli. Terima kasih.
Sekarang kita masuk ke keterangan Ahli dari Pemohon, silakan.

70. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [21:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, Ketua Sidang dan juga Anggota, izinkan saya memberikan keterangan Ahli Pihak Pemohon dalam Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO ... dua ribu roma ... dua ribu tiga romawi ... XXIII/2025, yang kami hormati Para Pemohon dan Kuasa Termohon dan Kuasa Pihak Terkait dan Kuasa Hukum, serta Bawaslu, hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu yang tidak dapat saya dapat sebutkan satu persatu. Ada pun pokok keterangan Ahli yang akan Ahli sampaikan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa keabsahan pendaftaran merupakan salah satu syarat untuk dapat ditetapkannya seorang sebagai calon wali kota. Dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang 1/2015 / 10/2016 / 6/2020. Bahwa ketidakterpenuhan syarat dimaksud dapat berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai calon kepala daerah. Bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang menggugat keabsahan pencalonan tersebut dalam forum Mahkamah Konstitusi. Maka, Mahkamah Berwenang untuk meninjau kembali keabsahan pencalonan tersebut sebagaimana telah diputuskan Mahkamah dalam berbagai putusan terdahulu dan salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPUD-XI/2013, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan Putusan a quo, Mahkamah dapat menilai kembali keterpenuhan syarat pencalonan calon kepala daerah, meskipun telah ditetapkan hasil perolehan suara oleh Termohon. Yang Mulia, yang saya hormati salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah menurut Pasal 7 huruf c Undang-Undang Pilkada yaitu dan Pasal 14 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, selanjutnya berdasarkan Lampiran 2 angka 269 kata ... Undang-Undang 12/2011, kata *harus dimaknai* untuk mengata ... menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, maka digunakan kata *harus*. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Dengan demikian, terhadap calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dimaksud haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran peserta pilkada.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin berbahagia. Jika pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala dinas ... eh sori ... mohon maaf ada yang hilang 1 lembar, terlompatkan.

Dalam ranah hukum administrasi negara, setidaknya terdapat 2 makna dari fa ... frasa *tidak memenuhi syarat*, yaitu pertama, tidak dimilikinya syarat dimaksud dan/atau memiliki syarat, tapi tidak sah

secara hukum, baik materi muatannya, maupun cara perolehannya. Dalam rangka memenuhi kedua aspek tersebut, Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang Pilkada mengatakan ... menyatakan bahwa fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 112 PKPU Nomor 8/2024, KPU kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang telah diterima tersebut. Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran dokumen yang diterima, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu ataupun gabungan partai politik, peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi berwenang. Klarifikasi kepada pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut dapat dilakukan, baik secara kumulatif, maupun alternatif. Dalam hal KPU hendak melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Permendikbud Nomor 29/2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, selanjutnya dianggap dibacakan, maka pejabat yang berwenang dalam mengesahkan fotokopi ijazah paket yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi pendidikan adalah kepala dinas. Jika pejabat yang berwenang dangkal ... dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan menyatakan ketidakbenaran atas ijazah dimaksud, maka KPU wajib hukumnya untuk menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak dapat diajukan untuk memenuhi syarat pencalonan dan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa atas penetapan ketidakpenuhan syarat atau TMS tersebut, calon kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas keputusan dan/atau Berita Acara KPU mengenai status TMS dimaksud. Manakala penyelesaian sengketa Bawaslu menghasilkan kesepakatan, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh KPU. Pasal 61 Perbawaslu 2020 sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu kesepakatan, yaitu mengharuskan KPU untuk melakukan klarifikasi kembali atas ijazah pasangan calon, menurut Ahli tidaklah dapat dibenarkan karena sudah dilakukan dan hasilnya berupa penetapan tidak memenuhi syarat. Dan menurut Ahli, setelah sesuai ... dan menurut Ahli, apa yang dilakukan KPU itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal mana dikarenakan dalam mekanisme penyelesaian sengketa berlaku adagium, siapa yang mendalikan, dialah yang buktikan, *que alget probat*. Artinya menurut Ahli, sudah sepatutnya dalam kesepakatan *a quo*, Pihak Pemohon yang diberikan beban pembuktian dengan mengajukan bukti bahwa ijazah

yang dimiliki adalah sah dan benar menurut hukum. Pemohon maksud di sini adalah Pemohon di Bawaslu.

Namun yang disepakati justru sebaliknya, KPU yang kemudian diminta untuk kembali melakukan klarifikasi, padahal sudah dilakukan dan telah didapatkan keterangan dan jawaban dari pejabat yang berwenang. Bahwa dengan demikian, materi muatan kesepakatan yang mengharuskan KPU melakukan klarifikasi kepada partai pengusul dan sekolah yang bersangkutan, jelas salah dan keliru karena bukan ditujukan pada pejabat yang berwenang sebagaimana amanat Peraturan Perundang-Undangan Permendikbud 29/2014. Pun jika dilakukan klarifikasi kembali, jelas tidak diperlukan karena hasil klarifikasi sebelumnya telah dituangkan dalam keputusan KPU dimana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Calon dimaksud tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan calon kepala daerah karena ijazah yang digunakan tidak pernah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa keputusan KPU yang akhirnya diubah dari TMS menjadi MS, jelas merupakan keputusan yang keliru karena bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Badan pejabat Tata Usaha Negara dalam menyele ... menggunakan wewenang, wajib berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Kemudian pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atas Keputusan KPU demikian dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Dari uraian di atas, maka terhadap keterpenuhan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pilkada maupun PKPU, Ahli menyimpulkan sebagai berikut.

Klarifikasi KPU Palopo ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara adalah benar dan sah menurut hukum dan wajib digunakan sebagai dasar untuk menentukan keabsahan ijazah paket pendidikan calon kepala daerah. Tindakan KPU yang pada mulanya menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah atas nama Trisal Tahir tidak memenuhi syarat, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan perselisihan sengketa di Bawaslu Kota Palopo yang mengharuskan KPU melakukan klarifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan KPU Kota Palopo yang mengubah status Trisal Tahir dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil kesepakatan di Bawaslu, telah merupakan tindakan di luar wewenang karena hasil kesepakatan tidak ada yang menyatakan demikian. Tindakan KPU melakukan klarifikasi kembali ke PKBM Uswatun Hasanah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan wajib diabaikan karena PKBM Uswatun bukanlah pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap tin ... tindakan KPU Kota Palopo yang tidak melaksanakan rekomendasi di Bawaslu Kota Palopo dan KPU Kota Palopo pada pokoknya berdalil, mengenai kompetensi absolut Bawaslu Palopo dikarenakan objek yang dilaporkan sudah berubah status, dari bakal calon menjadi calon merupakan rekayasa hukum yang dilakukan secara melawan hukum. Bahwa tindakan demikian dikarenakan KPU Kota Palopo menganulir sendiri hasil klarifikasi yang telah dilakukannya, padahal menurut Ahli, sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1), ayat (7) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 112, 113, 119 PKPU 8/2024, setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU dan ditemukan fakta, dokumen syarat calon tidak memenuhi ... tidak sah, maka KPU harus menyatakan tidak memenuhi syarat dan mendiskualifikasi sebagai ... yang bersangkutan sebagai pasangan calon.

Bahwa KPU Palopo justru memaksakan untuk menyatakan calon dimaksud pada mulanya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat agar dapat memindahkan mekanisme penyelesaian sengketa ataupun keberatan sebelum penetapan pasangan calon menjadi setelah penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dari Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pengaduan laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar, pada salah 1 atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan calon, KPU provinsi meneruskan kepada pihak berwenang.

71. KETUA: SALDI ISRA [30:59]

i. Waktunya 1 menit lagi.

72. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [31:00]

Penggunaan Pasal 133 ... terima kasih, Yang Mulia.

Penggunaan Pasal 133 PKPU Nomor 8/2024 diperuntukkan bagi dugaan ketidakbenaran ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar yang diketahui atas dasar pengaduan atau laporan yang disampaikan setelah ditetapkannya pasangan calon.

Menurut Ahli, dalil yang menggunakan pasal yang dimaksud oleh KPU tidaklah tepat karena sejatinya KPU Palopo, telah memiliki keputusan sebelumnya dan telah diselesaikan melalui Bawaslu dan telah pula diputuskan melalui kesepakatan oleh Bawaslu dan isinya telah disimpangi oleh KPU Palopo.

Dengan demikian, manakala dugaan ketidakbenaran tersebut telah ditemukan dan diketahui sebelum penetapan calon, maka tindakan

yang harus dilakukan oleh KPU, yaitu melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU Palopo, menurut Ahli sudah semestinya diikuti oleh KPU dan tidak diabaikan sama sekali, sebagaimana halnya sebuah rekomendasi, dapat memperkuat ataupun memperlemah penerima rekomendasi dalam mengambil keputusan. Artinya, rekomendasi merupakan pertimbangan penguat, jika sesuai dengan keputusan yang diambil atau sebaliknya dapat melemahkan keputusan yang diambil, sebelumnya jika dia bertolak belakang.

Rekomendasi Bawaslu jelas hendak menguatkan keputusan tidak memenuhi syarat yang telah diambil sebelumnya dan melemahkan keputusan memenuhi syarat yang telah diputuskan. Kemudian, oleh KPU atas dasar tersebut, Ahli berpendapat demi kepentingan hukum dan integritas Pilkada, maka seharusnya KPU Palopo memutuskan keterpenuhan syarat calon berdasarkan pada pertimbangan yang menguatkan, yaitu menyatakan tidak memenuhi syarat calon para daerah atas nama Trisal Tahir.

Kesimpulan secara keseluruhan, Ahli berpendapat bahwa atas tindakan tersebut, KPU Palopo telah secara terang menerang meloloskan calon kepada daerah yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Pilkada dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan hal ini telah disebutkan di atas, Ahli berpendapat bahwa tindakan KPU secara substansial dan prosedural jelas bertentangan dengan peraturan perundangan sebagaimana telah uraikan ... Ahli uraikan dan segala bentuk produk hukumnya dapat dibatalkan. Demikianlah, keterangan Ahli ini sampaikan, Yang Mulia, untuk membuat terangnya perkara ini.

73. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Terima kasih.

74. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [32:51]

Assalamualaikum wr.wb.

75. KETUA: SALDI ISRA [32:51]

Waalikumsalam.

Sekarang Ahli Pihak Terkait, Silakan. Karena di sini 9 menit, Pak, saya kasih juga, Bapak, waktu 9 menit.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [33:02]

Baik. Assalamualaikum wr.wb.

77. KETUA: SALDI ISRA [32:05]

Walaikumsalam.

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [33:02]

Salam Sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang terhormat, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan Yang terhormat, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan juga Bapak, Ibu sekalian.

Mohon maaf saya tidak menyampaikan dalam bentuk teks karena dalam ... baik Bapak dan Ibu, terkait dengan ijazah yang menjadi sengketa, perkenalkan saya Rio dari Kementerian Pendidikan dimana tupoksi kami, yaitu sebagai tim dalam pengelolaan Ujian Nasional. Tadi, sudah disampaikan bahwa ijazah dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi. Kami diminta untuk menjadi Ahli dalam hal prosedur terkait dengan mengeluarkan ijazah pada tahun 2016, tadipun juga sudah disampaikan bahwa ijazah sudah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan melalui satuan pendidikan. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan ijazah, Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA [33:30]

Terima kasih. Ringkas sekali, Pak.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [33:34]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [33:34]

Jangan-jangan ini honorinya kecil juga, Pak, karena waktu yang digunakan juga singkat. Terima kasih.

Sekarang kita pendalaman Ahli.

Dimulai dari Pemohon mendalami Ahlinya nanti Termohon dikasih waktu untuk mendalami Ahli Pemohon, Pihak Terkait juga. Nanti Ahli Pihak terkait akan didalami oleh Pemohon dan didalami oleh Termohon.

Silakan.

82. KUUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [34:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama tentu kepada Ahli Pemohon. Saudara Ahli, terhadap situasi atau perkara ini, itu sudah ada putusan DKPP yang pada intinya putusan DKPP itu menyatakan bahwa para terlapor dalam hal ini adalah 3 orang dari anggota KPU Palopo dinyatakan bersalah, baik secara hukum maupun secara etik dan dihukum dengan hukuman berat karena dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan hukuman pemberhentian tetap. Pertanyaannya adalah apa status dari putusan ini, terkait dengan perkara yang sedang berjalan dan apa implikasi hukumnya dari putusan ini terhadap tindakan-tindakan yang telah di bersalah oleh DKPP tersebut?

83. KETUA: SALDI ISRA [36:06]

Cukup?

84. KQUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [36:07]

Itu dulu, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [36:08]

Enggak. Diselesaikan langsung, nanti (...)

86. KQUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [36:09]

Cukup.

87. KETUA: SALDI ISRA [36:13]

Cukup.

Silakan Termohon, kalau ada yang mau mendalami ke Ahli-nya Pemohon.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [36:16]

Ya, baik.

89. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Biar Ahli jawab sekalian nanti.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [36:19]

Siap, Yang Mulia.

Saya lanjutkan, apa yang jadi pertanyaan dari Pemohon tadi. Mohon pendapat Ahli mengenai kewenangan DKPP dengan Mahkamah Konstitusi. Mohon pendapat Ahli. Karena setahu kami, kewenangan DKPP itu hanya berkaitan dengan tindakan etik yang dilakukan oleh penyelenggara, sementara Mahkamah Konstitusi juga punya kewenangan sendiri. Tapi kami mohon penjelasan yang lebih daripada Ahli. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami mohon pandangan dan pendapat Ahli serta penjelasan Ahli. Sebagaimana tadi Ahli sampaikan bahwa dalam perkara a quo terdapat rekomendasi Bawaslu yang kemudian menjadi ... bagi Termohon dalam hal yang bagi KPU itu terdapat rekomendasi dimana rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah proses pencalonan selesai. Nah, apakah dalam sebuah rekomendasi tersebut berpendapat pada beberapa pandangan Ahli yang lain, tapi saya minta dari pendapat Ahli. Apakah rekomendasi tersebut tetap bisa dilaksanakan oleh Bawaslu? Ataukah seperti apa? Karena tahap pencalonan itu sudah selesai. Nah, tadi juga Ahli sempat menyinggung ketentuan Pasal 133. Jadi, jelas dalam ketentuan Pasal 133 itu bahwa jika semua tahapan sudah selesai, maka KPU setelah dilakukan penetapan pasangan calon, itu harus meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, dalam ilustrasi yang saya sampaikan bahwa KPU dalam hal ini kalau ada ilustrasi bahwa KPU juga menindaklanjuti rekomendasi tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Polres sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan kekuatan hukum tetap atau inkraacht? Itu mohon pendapat Ahli, itu yang kedua.

Yang ketiga, tadi juga Ahli sempat menyinggung ketentuan Pasal 113 PKPU 8. Nah, dalam ketentuan Pasal 113 tersebut, terdapat frasa *jika terdapat keraguan terhadap kebenaran*, ada frasa *kebenaran*. Yang ... maka, KPU harus melakukan klarifikasi kepada parpol yang bersangkutan dan instansi yang berwenang. Nah, saya memberikan ilustrasi kepada Ahli bahwa jika terdapat dua surat ... dua surat berupa surat keterangan, yang satu menyatakan tidak terdaftar, yang satu menyatakan benar. Nah, kira-kira dari dua surat ini sebagaimana ilustrasi yang saya sampaikan yang memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 113, apakah yang tidak terdaftar atau yang benar atau tidak benar? Mohon pendapat Ahli juga soal itu. Jadi, karena Ahli tadi menyinggung ketentuan Pasal 113. Nah, ini kita agak masuk ke hal-hal yang lebih konkret, Yang Mulia. Nah, itu yang ketiga.

Yang selanjutnya, kami juga mohon pendapat Ahli dalam hal persyaratan pencalonan apabila semua proses pencalonan sudah dilewati atau sudah dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU. Nah, bagaimana pendapat Ahli kalau pihak atau pasangan calon lain pada saat proses penyelenggaraan atau pemilihan berlangsung tidak mengajukan sengketa administrasi ataupun sengketa proses kemudian membawanya

ke Mahkamah Konstitusi? Mohon pendapat Ahli. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin itu dulu.

91. KETUA: SALDI ISRA [40:14]

Cukup. Kalau terlalu panjang, pertanyaannya nanti sebagian honor dari sini dipindahkan ke sini.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [40:20]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [40:23]

Pihak Terkait, silakan.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [40:25]

Ya, izin, Menjelis. Kami tidak mengulang pertanyaan dari rekan-rekan kami sebelumnya. Kami singkat saja.

Yang pertama, tadi Ahli menjelaskan tentang Pasal 113 dalam hal terjadi keraguan. Nah, Pasal 113, keraguan itu kan bahasa undang-undang, Pak. Pertanyaan saya adalah apakah keraguan itu bisa ditafsirkan secara subjektif?

Nah, yang kedua. Apakah Saudara Ahli tahu bahwa ... mohon Ahli jelaskan, KPU Republik Indonesia menerbitkan juknis tentang verifikasi administrasi yang di dalamnya mengatur tentang indikator kebenaran, termasuk di dalamnya adalah bab tentang ijazah, bagaimana indikator kebenaran dalam verifikasi ijazah? Mohon Ahli jelaskan soal itu.

Yang selanjutnya, Majelis. Tadi Ahli sampaikan tentang ... apa ... melanjutkan yang ditanyakan oleh rekan kami dari Termohon, Majelis, tentang Pasal 154, Majelis. Bahwa tadi Ahli menjelaskan tentang ... kalau misalnya ada penetapan calon, kemudian setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan calon, apakah menurut Ahli itu dapat ditafsirkan sebagai pengakuan diam-diam atau penerimaan dari setiap orang yang tidak keberatan terhadap penetapan tersebut? Itu untuk sementara, Majelis. Terima kasih.

95. KETUA: SALDI ISRA [41:38]

Cukup. Jadi, bukan sementara, selesai.

Setelah Ahli jawab, nanti Hakim lagi yang mau mendalami Ahli agar Ahli ini tidak senang-senang saja menerima honor, begitu. Jadi, pendalamannya berlapis.

Ahli disilakan untuk menjawab Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Silakan.

96. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [41:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Merujuk Putusan PHPU pilpres lalu, saya ingat betul itu Mahkamah salah satunya mempertimbangkan dalam hal penyelenggara pemilu sudah memutuskan beberapa dugaan pelanggaran, itu akan dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah nantinya untuk dalam mengambil keputusan. Dalam hal putusan itu sudah dianggap benar, Mahkamah akan mengikuti. Tapi, kalau seandainya putusan itu dianggap Mahkamah tidak benar, Mahkamah kemudian berwenang menganulirnya. Bagaimana kedudukan putusan DKPP?

Saya menyatakan bahwa putusan ini akan menjadi rujukan bagi Mahkamah untuk memperkuat dalil bahwa penyelenggara pemilu yang sudah diberikan sanksi oleh DKPP itu memutuskan secara tidak benar dan tidak profesional. Artinya, kalau memang kemudian ... meskipun tadi ya dikatakan tidak ada pembuktian secara pidana, di sinilah pentingnya DKPP itu, substansinya sama, apa beda etik dengan pelanggaran pidana? Substansinya sama, tapi sanksinya berbeda. Kalau etik itu, sanksinya itu bisa berupa teguran saja, bahkan pemberhentian. Tapi kalau pidana, bisa pemidanaan. Tapi materiil perbuatannya sama, terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang dan yang lain-lain, bahkan etik itu lebih tinggi dari itu.

Makanya kalau ditanya status putusan DKPP, ini justru menjadi alat bukti yang sangat otentik dan kuat, valid secara hukum, tidak terbantahkan bahwa putusan yang mengatakan meloloskan salah satu calon yang kemudian dinyatakan TMS menjadi MS itu jelas melanggar secara hukum.

Lalu, apakah kemudian Mahkamah bisa menganulir itu? Itu silakan Mahkamah yang menilai, penjelasan mengatakannya bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan dalam dalil terhadap ketidakprofesionalan.

Berikutnya adalah terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Secara hukum memang dimanapun, ya, hukum administrasi mau teori itu mengatakan bahwa non-binding, dia tidak mengikat. Tapi dia bisa memperkuat atau memperlemah, itu yang tadi Ahli sampaikan, rekomendasi Bawaslu ini kalau kita lihat, Ahli men ... men apa ya ... menengarai, menengarai. Bahwa ada permufakatan yang kemudian mau dilakukan untuk mengubah objek perdebatan yang sebelumnya adalah syarat pencalonan menjadi syarat untuk dia bisa dibatalkan sebagai pasangan calon. Nah, frame ini yang kemudian harus kita lihat bahwa keberatan klarifikasi sudah dilakukan, TMS sudah diterbitkan, tapi di

ujung itu dicabut, kemudian segera ditetapkan, munculah penetapan sehingga kemudian berlakulah ketentuan Pasal 133 itu.

Nah, ini yang saya pikir memang kemudian patut diduga, Ahli mengatakan patut diduga ini sebuah rangkaian perbuatan yang tidak bisa kita pisah-pisah. Jadi, kalaulah, ya, dugaan pelanggaran ataupun dugaan ketidakbenaran dari ijazah itu diketahui setelah penetapan ada keberatan, Ahli setuju bahwa itu berlaku Pasal 133. Tapi ini sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada proses dari awal, sudah dilakukan oleh KPU sendiri, lalu tiba-tiba dalam kesepakatan, pun itu dilakukan, kalau kita baca, ya kesepakatan itu mengatakan bahwa dia diklarifikasi ke pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang bukan sekolah, ya. Menurut Permendikbud, kalau dia mengambil paket, pejabat yang berwenang itu adalah dinas dan dia bukan bersekolah, mohon maaf, saya beliau tidak bersekolah, tapi beliau mengambil paket itu di PKBM, bukan juga pejabat yang ada di PKBM. Jadi, membandingkan antara keterangan yang dikeluarkan oleh PKBM dengan keterangan yang dikeluarkan oleh dinas sebelumnya, itu tidaklah equal baik secara substansi maupun secara formal. Kenapa? Tidak bisa kita benturkan karena satu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, satu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, menurut Permendikbud.

Lalu yang kedua. Secara formatnya, secara isinya, itu jelas berbeda, satu dikeluarkan secara resmi tertulis, ya, satu hanya berupa keterangan sepanjang Ahli baca dari ... apa ... dokumen yang ada. Jadi, kalau mau dibanding-bandingkan itu, ojo dibanding-bandingkan, karena dia tidak setara dan tidak equal, ya secara hukum, kecuali sama-sama merupakan pejabat yang berwenang, ini baru kita bisa terima.

Berikutnya adalah keraguan-raguan, apakah itu hak subjektif? Ya, makanya kan kalimatnya juga kan keraguan-raguan itu ada ketidakyakinan kalau bahasa yang lain dan itu sangat subjektif dan undang-undang kemudian membuka ruang, Kalau anda ragu, silakan. Dan itu diskresinya ada di penyelenggara Pemilu. Apakah keraguan-raguan itu dia ungkapkan secara lisan lalu berujung pada perbuatan, melakukan klarifikasi, atau cukup di dalam hati? Kalau keraguan-raguan dalam hati, ya mungkin bisa saja dikesampingan saja. Tapi tidak termanifestasi sebagai sebuah tindakan administrasi. Yang sekarang dilakukan itu adalah keraguan-raguan itu sudah diwujudkan, tindak lanjutnya berupa tindakan administrasi, klarifikasi. Yang ini yang kemudian sudah menghasilkan apa yang kemudian didalilkan sebagai ketidakbenaran itu.

Bagaimana dengan rekomendasi tadi? Toh pidananya tidak terbukti, mohon izin mengomentari sedikit, itu tidak terbukti bukan karena proses hukumnya berjalan, tapi karena Para Pihak yang dipanggil oleh Gakkumdu tidak menghadiri sehingga terjadilah daluwarsa. Saya pikir ini, Yang Mulia, modus yang juga mesti kita lihat, ya keterbatasan waktu yang ada di dalam penegakan hukum pidana kita, 14 hari itu

digunakan oleh para pihak untuk mengulur-ulur waktu tidak hadir dalam proses pemeriksaan sehingga terjadilah daluwarsa. Padahal, aparat penegak hukum kita punya upaya paksa, Kalau memang tidak bisa dipanggil, datang dong ke kantornya. Tapi ini kan, lagi-lagi saya tidak mengatakan itu ada permufakatan dalam konteks itu, tapi yang jelas kalau baca dokumennya, penetapan tersangka sudah dilakukan, tapi bukan tidak cukup bukti, daluwarsa karena dia tidak hadir, Para Pihak ini.

Lalu, siapa pejabat yang berwenang? Tadi sudah saya jelaskan.

Kenapa tidak dilakukan sengketa administratif, lalu kenapa, kemudian dilakukan sengketa MK, ke-MK?

Nah, lalu apakah pembiaran penetapan itu sebagai sebuah penerimaan secara diam-diam? Belum tentu juga. Kenapa? Karena penetapan itu bahasa Ahli adalah upaya paksa yang coba dilakukan oleh KPU untuk semua pihak Anda terima ini.

Nah, begitu sudah diputuskan, itu kan, berlaku Pasal 133, Pasal 13[sic!] mengatakan "Ya sudah KPU meneruskan." Itu kan, dalam bahasa lain ini lepas tangannya, ya. Kami sudah pindah lho rezimnya, sekarang kalau Anda mau keberatan, silakan Anda tempuh ini mau pidana, mau ke PTUN dan semacam-sembacam, pelanggaran administrasi dan semacam. Termasuk, nah jangan lupa, apa yang kita lakukan hari ini secara lebih luas Ahli mengatakan itu bagian yang juga diupayakan. Jadi, bahwa kemudian muncul kesadaran untuk melakukan upaya hukumnya di Mahkamah ini sebagai garda terakhir, ya, dalam mencari keadilan, saya pikir Pasal 133 itu juga berlaku.

Makanya kemudian, ketika instrumen-instrumen pidana tidak berlaku, ketika instrumen Bawaslu tidak berjalan, peradilan pidana pun tidak berjalan, ya Mahkamah ini kemudian berwenang untuk memutuskan keterpenuhan ketentuan yang didalilkan tadi sebagai bagaimana penyelesaian melalui mekanisme Pasal 133.

97. KETUA: SALDI ISRA [50:01]

Bisa diringkas?

98. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [50:02]

Karena tadi banyak, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [50:04]

Ya diringkas lah, kalau Ahli itu (...)

100. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [50:03]

Indi (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [50:03]

Kan bisa.

102. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [50:07]

Ya. Indikator kebenaran, 1 kebenaran formil itu bisa kita lihat dari formatnya, ya. Jadi, sebuah ijazah/sebuah surat itu baru sah, dia. Jika memang menggunakan format yang sudah ditentukan, lalu isinya memang diperuntukkan kepada orang yang tepat, lalu cara memperolehnya, dan saya pikir klarifikasi itu yang kemudian harus kita lihat apakah cara klarifikasi yang dilakukan oleh KPU sudah benar secara prosedural? Lalu apakah isi dari dokumen yang diklarifikasi oleh KPU itu sudah benar? Termasuk juga apakah formatnya sudah sesuai dengan format yang lazim? Ini yang kemudian kalau dalam ranah pidana kan, kalau tidak sesuai format, patut diduga itu palsu. Tapi di sini kan, bukan bicara pemalsuan, tapi kebenaran. Nah, jika pejabat berwenang mengatakan isinya tidak sesuai, formatnya juga berbeda, bahkan dalam hukum administrasi begitu ketatnya, pada masa itu, huruf apa yang digunakan dalam penulisan ijazah? Itu juga akan diperiksa.

Jadi itu, saya pikir itu akan terlalu jauh, tapi kalau ditanyakan indikator kebenaran, Ahli mengatakan kira-kira yang 3 itu yang utama, yang mesti dibuktikan. Itu saja, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [51:12]

Terima kasih.

104. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [51:12]

Terima kasih.

105. KETUA: SALDI ISRA [51:14]

Cukup.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:20]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Ahli karena memang tugas Ahli itu memberikan perspektif pencerahan membantu Majelis Hakim Mahkamah untuk

meyakini kebenaran, maka saya tidak akan bertanya pada kasusnya, tapi saya bertanya dalam konteks perspektif.

Kita mulai dari Undang-Undang Pilkadaanya, Pasal 7 ayat (2) huruf c itu berbunyi, "Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat". Kemudian, ini memang dioperasikan oleh Pasal 45 ayat (2) huruf d, ya. Angka 1 yang berbunyi, "Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c."

Pertanyaan saya kepada Ahli untuk Mahkamah, apakah mahkamah itu harus selalu berpedoman melihat soal keterpenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf c itu hanya pada apa yang diatur di pasal 45 ayat (2) huruf d, ijazah? Bagaimana kalau seseorang, seorang calon ini terlepas dari kasus konkretnya, ya, dia faktualnya, ya, sudah menempuh pendidikan tingkat lanjutan atas, tetapi ijazahnya bermasalah karena prosedur administrasi, ya. Mahkamah harus melihat mana? Harus melihat berpatokan pada ijazah yang bermasalah atau berpatokan pada kebenaran substantifnya bahwa dia telah menamatkan pendidikan tingkat lanjutan atas. Itu pertanyaan saya yang pertama, ya.

Pertanyaan saya yang kedua kepada Ahli karena Ahli tadi menyinggung Pasal 133 PKPU Pencalonan. Ini kalau tidak salah PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ya. Itu yang menarik di sana, saya bacakan saja ini. Dalam hal ... ayat (1)-nya, dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Saya garis bawahi frasa *adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*, itu. Ayat (2)-nya mengatakan, "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, ya, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ... dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pa ... dalam Pasal 125 dan Pasal 126 PKPU."

Pertanyaan saya sekarang, ini terlepas dari kasus konkretnya, saya mau bertanya sama Ahli. Secara a contrario, bisakah kemudian ini diartikan bahwa terlepas ada masalah atau tidak pada ijazah itu, tapi sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka enggak bisa ditindaklanjuti ini. Misalnya ditindaklanjuti dengan menyatakan apakah ini sah atau tidak sah. Nah, saya minta pendapat Ahli soal itu. Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [55:52]

Silakan, Saudara Ahli. Saya hanya 1 poin saja, ini kasus soal ini, bukan hanya tunggal terjadi di Palopo ini, ada beberapa ini. Nah, saya mau dapat ... apa ... pengayaan dari Ahli. Dalam hal terja ... terdapat fakta seperti ini, ada dinasnya mengatakan ini benar, sekolahnya menyatakan ini tidak benar. Lalu ada kejadian sekolahnya menyatakan benar, dinasnya tidak benar. Nah, kira-kira apa yang harus dipedomani oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah, untuk menentukan kebenaran dari soal yang dihadapi? Dan bagaimana menentukan itu? Nah, itu saja. Disilakan, cukup.

108. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [56:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai dari yang nomor tiga dulu karena ini menarik. Izin, ya, Pak Asrul.

Karena ini sangat terkait dengan tadi yang saya sampaikan, permendikbud itu membagi itu, Yang Mulia. Ya, Pasal 2 ayat (5) itu membagi siapa-siapa pejabat yang berwenang untuk melegalisir. Jadi, ada yang namanya ijazah dalam negeri, ada ijazah luar negeri, ada paket, ya. Itu dibagi siapa-siapa. Kalau kita yang sekolah, itu ... kalau kita yang mengikuti pendidikan sekolah, itu yang melegalisir adalah sekolah, tapi kalau dia ambil paket yang melegalisir adalah PKBM ... sori, dinas sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (5) itu.

Jadi, kalau terjadi 2 perbedaan, ya tinggal dilihat saja adresat dari yang mengeluarkan itu siapa, siapa pejabat yang mengeluarkan? Kalau memang kemudian misalnya menurut dalam kasus ini adalah bahwa yang mengeluarkan itu adalah dinas, tapi pihak PKBM juga mengeluarkan, tentu pihak PKBM bukanlah pejabat yang berwenang, tentu yang dipedomani adalah yang dikeluarkan oleh dinas. Jadi, kalau seandainya ada 2, tinggal kita lihat saja, apa dasar kewenangan dari masing-masing lembaga itu yang menerbitkan. Nah, jika salah satu tidak berwenang, berarti dia menyem ... membuat sesuatu yang di luar wewenang, berarti batal dong ya salah satu itu, jadi tergantung itu. Kecuali ... kecuali, memang diberikan kewenangan yang sama. Nah ini kan, kita jangan keliru dulu bahwa ini semuanya itu berbeda-beda. Ada 7 item kalau tidak salah saya di situ, pengklasifikasian. Termasuk misalnya kalau dia ijazah luar negeri. Siapa yang bisa melegalisir? itu Kementerian. Nah, itu sudah dibagi.

Makanya kemudian dalam kasus ini, ketika legalisir diberikan kepada sekolah, kalau dia paket berarti sekolah tidak sah mengeluarkan legalisir. Itu terkait dengan ini, Yang Mulia.

Jadi, kembali kepada keabsahan itu, ya berdasarkan keabsahan bertindak yang kemudian diberikan oleh peraturan perundangan-undangan terkait dengan kewenangannya.

Nah, baru nomor satu nih, Yang Mulia, Pak Asrul. Kalo kemudian (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [58:10]

Pak Arsul, kalau Asrul lain lagi. Kalau orang Padang baru Asrul, kalau orang pekalongan, Arsul.

110. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [58:15]

Siti Nurbaya.

111. KETUA: SALDI ISRA [58:17]

Ya, silakan. Supaya jangan tegang betul, Pak.

112. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [58:18]

Lidah Minang ini.

113. KETUA: SALDI ISRA [56:22]

Ya.

114. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [56:44]

Kebenaran substantif dan kebenaran prosedural. Ini saling melengkapi, Yang Mulia. Jadi, tidak untuk dipertentangkan ya, tidak untuk dipertentangkan kalau saya mengatakan. Salah satu tidak terpenuhi, batal, batal. Jadi, substantifnya ... ya, saya membayangkan ada substantifnya dia ikut ke sekolah, duduk di kelas itu, tapi tidak terdaftar. Dia pintar, juara mungkin, tapi kan dia tidak terdaftar. Berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan apa ... ijazah untuk pendidikan formal itu. Paling-paling dia nanti dapat honoris causa sebagaimana halnya misalnya kalau ada orang yang tidak di kampus ya, tidak mengikuti proses pengajuan profesor atau doktor, lalu diberi kehormatan karena kapasitasnya. Jadi, ada bilik-biliknya, Yang Mulia. Kalau untuk mau dapat dua-dua, secara sah dia pintar mendapatkan pendidikan substantifnya, secara prosedural untuk diakui, ya, kapasitas keilmuannya itu oleh negara, dia harus mengikuti dua-duanya. Jadi, kalau salah satu tidak terpenuhi, sepintar apa pun, tidak bisa dia diberikan pengakuan atau sesubstantif apa pun proses yang dia ikuti, setiap hari dia datang ke sekolah mengikuti. Kalau untuk datang ke sekolah kan, penjaga sekolah

juga datang, Yang Mulia, ke sekolah, tapi kan tidak bisa juga dapat ijazah dia di situ.

Nah, dia datang ke sekolah mengikuti proses, mulai dari pendaftaran, tidak semua yang mendaftar juga mendapatkan ijazah, Yang Mulia, karena ada juga yang D.O. Jadi harus diikuti semua prosedur itu. Makanya kemudian saya tidak pada posisi membenturkan kedua itu karena bagi saya salah satu tidak terpenuhi dalam konteks otoritas hukum administrasi, maupun wewenang negara untuk memberikan legitimasi terhadap dia, dia harus memenuhi kedua unsur itu.

Lalu berikutnya terkait dengan putusan pengadilan tetap. Nah ini yang kemudian, sebenarnya ruang yang kemudian diberikan oleh undang-undang juga dan PKPU. Bahwa maksud yang ada di situ itu kan, kalau ini ditempuh jalur pidana, ya. Kalau ini ditempuh pidana, tapi kan bahasa lainnya kan, kalau Anda tidak puas juga dengan penetapan kami, silakan Anda tempuh jalur pidana.

Nah, sekarang kan mungkin, ya ... mungkin pihak-pihak yang ingin menempuh pidana itu kan juga tidak mau melakukan itu. Tapi jangan lupa, jalur itu sudah dilakukan, ya. Dan semua pihak yang dilaporkan jalur pidana itu sudah jadi tersangka, tapi perkaranya daluwarsa.

Lalu kemudian bagaimana memaknai pihak-pihak yang ditetapkan itu? Nah, inilah Kewenangan Mahkamah saya pikir, Yang Mulia. Jadi saya tidak mau mendikte Mahkamah, apakah Pasal 133 ini wajib hukumnya untuk diikuti, pidana dulu baru ke Mahkamah. Saya malah sebaliknya jika Pasal 133 ini tidak berjalan, Mahkamah yang mengambil alih.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:21]

Tugasnya Ahli itu antara lain membantu Mahkamah menemukan ini. Kalau tidak, dikurangi lho honorinya.

116. AHLI DARI PEMOHON: CHARLES SIMABURA [01:02:29]

Honor itu kan bisa juga datang dari honoris, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [01:02:33]

Cukup ya? Cukup sekarang (...)

118. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:02:38]

Izin, izin, Yang Mulia?

119. KETUA: SALDI ISRA [01:02:37]

Dari mana ini?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:02:38]

Mohon untuk menjadi catatan dalam sidang ini.

121. KETUA: SALDI ISRA [01:02:41]

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:02:42]

Tadi Ahli sempat mengutip Permendikbud 29/2014.

123. KETUA: SALDI ISRA [01:02:47]

Ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:02:47]

Kami ingin sampaikan, bahwa mohon Mahkamah mengecek dasar hukum yang digunakan oleh Ahli karena sepengetahuan dan sepemahaman kami, Permendikbud 29/2014 itu dinyatakan sudah tidak berlaku. Ada Permendikbud baru Nomor 58, Yang Mulia. Mohon menjadi catatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

58, tahun?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:03:06]

2024, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [01:03:07]

Oke, nanti kita cek. Oke, terima kasih.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:03:10]

Izin, Majelis?

129. KETUA: SALDI ISRA [01:03:11]

Ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:03:11]

Yang Mulia, tadi juga ... izin Ahli tadi menjelaskan tentang indikator kebenaran Majelis, sebagai catatan saja bagi Majelis. Bahwa dalam tahapan klarifikasi, verifikasi, administrasi, KPU Republik Indonesia menerbitkan juknis, Majelis, 1268 yang mengatur tentang indikator kebenaran (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [01:03:27]

Oke.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:03:28]

Terkait dengan verifikasi ijazah. Tadi yang disampaikan Ahli tadi, Majelis, itu sepertinya tidak merujuk ke situ, Majelis. Terima kasih.

133. KETUA: SALDI ISRA [01:03:33]

Ya. Ahli itu bisa sembarang ngomongnya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:03:35]

Siap, Majelis.

135. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Tapi yang memutuskan nanti itu benar/tidaknya, Hakim.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:03:37]

Siap, Majelis. Terima kasih, Majelis.

137. KETUA: SALDI ISRA [01:03:39]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, silakan, apa yang mau didalami dari Ahlinya? Silakan.

Biar ditanya, Pak. Jangan Bapak yang ngomong ditanya sama ... kita uji pula caranya ... apa ini ... Kuasa Hukumnya bertanya ke Bapak ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:03:56]

Baik, terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [01:03:56]

Siapa yang ... Bapak yang mewakili, ya? Cuma dapat jatah satu lho, Pak. Siapa ini? Tidak Pak.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:04:08]

Ahli yang pertama, sama dengan tadi, Majelis, kami tampung semuanya atau sekali?

139. KETUA: SALDI ISRA [01:04:17]

Ini yang ngatur lalu lintas saya, Pak.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:04:18]

Siap.

141. KETUA: SALDI ISRA [01:04:19]

Bapak tanya terus. Apa yang mau Bapak tanya, tapi jangan lama-lama, Pak.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:04:23]

Baik, Majelis.

143. KETUA: SALDI ISRA [01:04:23]

Kita mau periksa Saksi.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:04:25]

i. Baik, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [01:04:25]

Ya.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:04:26]

Yang pertama, tadi Ahli menyampaikan tentang ijazah, pertanyaan saya sederhana.

Yang pertama, apakah ketika seseorang itu lulus, ijazahnya itu diterima hanya ijazah saja atau ada dokumen lain selain ijazah? Itu yang pertama.

Yang kedua, menyambung yang disam ... dipertanyaan dari Yang Mulia Majelis Pak Arsul Sani tadi, apakah setiap siswa setelah dia selesai belajar kemudian dapat ijazah, apakah ada kewajiban bagi setiap siswa itu untuk mengecek apakah ijazah itu terdaftar atau tidak? Itu.

Nah, kemudian saya mau dalam ke Ahli lagi. Beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa situasi ya, seperti kasus di SMA Negeri 1 Menwa[sic!] beberapa waktu yang lalu yang siswanya tidak bisa melanjutkan studi karena ija ... karena kalalaian sekolah tidak melaporkan data siswanya. Kemudian, di Makassar beberapa waktu yang lalu, 1.300 siswa itu tidak bisa melanjutkan studinya karena sekolah juga lalai mendaftarkan siswanya. Dan ada beberapa kejadian di Indonesia yang saya kira juga jadi catatan secara nasional, ya. Pertanyaan kami adalah kalau dalam situasi seperti itu, ada siswa yang sekolah kemudian secara administrasi tidak terdaftar, pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan hukumnya? Bagaimana negara melindungi hak hukum dari siswa-siswa tersebut yang sudah melaksanakan program, melaksanakan kegiatan belajar?

147. KETUA: SALDI ISRA [01:06:02]

Cukup?

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:06:04]

Kemudian yang terakhir, Majelis, mungkin dokumen yang pendamping selain ijazah tadi, apakah dokumen itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa seseorang itu sudah menempuh semua proses pendidikan, belajar di satuan pendidikan tertentu? Itu Majelis, terima kasih.

149. KETUA: SALDI ISRA [01:06:25]

Oke, terima kasih.

Termohon, ada yang mau didalami ke Ahli?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:06:27]

Siap, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [01:06:33]

Silakan.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:06:33]

Kami konsisten dengan pertanyaan kami. Sederhana saja pertanyaannya kepada Ahli.

Yang pertama, mohon penjelasan Ahli kalau ada keterangan yang menyatakan satu keterangan tidak terdaftar, satu keterangan yang menyatakan tidak benar atau benar. Seperti apa pengertian keterangan tidak terdaftar? Seperti apa pengertian keterangan benar atau tidak benar? Kemudian tidak terdaftar ini, apakah memang tidak ada datanya atau seperti apa? Karena sepemahaman kami, ada sekarang itu sistem pendidikan kita menggunakan digitalisasi. Seperti apa penjelasan Ahli berkaitan dengan hal ini? Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [01:07:19]

Terima kasih. Pemohon, silakan.

154. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:07:20]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [01:07:21]

Ya.

156. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:07:21]

Untuk Ahli, kami ada me ... menyerahkan dokumen bukti. Jadi, yang pertama dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara P-16, kemudian ada Kepala Dinas DKI Pendidikan di P-21, kemudian Kementerian Pendidikan.

Nah, untuk dokumen di Suku Dinas, ya. Dia mengeluarkan pernyataan, ini juga hasil klarifikasi pertama KPU. Jadi, Suku Dinas atas nama lembaga, atas nama instansi menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi blangko ijazah itu bentuk tulisan tidak sama, format tulisan, nomor peserta ujian, kemudian kolom pada ijazah.

Kemudian yang kedua. Menyatakan arsip di digitalisasi ijazah lembaga PKPM Yusa tidak terdapat nama Trisal Tahir, itu instansi yang pertama, nanti pertanyaannya, Pak saya di yang terakhir. Ini instansi pertama yang mengularkan ini, Pak, ya. Jadi, jangan (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [01:08:21]

Tidak ditakut-takutin Ahli, Pak, Bapak tanya saja.

158. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:08:23]

Ya.
Yang kedua (...)

159. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Ya, ya.

160. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:08:24]

Dari kepala dinas juga menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional, ini dari Kepala Dinas Jakarta bersama dengan keterangannya dengan Administrasi Jakarta Utara.

Nah terakhir, ini untuk Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi juga menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak terdaftar pada lembar jawaban komputer.

Nah pertanyaan saya Saudara Ahli, dengan 3 surat autentik ini dari 3 instansi yang berwenang. Apakah masih ada celah untuk ijazah yang bersangkutan ini atas nama Trisal Tahir ini benar-benar ijazah yang memang valid atau ijazah yang benar dikeluarkan oleh 3 instansi ini, padahal sudah 3 instansi ini yang mengatakan tidak terdaftar atau tidak ... bukan peserta ujian gitu? Itu mungkin bisa dijawab oleh Saudara Ahli gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [01:09:12]

Cukup.
Silakan Ahli. Nanti setelah Bapak jawab baru Hakim, kalau ada yang tersisa dibersihkan sama Hakim. Silakan, Pak.

162. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:09:19]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, Bapak, Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan dokumen selain ijazah, memang ada dokumen tersebut yang namanya adalah (SHUN) Sertifikat Hasil Ujian Nasional dimana di Tahun 2016 SHUN tersebut dicetak oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi.

Dan kemudian terkait, apakah itu terdaftar atau tidak, di kami di pusat asesor pendidikan yang terdaftar adalah siswa yang mengikuti ujian, bukan yang mendapatkan ijazah atau yang hal yang lain sesuai

dengan tupoksi kami untuk menyelenggarakan namanya ujian nasional tidak saja dari PKBM, namun juga sekolah formal lainnya.

Kemudian, tadi sudah disampaikan terkait dokumen dari suku dinas memang benar dari kementerian sudah memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam database ujian nasional. Jadi, itu yang memang kami pernah membalas surat tersebut melalui Direktorat PMPK, jadi tidak langsung ke ... apa ... yang mengirim surat.

163. KETUA: SALDI ISRA [01:10:39]

Bapak, Bapak mengetahui surat itu dikeluarkan?

164. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:10:42]

Betul.

165. KETUA: SALDI ISRA [01:10:42]

Oke, lanjut.

166. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:10:42]

Ya.

Kemudian terkait benar atau tidaknya, di sini kami hanya bisa menyampaikan bahwa data, data yang diminta klarifikasi ke Puspendik itu memang tidak ada dalam database. Jadi, ini mungkin tidak terkait, bagi kami mungkin ini tidak terkait benar atau tidak, kami hanya berdasarkan data yang dimintakan ke kami.

Kemudian terkait dengan perlindungan, mungkin ini bukan untuk tupoksi kami, mohon maaf di (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [01:11:19]

Ya.

168. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:11:19]

Pusat Satuan Pendidikan.

169. KETUA: SALDI ISRA [01:11:22]

Cukup, Pak, ya? Saya mulai, Pak, nanya ke Bapak (...)

170. KCUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:11:25]

Izin, Yang Mulia?

171. KETUA: SALDI ISRA [01:11:25]

Sudah habis jatahnya, Bapak. Kami lagi giliran Hakim, masa giliran Advokat saja.

Saya mulai pertanyaan pertama, Pak, Pak ... apa ... Haryo Susetiyo, ini kan soalnya Paket C ya, Pak, ya? Bagaimana orang bisa ikut Paket C itu prosesnya Pak? Coba, Bapak terangkan.

172. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:11:52]

Ya, yang dimaksud adalah mengikuti Ujian Nasional Paket C.

173. KETUA: SALDI ISRA [01:11:55]

Ya.

174. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:11:55]

Jadi, biasanya dari sekolah itu akan melak ... yang melakukan pendataan adalah dinas pendidikan provinsi masing-masing.

175. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Oke.

176. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:00]

Kemudian sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan akan disampaikan kepada Puspendik.

177. KETUA: SALDI ISRA [01:12:10]

Saya ubah pertanyaannya, Pak.

178. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:12]

Oh, ya?

179. KETUA: SALDI ISRA [01:12:12]

Misalnya saya ini siswa, Pak.

180. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:14]

Ya.

181. KETUA: SALDI ISRA [01:12:15]

Mau ikut Paket C, itu biasanya Paket C itu ... apa bedanya dengan penyetaraan, Pak? Sama atau tidak?

182. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:21]

Sama.

183. KETUA: SALDI ISRA [01:12:21]

Sama.

184. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:21]

Itu program kesetaraan, Pak.

185. KETUA: SALDI ISRA [01:12:23]

Ya, ini orang sebetulnya ikut paket ujian (...)

186. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:26]

Betul.

187. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]

Yang mungkin dia tidak bisa menyelesaikan jenjangnya sampai Ujian Nasional, kan begitu kan? Begitu, Pak?

188. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:33]

Bukan. Jadi, siswa Paket C untuk (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [01:12:35]

Ya.

190. KETUA: SALDI ISRA [01:12:35]

Mendaftarkan Ujian Nasional itu kan harus mendaftar.

191. KETUA: SALDI ISRA [01:12:40]

Ya, betul.

192. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:41]

Nah, mendaftarnya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Pak.

193. KETUA: SALDI ISRA [01:12:44]

Oke.

194. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:45]

Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi akan menyampaikan ke (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [01:12:48]

Bukan. Saya agak lebih awal, Pak.

196. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:50]

Oh, ya?

197. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Siapa orang yang bisa mengikuti itu? Nah, ini. Bukan didaf ... telah terdaftar begini prosesnya, enggak?

198. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:12:57]

Oh, siswa Paket C, Pak?

199. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]

Ya, Paket C itu, kan orang yang sebetulnya di luar sekolah umum, ya?

200. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:02]

Ya, betul.

201. KETUA: SALDI ISRA [01:13:03]

Sebab, saya ini punya pengalaman juga. Ada adik saya sudah almarhum, itu jug ... punya Paket C, Pak. Jadi, dia ikut mendaftar lalu kemudian diterima oleh ... apa ... untuk ikut ujian lalu ditunjuk sekolah untuk menyelenggarakan ujian. Begitu, Pak?

202. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:19]

Ya. Jadi, siswa itu mendaftar melalui sekolahnya masing-masing, dalam hal ini PKBM.

203. KETUA: SALDI ISRA [01:13:25]

PKBM, ya?

204. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:26]

Ya.

205. KETUA: SALDI ISRA [01:13:26]

Kemudian ke dinas?

206. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:29]

Ke dinas.

207. KETUA: SALDI ISRA [01:13:30]

Dinas yang menentukan?

208. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:31]

Dinas yang menetapkan peserta yang akan mengikuti Ujian Nasional.

209. KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Oke. Setelah dia ikut ujian.

210. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:37]

Ya?

211. KETUA: SALDI ISRA [01:13:38]

Itu kemudian ijazahnya siapa yang mengeluarkan?

212. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:42]

Dinas Pendidikan.

213. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:43]

Dinas Pendidikan?

214. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:44]

Betul.

215. KETUA: SALDI ISRA [01:13:44]

Bukan sekolah, kan?

216. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:46]

Kalau untuk PKBM, Dinas Pendidikan sesuai dengan aturan.

217. KETUA: SALDI ISRA [01:13:48]

Dinas Pendidikan, ya, Pak? Klir, ya?

218. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:49]

Ya.

219. KETUA: SALDI ISRA [01:13:50]

Yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah PK ... apa ... dinas, Dinas Pendidikan?

220. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:13:55]

Dinas Pendidikan yang mengesahkan, mungkin yang menulis adalah sekolah mungkin.

221. KETUA: SALDI ISRA [01:13:59]

Bukan, satu-satu dulu, Pak.

222. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:00]

Oh, ya.

223. KETUA: SALDI ISRA [01:14:00]

Bapak jangan pakai ilmu mungkin-mungkin dengan kami.

224. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:03]

Oke, baik, ya.

225. KETUA: SALDI ISRA [01:14:04]

Secara hukum, siapa yang mengeluarkan ijazahnya?

226. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:07]

Dinas Pendidikan.

227. KETUA: SALDI ISRA [01:14:08]

Kalau orang mau klarifikasi soal keabsahan ijazah, perginya ke sekolah atau ke dinas?

228. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:14]

Kalau PKBM ini ke Dinas Pendidikan sesuai aturan.

229. KETUA: SALDI ISRA [01:14:16]

Ke Dinas Pendidikan, ya?

230. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:17]

Ya.

231. KETUA: SALDI ISRA [01:14:18]

Oke, itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak. Ini penting ditanyakan. Kalau orang mau ikut Paket C, apakah orang tersebut harus memiliki nilai rapor pernah sekolah sebelumnya di derajat yang sama? Misalnya, dia sekolahnya cuma 2 tahun, di SM ... 1 tahun di SMA, ada rapor kelas satunya. Perlu pakai nilai rapor atau tidak perlu?

232. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:42]

Mohon maaf, kalau hal tersebut kami kurang tahu, Pak. Karena memang bukan di bidang kami. Tetapi setahu saya sepanjang sekolah tersebut sudah mendaftarkan siswanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

233. KETUA: SALDI ISRA [01:14:55]

Ya.

234. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:14:55]

Itu bisa di ... didaftarkan menjadi peserta Ujian Nasional.

235. KETUA: SALDI ISRA [01:15:00]

Bisa didaftarkan jadi peserta Ujian Nasional?

236. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:15:02]

Ya. Karena kan (...)

237. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]

Jadi kalau ... kalau sekarang ada yang mempersoalkan, siapa yang berhak mengeluarkan klarifikasi soal ijazah itu?

238. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:15:11]

Dinas Pendidikan.

239. KETUA: SALDI ISRA [01:15:12]

Dinas Pendidikan?

240. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:15:13]

Ya.

241. KETUA: SALDI ISRA [01:15:13]

Pak Arsul? Silakan. Ada yang mau didalami?

242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:19]

Sedikit, Pak Haryo, ya.

Kan tadi kita singgung tentang ... apa ... ujian persamaan, gitu ya. Di luar yang mengikuti Paket C di PKBM, bisa enggak perorangan itu misalnya tadi menyambung yang ditanya oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, sudah sampai bahkan kelas 3 SMA. Pas waktu ujian sakit, gitu kan, ini berandai-andai sehingga enggak ikut ujian sehingga kan enggak punya kemudian ijazah karena enggak lulus. Bisa enggak orang yang keadaannya demikian, datang ke dinas, "Saya mau ikut ujian persamaan susulan atau apa itu sebagai pribadi." Gitu, bisa enggak?

243. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:04]

Ya. Baik.

244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:04]

Yang Bapak tahu?

245. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:05]

Jadi, biasanya kalau ada ujian itu, ada ujian utama dan ujian susulan.

246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:09]

Oke.

247. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:10]

Ujian susulan itu dimaksudkan untuk siswa yang berhalangan mengikuti ujian utama, salah satunya karena sakit.

248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:15]

i. Ya.

249. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:16]

Itu menjadi satu kesatuan. Tetapi pelaksanaannya sudah ditentukan oleh kementerian. Jadi, ujiannya tanggal sekian sampai sekian, jika berhalangan, maka susulannya tanggal sekian sampai sekian. Biasanya ada jeda waktu sekitar 1 minggu.

250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:30]

Oke.

251. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:30]

Untuk pelaksanaannya.

252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:30]

Kalau ini berkepanjangan, Pak, gitu lho. Sakitnya berkepanjanganlah.

253. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:34]

Ya.

254. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:34]

Katakanlah.

255. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:16:35]

Ya.

256. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:35]

Tidak memungkinkan ikut ujian. Let say 2 bulan, 3 bulan lah, enggak memungkinkan. Kemudian yang bersangkutan ini ... apa ... misalnya ada anak SMA yang keadaannya seperti tadi, dia sudah belajar terus, gitu misalnya. Apakah dia bisa enggak? Apakah harus nunggu nanti sekolah yang akan datang atau bisa enggak? Pertanyaan saya ini, dia datang ke dinas, "Pak, saya bukan siswa apa ... PKBM, kejar Paket C, tapi saya siswa SMA ini, ini, ini, saya mau ikut persamaan saja." Bisa enggak? Termungkinan seperti itu, keadaan itu?

257. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:11]

Kalau terkait dengan ... ya, saya sampaikan ini (...)

258. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:14]

Ya.

259. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:15]

Terkait dengan Ujian Nasionalnya, Pak.

260. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:17]

Oke.

261. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:17]

Kalau Ujian Nasional, tentu tidak bisa, Pak.

262. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:18]

Nah, dia bisa enggak, ikut ujian persamaan itu tadi?

263. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:21]

Ujian persamaan ini (...)

264. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:25]

Yang dalam rangka (...)

265. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:25]

Maksudnya kan ujian kesetaraan, ya?

266. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:25]

Ya, kesa ... kese ... kesetaraan itu, ya?

267. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:28]

Ya, kalau ujian karena sudah ditetapkan oleh kementerian, itu tidak ... tidak bisa jadwalnya. Jadi, jadwalnya hanya satu kali setahun.

268. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:36]

Ya, ya.

269. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:36]

He eh, ya.

270. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:36]

Katakanlah, dia ikut tahun depannya, gitu, bisa enggak?

271. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:39]

Berarti kemungkinan (...)

272. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:41]

Kesetaraan.

273. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:41]

Ya. Dia akan lulus di tahun (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:44]

Ya, ya.

275. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:41]

Kemungkinan.

276. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:44]

Tahunnya beda, enggak masalah.

277. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:46]

Ya.

278. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:46]

Tapi dia bisa enggak, tanpa ikut Paket Kejar C?

279. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:51]

He em.

280. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:46]

Itu di PKBM.

281. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:52]

Ya.

282. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:52]

Tapi dia memenuhi karena terhalang tadi sakit panjang.

283. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:17:55]

Ya.

284. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:55]

Katakanlah 6 bulan lah, misalnya berandai-andai sakitnya. Sehingga dia tahun depan ... tahun depan dia enggak ikut Ujian Nasional yang melalui di sekolahnya itu tadi.

285. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:18:03]

He em.

286. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:03]

Tapi dia ikut, memilih ikut ujian kesetaraan itu tadi. Bisa enggak sebagai perorangan begitu?

287. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:18:11]

Sebagai perorangan enggak bisa, Pak.

288. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:12]

Enggak bisa?

289. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:18:13]

Ya.

290. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:13]

Tetap harus melalui PKBM berarti?

291. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:18:15]

Ya, betul.

292. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:17]

Oke.

293. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:18:17]

Melalui PKBM.

294. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:17]

Ya, ya. Oke, ya.
Saya kira sih itu saja, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [01:18:25]

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

296. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:18:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Haryo, sedikit saja. Ini kan Bapak di ... di Pengembang Penilaian Pendidikan, ya, kan tentunya tahu persis mengenai bagaimana melindungi peserta didik itu dan hal-hal yang memang valid.

Nah saya ingin tanya, sejauh mana sebenarnya 1 dokumen, 1 ... 1 ... apa ... ijazahlah itu ya, atau satu hasil akhir dari sebuah ujian atau pendidikan kesetaraan apapun namanya itu. Yang memang dia itu menyatakan bahwa ini tidak valid. Apa item-item yang memang terlebih dahulu itu harus di-check list begitu? Kalau ini terdapat ... apa ... ada keraguan, oh ini enggak valid, oh ini ada yang ... ada yang mirip, ada yang sama, ini ada 2 double satu orang, bahkan ada yang dia punya, tapi pun ... tidak dapat gitu loh. Dia anggap tidak ada di dalam database. Apa yang menjadi ... yang menjadi indikator untuk me ... memastikan bahwa oh, ketemu ini dong yang valid, oh ini sehingga tidak menemui apa ... tidak panjang perdebatannya mengenai ijazah yang memang orangnya ada, tapi ijazahnya tidak ada, pendidikannya sudah selesai, ujiannya sudah selesai. Apa yang menjadi check list-nya, itu di situ?

297. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:19:44]

Yang menjadi check list adalah ketersediaan data di dinas.

298. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:48]

Ya.

299. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:19:48]

Jadi, kalau dalam hal ini kalau dalam pengecekan ini kan, tidak terdaftar di Ujian Nasional. Berarti secara sistem di data kami memang tidak ada identitas yang bersangkutan. Jadi, pengecekannya itu berdasarkan verifikasi oleh dinasnya.

300. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:04]

Tidak ada database lain yang menyimpan itu sebagai data yang untuk me ... me ... apa namanya ... dalam kondisi yang memang seperti tadi. Sulit, tapi orang penting betul ini, tapi ini memang tidak ada. Mungkin beda, pengertian tidak ada itu sama sekali tidak pernah ada gitu, bukan beda. Ada bisa ketelingsur atau bisa waktu di input oleh operator itu tidak ter-input data itu di dalam database yang dimiliki.

301. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:20:29]

Ya, kalau (...)

302. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:30]

Atau ada cara lain misalnya, "Oh, masih ada di sini tempatnya, ada ... apa namanya itu ... data kita yang tersimpan di tempat lain misalnya."

303. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:20:39]

Ya, kalau untuk 2016 biasanya ada di tiga pihak, Pak, dari sekolah, data tersebut ada di sekolah, kemudian ada di dinas pendidikan, dan juga di kementerian.

304. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:48]

Nah, itu (...)

305. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:20:48]

Ya.

306. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:20:49]

Berarti kan ada beberapa tempat bisa memastikan, "Oh, ini enggak ketemu ini, yang as ... yang betul-betul yang kita maksudkan

sesuai dengan pemilik yang sebenarnya itu, peserta didik yang sebenarnya sudah lulus itu, ini orangnya, ini ijazahnya.”

307. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:21:02]

Ya, paling dikit ada 3 tempat Pak.

308. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:05]

Ya.

309. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:21:06]

Sampai dengan tahun inipun bahwa siswa sudah terdata di database kementerian itu juga ada. Jadi Kementerian ada, Dinas Pendidikan ada, dan sekolahnya juga ada. Jadi, kalau mau memverifikasi sesuai untuk PKB, verifikasi dilakukan di dinas pendidikan, maka di dinas pendidikan pun datanya juga ada. Kalau untuk sekolah, biasanya verifikasi dilakukan di satuan pendidikannya, kalau mau naik yang lebih tinggi lagi juga sepr ... juga bisa seperti yang permintaan pengecekan data, dilakukan oleh kementerian pun juga bisa dilakukan, Pak.

310. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:21:40]

Ya, artinya memang ada apa ... ada yang spesial, memang yang khusus yang melakukan untuk memvalidasi itu. Bahwa ini kan tidak bisa dilakukan validasi itu oleh orang lain. Yang mengatakan, “Oh ini benar, ini sah, melalui mediasi.” Seperti itu misalnya.

Apa bagaimana? Ada enggak peristiwa yang seperti itu memang sering terjadi?

311. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:22:03]

Mungkin yang terda ... terdaftar mungkin ada, ya. Tetapi yang ke kami, ke pusat assessment itu, lebih banyak pada apakah peserta tersebut mengikuti ujian nasional atau tidak. Tidak ... kami tidak memverifikasi apakah ijazahnya itu palsu atau tidak, valid atau tidak atau sesuai format atau tidak. Jadi, hanya terbatas pada apakah siswa tersebut ikut UN atau tidak, atau ikut Ujian Nasional atau tidak.

312. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:34]

Ya.

313. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:22:34]

Itu, yang ada Tupoksi di kami, Pak.

314. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:37]

Oke, sedikit lagi berikutnya, ini kelengkapan untuk seseorang itu, ya, dinyatakan bahwa dia ikut peserta itu. Apakah ada syarat dokumen lain atau ikutannya lain? Hasil mereka itu, apakah ada penilaian-penilaian sebelumnya? Apakah ada tugas-tugas yang secara khusus itu mengikutinya itu, kemudian dia dimasukkan di dalam database, ada enggak?

315. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:22:56]

Untuk tahun 2015, sepertinya tidak ada, Pak. Jadi seperti (...)

316. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:59]

Memang ujian (...)

317. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:22:59]

Rapot (...)

318. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:23:00]

tok, ya?

319. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:23:01]

Ya, di kami hanya ujian saja. Di raport dan tugas-tugas lain itu biasanya ada di satuan pendidikan masing-masing.

320. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:23:09]

Baik, Terima kasih.
Kembali, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [01:23:12]

Pak, Apa ... saya mau tanya lagi nih. Pak Haryo, apa bedanya ijazah dengan STTB, Pak? Kalau saya dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88, itu masih menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Pak.

Nah, apa bedanya dengan ijazah itu, Pak?

322. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:23:36]

Sama saja, Pak.

323. KETUA: SALDI ISRA [01:23:37]

Sama, ya.

324. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:23:38]

Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah.

325. KETUA: SALDI ISRA [01:23:43]

Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah, Pak?

326. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:23:45]

Ijazah, biasanya ijazah.

327. KETUA: SALDI ISRA [01:23:49]

Saya minta, Bapak, ke depan sekarang, Pak.

328. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:23:50]

Ya.

329. KETUA: SALDI ISRA [01:23:59]

Kalau ada yang Kuasa Hukum mau kedepan, silakan!

Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, Pihak Terkait ini. PT-1 mana, Kuasa Hukum, satu lagi? Ini Pihak Terkait menyerahkan ini, ini dua-duanya, sama-sama pakai Label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Haryo, apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara me apa ... model ijazahnya yang diterbitkan?

330. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:34]

Ya, biasanya ditulis tangan.

331. KETUA: SALDI ISRA [01:24:36]

Tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Bapak.

332. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:39]

Betul, saat ini masih.

333. KETUA: SALDI ISRA [01:24:40]

Nah, begini ya.

334. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:42]

Ya.

335. KETUA: SALDI ISRA [01:24:42]

Di belakangnya ada nilai seperti ini?

336. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:45]

Ya.

337. KETUA: SALDI ISRA [01:24:45]

Lalu yang ini apa gunanya, Pak?

338. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:45]

Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ujian Nasional.

339. KETUA: SALDI ISRA [01:24:51]

Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ujian Nasional.

340. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:24:54]

Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan.

341. KETUA: SALDI ISRA [01:24:57]

Oke. Apa, Bapak bisa mengenal enggak model ini-nya memang sama semua?

342. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:02]

Sepertinya sama, Pak.

343. KETUA: SALDI ISRA [01:25:04]

Sepertinya sama.

344. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:05]

Ya (...)

345. KETUA: SALDI ISRA [01:25:06]

Kalau saya, kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya?

346. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:11]

Bisa. Dinas Pendidikan, bisa.

347. KETUA: SALDI ISRA [01:25:12]

Siapa, Pak? Langsung Dinas Pendidikan saja?

348. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:15]

Ya, Dinas Pendidikan (...)

349. KETUA: SALDI ISRA [01:25:18]

Oke.

350. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:19]

Yang membidangi ini.

351. KETUA: SALDI ISRA [01:25:20]

Dinas Pendidikan apa?

352. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARYO SUSETIYO [01:25:20]

Provinsi.

353. KETUA: SALDI ISRA [01:25:20]

Provinsi, ya? Oke.

Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu, silakan kembali ke tempat.

Jadi, kita sering ingatkan ini ... untuk apa ... untuk semua mau ... yang mau berkontestasi politik, sedikit apapun celah akan dipersoalkan orang. Percayalah itu, sedikit apapun. Saya sering menggunakan bahasa yang agak lucu. Salah senyum pun kita, itu bisa dibawa ke ... apa ... dipersoalkan secara hukum. Orang kumisnya miring pun bisa, apalagi soal-soal yang seperti ini. Bagi kami sangat rumit untuk membuktikannya, kebenarannya. Jadi, tadi pagi mirip ini juga, kita ... sudah apa ... bersikap akan ada sidang kedua. Kita belum tahu ini akan ada sidang kedua atau tidak. Tapi, kalau tidak ada lagi yang mau dialami ke Ahli, Pak Arsul cukup? Pak Ridwan cukup, ya? Para Ahli, cukup? Pak Haryo? Jadi, kami kalau mau minta validitas itu ke dinas ya, bukan ke sekolah. Oke, terima kasih.

Terima kasih Pak Haryo, Pak Charles Simabura. Keterangan Ahli dirasa cukup. Kami mau mendalami Saksi-Saksi fakta. Kalau Ahli mau mendengarkan silakan. Tapi, kalau tidak dipersilakan meninggalkan ruangan, karena Ahli ini banyak kesibukannya, Pak. Nah itu, disilakan sepanjang urusan-urusan lainnya sudah diselesaikan. Nah, itu menyangkut hubungan personallah di antara Para Pihak itu.

Dipersilakan, kalau mau didalam apa ... juga tidak apa-apa, kalau mau meninggalkan ruangan juga dipersilakan.

Kita mulai sekarang dari Saksi Pertama yang diajukan oleh Pemohon. Pak Junaidi[sic!].

354. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:17]

Siap, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [01:27:19]

Pak Junaidi[sic!], pekerjaan apa sekarang, Pak?

356. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:21]

Saya sebagai dosen.

357. KETUA: SALDI ISRA [01:27:24]

Dosen di mana, Pak?

358. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:26]

Di perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo.

359. KETUA: SALDI ISRA [01:27:32]

STI-STP ya, Pak ya? Palopo?

360. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:35]

Ya.

361. KETUA: SALDI ISRA [01:27:36]

Kenapa Bapak tertarik untuk soalan gini, Pak?

362. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:39]

Izin, Yang Mulia. Bahwa memang saya adalah pegiat pemilu.

363. KETUA: SALDI ISRA [01:27:46]

Ya.

364. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:46]

Saya adalah mantan penyelenggara. Saya itu mulai di tahun Pemilu 9 ... 1999.

365. KETUA: SALDI ISRA [01:27:56]

Pernah jadi anggota KPU juga, Bapak?

366. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:27:59]

Enggak pernah, Yang Mulia. Saya hanya anggota, pernah jadi ketua PPK.

367. KETUA: SALDI ISRA [01:28:06]

Oke.

368. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:06]

Dan juga panwas kecamatan.

369. KETUA: SALDI ISRA [01:28:10]

Itu paling lebih riil tahunya dibanding KPU, Pak. Semakin ke bawah semakin riil tahunya.

370. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:16]

Saya pernah mendaftar, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [01:28:17]

Oke, Bapak kan mendaftarkan pelanggaran ... apa ... mengajukan Permohonan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU, ya?

372. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:27]

Benar, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [01:28:27]

Ke DKPP. Apa yang Bapak ketahui tentang itu, Pak?

374. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:30]

Yang saya ketahui pada saat itu adalah bahwa ketika KPU di tanggal 14 melalui pengumuman. Bahwa ada salah satu calon yang tidak memenuhi sar ... syarat-syarat dan dalam hal ini kemudian memenuhi syarat.

375. KETUA: SALDI ISRA [01:28:49]

Oke.

376. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:50]

i. Ya.

377. KETUA: SALDI ISRA [01:28:50]

Jadi Bapak tahu ada yang TMS, tiba-tiba MS.

378. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:53]

i. Ya, betul, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]

Dari mana Bapak mengetahui bahwa itu TMS, Pak?

380. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:28:58]

Dari pengumuman, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [01:29:00]

Dari pengumuman?

382. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:01]

Ya, KPU.

383. KETUA: SALDI ISRA [01:29:01]

Pertanyaan saya, Pak. Bapak kenal dengan Pak Tasriel[sic!] ini? Yang ... apa namanya ... yang dipersoalkan ini, yang dianggap ijazahnya bermasalah itu, Pak ... apa? Pak Trisal. Kenal enggak?

384. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:14]

Saya tidak pernah ketemu, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [01:29:18]

Tidak pernah ketemu, ya?

386. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:18]

Ya.

387. KETUA: SALDI ISRA [01:29:19]

Oke. Lalu Bapak tidak pernah ketemu, lalu pernah diumumkan, ini bermasalah, tidak memenuhi syarat, tiba-tiba menjadi memenuhi syarat.

388. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:23]

Betul, Yang Mulia.

389. KETUA: SALDI ISRA [01:29:26]

Oke. Bapak kemarin ketika Pilkada 2024, Bapak ikut tim sukses enggak?

390. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:31]

Bukan, enggak pernah saya terlibat.

391. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]

Tidak pernah, ya?

392. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:33]

Ya.

393. KETUA: SALDI ISRA [01:29:33]

Tidak pernah ikut tim sukses, tapi Bapak laporkan. Ketika itu ada masalah, Bapak laporkan ke Bawaslu enggak di ... apa ... Polopo?

394. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:43]

Untuk ke Bawaslu, bukan saya, Yang Mulia, teman ... ada satu teman, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [01:29:47]

Ada yang lain melaporkan?

396. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:49]

Ya, melaporkan.

397. KETUA: SALDI ISRA [01:29:50]

Apa hasilnya di situ yang Bapak ketahui?

398. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:29:51]

Yang saya tahu itu, Yang Mulia. Bahwa di situlah ... di situlah laporan itu meneta ... menetapkan tersangka (...)

399. KETUA: SALDI ISRA [01:30:02]

Siapa yang melapor itu namanya, Pak? Nah, teman Bapak itu?

400. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:04]

Sulaiman Nus'an[sic!] Hasli.

401. KETUA: SALDI ISRA [01:30:06]

Sulaiman?

402. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:07]

Nus'an[sic!] Hasli.

403. KETUA: SALDI ISRA [01:30:07]

Nus'an.

Pak Bawaslu, betul ada Sulaiman Nus'an Hasli melapor ke Bawaslu?

404. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:16]

Benar, Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [01:30:17]

Kapan itu, Pak?

406. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:22]

Tanggal 24 September 2024, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [01:30:27]

24 September 2024. Ini setelah penetapan pasangan calon, ya?

408. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:29]

Benar.

409. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]

Penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024.

410. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:30:36]

Benar, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [01:30:37]

Oke, nanti saya lanjutkan, Pak.
Nah, setelah dilaporkan, apa yang dilakukan, Pak? Apa yang terjadi?

412. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:40]

Setelah saya ... yang mana, Yang Mulia (...)

413. KETUA: SALDI ISRA [01:30:43]

Pak Sulaiman kan melaporkan tadi ini?

414. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [01:30:45]

Nah, apa yang terjadi di situ?

416. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:46]

Nah, di tanggal 2 itu, di tanggal 2, Bawaslu Kota Palopo (...)

417. KETUA: SALDI ISRA [01:30:47]

2 ... 2 (...)

418. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:48]

2 September.

419. KETUA: SALDI ISRA [01:30:50]

2 September?

420. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:51]

Eh, 2 Oktober.

421. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

2 Oktober, Pak. Jadi setelah September, Oktober, Pak.

422. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:53]

Ya, tanggal 2 Oktober itu, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kota Palopo setelah menerima laporan itu dan menyerahkan kepada Gakkumdu.

423. KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]

Oke.

424. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:30:55]

Yang meningkatkan ke penyidik, ya. Kemudian, di tanggal 17 Oktober bahwa berdasarkan hasil penyidikan Sentra Gakkumdu bahwa atas nama Trisal Sail[sic!] ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilihan dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo atas ... yang pertama itu adalah Irwan ... Irwandi [sic!] Jumadi selaku ketua, kemudian atas nama Abbas, kemudian yang terakhir Saudara yang hadir di Saksi atas nama Muhatzhir Muhammad Hamid itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilihan.

425. KETUA: SALDI ISRA [01:31:57]

Termasuk yang ditetapkan itu Trisal?

426. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:31:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [01:31:59]

Tapi karena lewat waktu, akhirnya gugur, ya?

SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:32:00]

Ya, penyelidikan kemarin itu (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:32:03]

Bukan pertanyaan saya saja, Pak. Karena lewat waktu gugur, tidak ditindaklanjuti di Gakkumdu, ya, di polisi, ya?

428. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:32:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

429. KETUA: SALDI ISRA [01:32:10]

Polisi atau Gakkumdu?

KPU, di polisi atau Gakkumdu, KPU? Di kepolisian, ya.

Anda jangan jawab dulu! Anda mau jadi saksi, kan? Nah, Anda tidak boleh jawab, matikan miknya dulu. Ini pertanyaan ... apa ... pertanyaan ... dimatikan miknya, oke.

Jadi, Ibu, dari KPU, ya?

430. TERMOHON: UPI HASTATI [01:32:31]

Izin, Yang Mulia, karena teman-teman KPU Kabupaten Palopo, Kota Palopo, telah diberhentikan 3 orang (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [01:32:37]

Ibu dari KPU Provinsi?

432. TERMOHON: UPI HASTATI [01:32:38]

Saya dari KPU Provinsi.

433. KETUA: SALDI ISRA [01:32:40]

Benar enggak yang diterangkan oleh Pak ... apa tadi ... Pak Junaid tadi?

434. TERMOHON: UPI HASTATI [01:32:44]

Benar, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [01:32:45]

Oke, benar. Jadi, itu termasuk Trisal ditetapkan, tambah dengan 3 anggota KPU, ya? Ditetapkan sebagai tersangka, tapi karena lewat waktu kemudian itu menjadi daluwarsa. Betul, ya?

436. TERMOHON: UPI HASTATI [01:33:01]

Betul, Yang Mulia.

437. KETUA: SALDI ISRA [01:33:02]

Bawaslu, Betul begitu?

438. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [01:33:05]

Ya, benar, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [01:33:06]

Oke, silakan, Pak. Nanti kita pertemukan semuanya, Pak. Terus apa yang mau Bapak sampaikan lagi, Pak Junaid?

440. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:14]

Demi (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia, saya akan membacakan pokok-pokok (...)

441. KETUA: SALDI ISRA [01:33:18]

Eh, Bapak jawab saja pertanyaan saya, Pak. Kalau dibacakan itu susah.

442. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:21]

Ya, betul.

443. KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]

Karena ini kepentingan Hakim, Pak.

444. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:22]

Ya, betul, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [01:33:22]

Ya?

446. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:22]

Ya.

447. KETUA: SALDI ISRA [01:33:24]

Nah, ini sudah jalan terus, ini sudah dijadikan tersangka, tapi karena waktu lewat lalu kemudian tidak jalanlah pidananya begitu, ya?

448. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:32]

Betul, Yang Mulia.

449. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:32]

Lewat waktu, terus ke pemilihan, pemilihan selesai, sudah penetapan. Akhirnya Bapak melaporkan ke DKPP. Kapan Bapak laporkan ke DKPP, Pak?

450. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:42]

Saya melaporkan ke DKPP itu tanggal 30 September, Yang Mulia, 2024.

451. KETUA: SALDI ISRA [01:33:49]

2024?

452. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:49]

Ya.

453. KETUA: SALDI ISRA [01:33:50]

Jadi, ini 8 hari ... 8 hari setelah penetapan pasangan (...)

454. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:54]

Setelah penetapan, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [01:33:55]

Oke, hasilnya keluar kapan, Pak?

456. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:33:58]

Hasilnya kemarin, Pak, keluar di tanggal 24 Januari.

457. KETUA: SALDI ISRA [01:34:03]

24 Januari, ya, 2025. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan, Pak? Ada yang penting lagi yang mau disampaikan atau cukup?

458. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:34:17]

Yang saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa (...)

459. KETUA: SALDI ISRA [01:34:19]

Ya.

460. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:34:19]

Mengenai laporan saya kemarin tentang masalah penggunaan ijazah Paket C (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Ya.

462. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:34:25]

Yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh Trisal (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [01:34:30]

Itu kan sudah, sudah ada hukuman DKPP soal etik.

464. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:34:33]

Ya.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:34:33]

Nah, pertanyaan saya ke Bapak.

Ketika fase pengumuman, jadi ketika daftar ... orang baru mendaftar sebelum ditetapkan jadi daftar calon tetap, ya, Bu, ya? Begitu, ya? Kan diumumkan ini. Ini calon-calon sementara, kayak ... taruhlah daftar calon sementara. Di periode itu, Bapak sudah mengetahui enggak bahwa ada yang tidak memenuhi syarat itu? Ada calon yang tidak memenuhi syarat?

466. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:02]

Nanti, Yang Mulia, ketika diumumkan.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:35:06]

Oh, setelah diumumkan.

468. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:06]

Pengumuman, ya, di tanggal 14 September itu.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:35:09]

14 September, itu pengumuman?

470. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:11]

Ya, KPU mengumumkan untuk ... diumumkan dalam rangka untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:35:18]

Jadi, tanggal 14 September?

472. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:20]

Ya, betul, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:35:21]

Betul, Bu? Betul, ya?

474. TERMOHON: UPI HASTATI [01:35:23]

Betul, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:35:24]

Oke, setelah Bapak ketahui di situ, apa yang Bapak lakukan?

476. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:27]

Yang saya lakukan adalah menyusun karena saya sudah paham bahwa ini adalah ada beberapa informasi dan kemudian yang

berseliweran di media bahwa ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat itu adalah persoalan ijazah.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:35:47]

Oke.

478. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:47]

Sebagai syarat calon.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:35:49]

Namanya Trisal?

480. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:35:49]

Trisal, betul, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:35:50]

Oke. Jadi, kenapa Bapak tidak sampaikan di periode verifikasi itu ... klarifikasi itu, baru menyampaikannya pada tanggal 22 ... eh, 24?

482. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:04]

Waktu itu, Yang Mulia, saya belum ada bukti yang saya ketahui pada saat itu, nanti setelah ... setelah tanggal 2 ... tanggal 14 ... apa ... tanggal 22 (...)

483. KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]

24? 22?

484. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:22]

22, itu tetapkan, sudah ada bukti-bukti yang dinampakkan di media, Yang Mulia. Terutama masalah ijazah, kemudian daftar nama peserta ujian, dengan hasilnya bahwa tidak ada nama Trisal Tahir (...)

485. KETUA: SALDI ISRA [01:36:36]

Oke.

486. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:37]

Yang terdaftar.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:36:38]

Itu Bapak, dapat bukti-buktinya dari mana, Pak?

488. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:40]

Itu saya dari ... dapatkan di media, Pak.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:36:43]

Di media, ya?

490. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:44]

Ya, Yang Mulia, ya.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:36:44]

Oke Pak, kita berhenti di situ dulu, Pak.

492. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:36:50]

Ya.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:36:50]

Pemohon, ada yang mau ditambahkan atau cukup seperti yang saya tanyakan?

494. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:36:55]

Ada, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:36:56]

Silakan. Karena ini haknya Saudara, silakan.

496. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:36:56]

Berkaitan dengan apa yang terungkap di DKPP, Yang Mulia.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:36:57]

Oke, nan ... nanti DKPP, nanti. DKPP kita sudah ... apanya ... sudah punya (...)

498. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:03]

Putusan?

499. KETUA: SALDI ISRA [01:37:05]

Putusannya, nanti kita bisa baca itu. Tapi hal-hal apa lain, yang harus dialami?

500. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:10]

Siap, Yang Mulia.

Nah, tadi Saudara mengatakan ada pengumuman tanggal 13 atau 14 September 2024. Nah pertanyaan saya, apakah pengumuman itu adalah pengumuman yang dilakukan oleh KPU bahwa Saudara Trisal Tahir ini tidak memenuhi syarat?

501. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:37:24]

Benar.

502. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:25]

Nah, apakah pengumuman itu sebelum penetapan pasangan calon? Kan, tanggal 13. Penetapan pasangan calon, kan tanggal 22 atau 23. Kalau enggak salah.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:37:36]

- i. Ini Anda jangan kura-kura dalam perahulah, pura-pura tidak tahu, gitu.

504. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:42]

Siap, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:37:42]

Kalau tanggal 13, ya, menjelang penetapan pasangan calon, sudah pasti lah, itu.
Pertanyaan yang lain.

506. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:48]

1 lagi, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:37:48]

Ya.

508. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:48]

Mengenai fakta yang terungkap sedikit saja, Yang Mulia, yang di (...)

509. KETUA: SALDI ISRA [01:37:51]

Ya.

510. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:37:51]

DKPP. Nah, di DKPP kan, kalau dilihat di Putusan hadir, dari Suku Dinas, hadir dari pendidikan ... Kepala Dinas Pendidikan DKI, kemudian hadir dari Kementerian Pendidikan. Nah pertanyaan saya, apakah benar ketiga instansi itu menyatakan bahwa ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar, kemudian yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai peserta ujian di 3 instansi ini?

511. KETUA: SALDI ISRA [01:38:16]

- i. Kita bisa baca itu, enggak perlu Bapak jawab, Pak, ya. Kita bisa baca itu di Putusan.

512. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:38:21]

Siap, Yang Mulia, terima kasih, itu saja.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:38:22]

Cukup?

514. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:38:22]

Cukup, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:38:25]

Oke, sekarang Termohon. Ada yang mau ditanya ke Saksinya Pemohon. Silakan.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:28]

Siap, Yang Mulia.

Yang pertama, saya bertanya kepada Saksi. Apakah Saksi terdaftar atau bagian dari pemantau pemilihan di Kota Palopo?

517. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:38:39]

Tidak.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:41]

Tadi saya konfirmasi, izin, Yang Mulia.

Tadi Saksi nyatakan bahwa yang melaporkan itu temannya Saksi, ya? Bukan Saksi langsung, ya, melaporkan ke Bawaslu, ya?

519. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:38:52]

Ya, betul.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:55]

Temannya itu atas nama masyarakat atau atas nama lembaga, Saksi?

521. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:38:58]

Masyarakat.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:38:58]

Masyarakat.

Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Saksi. Bagaimana cara Saksi memperoleh dokumen-dokumen itu, apakah hanya lewat keterangan media atau memang Saksi mendapatkan secara resmi dokumen-dokumen yang Saksi permasalahan tersebut kepada KPU ... dari KPU?

523. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:39:21]

Jujur bahwa semua dokumen, yang (...)

524. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:26]

Karena ini dokumen calon, Saksi. Dokumen calon itu kan, yang ... yang pegang cuma KPU dan calon.

525. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:39:31]

Ya.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:39:31]

Jangan ditakut-takutin Saksi, Pak.

527. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:33]

Siap.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:39:34]

Bapak santai.

529. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:35]

Ya.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:39:35]

Kita mau mencari kebenaran ini, Pak.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:37]

Siap, Yang Mulia.

532. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:39:38]

Bukti (...)

533. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:38]

Kita bicara soal (...)

534. KETUA: SALDI ISRA [01:39:39]

Ya.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:39:40]

Perolehannya, Yang Mulia, ini sah atau tidak perolehannya, Yang Mulia.

536. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:39:43]

- i. Jadi bukti yang saya dapatkannya dalam hal ini adalah di media sosial dan media cetak. Saya ... saya sampaikan ketika saya sidang di DKPP dan itu juga pertanyaan kepada saya. Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke KPU dalam rangka untuk meminta dokumen karena bahwa ... semua data, bukti, itu di ... di media sudah berseliweran, ya.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:40:13]

Silakan, apa yang mau ditanyakan lagi?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:14]

Apakah Saksi tahu, apa yang menjadi kualifikasi sehingga seseorang dinyatakan TMS atau MS?

539. KETUA: SALDI ISRA [01:40:24]

Pak, itu pekerjaan KPU, Pak, jangan tanya ke Saksi.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:26]

Tidak, Yang Mulia. Pertanyaan ini (...)

541. KETUA: SALDI ISRA [01:40:26]

Saksi itu sudah mengatakan begini.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:28]

Ya.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:40:29]

Dia tahu dari pengumuman.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:31]

Ya. Karena Saksi sendiri yang menyatakan, Yang Mulia.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:40:34]

Ya.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:34]

Bahwa itu T ... TMS, makanya kami bertanya kepada Saksi.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:40:37]

Ya.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:37]

Berarti ada pengetahuan Saksi soal itu, Yang Mulia.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:40:40]

i. Oke.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:40:40]

Apakah Saksi ... saya cuma butuh ini saja, Yang Mulia, jawaban.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:40:43]

Bapak, tahu dari mana? Dari koran atau dari pengumuman?

552. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:40:47]

Dari pengumuman dan juga ada penyampaian dari Berita Acara KPU, itu.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:40:54]

Oke.

554. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:40:55]

Bahwa salah satu syarat yang tidak dipenuhi calon pada saat itu adalah ada dokumen wajib, yang dalam hal ini adalah ijazah.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:41:06]

Ya.

556. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:41:07]

Fotocopy ijazah, pendidikan terakhir ... tingkat pendidikan terakhir paling rendah SLTA dan/atau sederajat yang di legalisir, itu yang menjadi di TMS kan oleh KPU Kota Palopo.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:41:24]

Silakan. Bapak mau tanya apa lagi, Pak?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:41:26]

Cukup, cukup, cukup.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:41:27]

Cukup.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:41:27]

Siap.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:41:27]

Pihak Terkait? Kuasa Pihak Terkait apa yang mau ditanyakan, silakan.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:41:32]

Ya, sedikit, Majelis. Saksi ini mengetahui bahwa proses pidananya itu karena kedaluwarsa biasa itu dari mana?

563. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:41:44]

Dari (...)

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:41:44]

Proses pidananya, 3 anggota KPU dan 1 pihak atau Trisal Tahir itu dari mana?

565. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:41:52]

Saya ketahui itu dari teman, yang melaporkan.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:41:57]

Yang (...)

567. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:41:57]

Atas nama Sulaiman Nus'an Hasli [!sic].

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:41:59]

Mohon maaf saya mau konfirmasi, ini Sulaiman Nur Hasli [!sic] ini.

569. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:03]

Yang melak (...)

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:03]

Ini yang terdana kasus pemilu juga?

571. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:05]

Ya yang melaporkan. Yang melaporkan terhadap ... jadi inti laporannya itu adalah penggunaan ijazah palsu, ya.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:17]

Baik.

573. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:18]

Penggunaan ijazah palsu.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:42:18]

Pokoknya palsu atau tidak.

575. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:19]

i. Ya.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:42:20]

Kita nanti lah, Pak, urusan itu, Pak.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:21]

Ya.

578. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:21]

Ya. Itu yang dilaporkan.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:24]

Ya. Kalau soal daluarsa itu, seperti yang disebutkan Saksi tadi. Apakah Saksi ini pernah melihat penetapan SP3 dari kepolisian?

580. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:34]

Pernah.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:35]

Pernah?

582. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:36]

Ya.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:36]

Apakah di situ disebutkan bahwa alasan dihentikannya karena kadaluwarsa?

584. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:42:43]

Alasan dihentikannya daluwarsa adalah persoalan waktu dari Undang-Undang Pemilih itu.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:48]

Nah, tadi Saksi mengatakan bahwa pernah melihat penetapan penghentian penyidikan, ya? Pernah ndak melihat penetapan itu?

586. KETUA: SALDI ISRA [01:42:59]

Bapak pernah lihat atau tidak?

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:42:48]

SP3-nya pernah Bapak lihat?

588. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:03]

Kalau SP3, saya ndak pernah lihat.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:05]

Oh, ndak pernah lihat?

590. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:05]

Ya, ndak pernah.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:06]

Ya.

592. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:03]

Cuma tersangkanya saja yang saya lihat, cuma penetapan tersangkanya yang saya lihat.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:12]

Penetapan tersangkanya? Tapi (...)

594. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:13]

Ya. Dari 3 ... dari 4 itu, ada semua.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:16]

Dokumen penghentian penyidikannya, Bapak, ndak pernah lihat?

596. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:19]

Tidak pernah.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:20]

Tidak pernah lihat, ya?

598. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:20]

Ya.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [01:43:20]

Oh, ya.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:43:23]

Cukup?

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:24]

Kalau boleh, Majelis?

602. KETUA: SALDI ISRA [01:43:25]

Saya kasih lah Anda kesempatan daripada Anda marah ke saya.

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:28]

Siap, izin, Majelis.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:43:29]

Di ... di (...)

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:43:30]

Ya.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:30]

Atas keistimewaan nya. Saksi sederhana saja tadi saya penasaran, Saksi sudah tahu bahwa ada calon yang diumumkan oleh KPU pada pengumuman tanggal 13 itu.

608. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:41]

14.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:41]

Nah, saya penasaran pa ... pada periode itu kan ada tanggapan masyarakat yang dibuka.

610. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:43:45]

Betul.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:45]

Kenapa Saudara Saksi, itu tidak sampaikan tanggapan masyarakat kepada KPU? Itu 1.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:43:51]

Tadi sudah saya tanyakan, jangan ditanyakan lagi itu.

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:43:53]

Oh. Siap, Majelis.

Yang ... yang lebih sederhana lagi Saksi, apakah Saksi tahu bahwa terkait dengan proses pendaftaran ini, ada upaya sengketa administrasi yang diajukan oleh Bapak Trisal Tahir ke Bawaslu Kota Palopo? Tahu enggak, ada keadaan itu?

614. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:10]

Tahu.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:44:11]

Nah, Saudara Saksi tahu enggak, apa putusan Bawaslu Palopo terkait dengan perkara itu?

616. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:18]

Untuk putusan itu ada 5 poin yang diputuskan dalam musyawarah tertutup itu antara (...)

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:44:25]

Eh, sebentar. Tadi kan musyawarah tertutup.

618. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:27]

Ya.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:44:27]

Saudara tahu enggak putusannya? Tahu enggak, ada putusannya Bawaslu Kota Palopo?

620. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:35]

Tahu (...)

621. KETUA: SALDI ISRA [01:44:35]

Bapak tahu atau tidak? Kalau tahu bilang tahu, tidak bilang tidak (...)

622. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:36]

Saya tahu.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:44:37]

Nah, ya. Silakan, apa itu, Pak?

624. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:44:39]

Salah satunya itu adalah melakukan klarifikasi ... melakukan klarifikasi terhadap partai politik pengusung calon dengan sekolah ... dalam dengar ... yang harus diselesaikan dalam 1x24 jam. Begitu kan salah satunya.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:44:59]

Terima kasih. Saya mengagumi pengetahuan Saksi, tapi apakah Saudara Saksi tahu bahwa terhadap putusan Bawaslu itu telah dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo?

626. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:09]

Sesuai dengan yang kemarin, saya (...)

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:45:11]

Yang, Saudara Saksi ketahui (...)

628. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:12]

Yang kemarin terungkap itu bahwa itu dilaksanakan di kantor KPU kota Palopo pada saat itu.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:45:21]

Jadi, Saudara Saksi tahu bahwa atas Putusan Bawaslu Kota Palopo itu sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo?

630. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:27]

Ya, dilaksanakan di kantor KPU kota Palopo (...)

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:45:30]

Oke.

632. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:30]

Pada saat itu.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:45:31]

Yang, Saudara Saksi ketahui tentang pelaksanaan klarifikasi itu seperti apa?

634. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:35]

Yang pertama, sesuai dengan fakta persidangan di DKPP yang kemarin, ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:45:39]

Baik.

636. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:45:39]

Ketika Ketua KPU menyampaikan itu. Yang pertama bahwa untuk pasangan calon itu hadir langsung di KPU. Yang kedua dari partai

pengusung, itu ada yang melalui zoom dan ada yang langsung datang di kantor KPU. Yang ketiga, dari sekolah itu melalui zoom.

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:46:07]

Baik.

638. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:46:07]

Nah, saya ... tunggu sebentar.

Dari hasil itu bahwa ketika terjadi pihak partai politik ... ketika terjadi pertanyaan itu bahwa Hakim DKPP, Majelis Hakim mengatakan bahwa apakah ada bukti, misalnya dari partai politik?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:46:33]

Izin.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:46:34]

Biar dia jawab dulu, Pak.

641. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:46:35]

Tunggu dulu.

Apakah ada bukti yang diserahkan oleh partai politik pada saat itu ketika diadakan Zoom atau langsung? Yang kedua dengan juga dengan sekolah ketika Zoom, apakah mereka memperlihatkan bukti pada saat itu? Ya, ternyata bahwa itu tidak ada, ya. Terima kasih.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:46:59]

Terima kasih, Saksi.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:47:01]

Cukup?

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:02]

Terakhir, Majelis.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:47:03]

Ya, tadi katanya nambah, kok nambah lebih banyak dari makan awal?

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:06]

Siap, siap. Mudah-mudahan ini terakhir, Majelis.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:47:07]

Ya, silakan.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:09]

Baik. Saksi tadi ... tadi sudah menyebutkan tanggal-tanggal ... tanggal ... tadi dibantu oleh Kuasa Pemohon, tanggal 21 itu tanggal penetapan.

649. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:47:19]

Tanggal 22.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:20]

Tanggal 22, Terima kasih (...)

651. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:47:20]

Ya, Penetapan.

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:20]

Saksi klarifikasi.

Nah, mana lebih dahulu dilakukan, pelaksanaan putusan Bawaslu atau penetapan pasangan calon dalam pengetahuan saksi?

653. KETUA: SALDI ISRA [01:47:32]

Silakan jawab, Pak.

654. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:47:33]

Putusan Bawaslu.

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:34]

Putusan Bawaslu dulu dilaksanakan, setelah itu baru dilakukan penetapan pasangan calon?

656. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:47:36]

Penetapan. Ya.

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [01:47:38]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:47:39]

Oke, Terima kasih.

Santai, Pak. Nanti kan ... sudah, hal ini urusan dunia semuanya. Bisa kita selesaikan.

Yang Mulia Pak Arsul atau Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau didalami ke Saksi? Silakan.

659. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:57]

Pak Junaidi, ya.

660. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:47:58]

Siap, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:58]

Ya, baik. Ini sudah di sumpah tadi, ya, sebagai saksi.

662. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:00]

Ya, betul, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:01]

Sedikit saja saya mau bertanya, mengapa Bapak tidak menyampaikanlah ya, melaporkan bahwa hal yang tadi sudah Bapak terangkan tadi itu, jauh sebelumnya. Tapi ketika telah yang sebagaimana disampaikan oleh Pihak Terkait tadi? Mengapa tidak dari awal Bapak menyampaikan, wah Bapak menemukan ... apa ... dokumen itu atau berita itu, atau informasi itu? Apa sebabnya?

664. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:29]

Izin, Yang Mulia.

665. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:30]

Ya.

666. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:32]

Di tanggal 22, kan penetapan.

667. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:35]

Ya.

668. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:37]

Tanggal 22 penetapan calon. Kemudian itulah teman saya tadi, yang atas nama Nus'an.

669. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:43]

He em.

670. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:44]

Di tanggal 24.

671. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:46]

He em.

672. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:48:47]

September, dia melapor. 2 hari dari penetapan itu, karena ada aturan bahwa ketika lewat dari 3 hari, maka itu tidak bisa, maka pada saat itu dilaporkan. Jadi, sudah ada awal pelaporan dari teman saya.

673. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:01]

Oh, sebelumnya sudah ada awal itu?

674. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:03]

Setelah itu, di tanggal 30, ya berarti dari 22 ke 30 itu, itu hanya 7 hari, saya laporkan ke DKPP. Itu adalah alasan saya bahwa kenapa saya terlambat.

675. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:19]

Nah, kenapa alasannya?

676. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:03]

Ya?

677. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:05]

Apa alasannya terlambat itu atau memang kesengajaan, nanti saja lah tunggu di saat-saat yang sudah (...)

678. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:27]

Tidak. Kan ... tidak, Yang Mulia.

679. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:28]

Ya.

680. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:28]

Karena teman saya sudah melaporkan ke Bawaslu.

681. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:32]

Oh, oke.

682. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:33]

Mengenai persoalan itu juga. Sama dengan masalahnya, yaitu penggunaan ijazah tidak sah.

683. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:39]

Berbarengan, ya?

684. SAKSI DARI PEMOHON: JUNAID [01:49:40]

Ya, berbarengan itu.

685. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:41]

Oke. Baik, cukup. Terima kasih.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:49:45]

Oke, terima kasih. Nanti kita hapus saja syarat-syarat ijazah ini supaya kita jangan pusing.

Sekarang Saksi Termohon, Saudara Muhatzhir Muhammad Hamid.

687. KQUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [01:49:59]

Izin, Yang Mulia, ini yang tadi di awal kami sampaikan.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:50:03]

Sabar dulu, kita catat semuanya, ya.

Ahli ini sudah mulai bosan, kan? Katanya bukan, ini kasus-kasus konkret itu pusing. Makanya Ahli itu mainnya teori-teori yang kayak-kayak begini tidak tertarik kepada Ahli.

Keberatan Anda dicatat, ya. Soal itu, tapi untuk materiilnya kami tetap mau mendalami, ya. Bahwa ini orang yang sudah begini, sudah begini, dan segala macamnya. Kita catat. Tapi karena ini sudah dihadirkan dan sudah disumpah, kita akan tetap mendengarkan. Nanti soal ... terima kasih, Pak.

Silakan pertanyaan pertama. Panggilannya siapa ini, Pak Hamid?

689. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:50:49]

Izin, Pimpinan, Muhatzhir.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]

Pak Muhatzhir.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:50:53]

Enggak pimpinan, Pak. Ini Hakim, beda kalau dengan Anggota KPU yang lain, Pak, oke.

692. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:50:57]

Siap, Yang Mulia.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:50:58]

Bapak, Anggota KPU ya, yang sudah di-DKPP-kan itu? Terlepas tindak lanjutnya itu, itu urusan lainlah. Kita tidak akan menanyakan itu.

Kapan Bapak tahu ketika ada soal ijazahnya yang bermasalah salah satu, Pak, calon ini di KPU?

694. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:51:21]

Soal bermasalah ini yang harus ditafsirkan?

695. KETUA: SALDI ISRA [01:51:25]

Bukan. Jangan Anda tanya ... apa yang ... jangan Anda putar-putar!

696. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:51:31]

Kami (...)

697. KETUA: SALDI ISRA [01:51:31]

Kapan Saudara tahu bahwa ini ada masalah?

698. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:51:35]

Pada saat klarifikasi pertama tanggal 10 ... tanggal 10 September.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:51:45]

September.

Itu KPU tahu sendiri atau diinformasikan?

700. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:51:50]

Melalui proses klarifikasi ke Suku Dinas Jakarta Utara.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:51:45]

Oke. Nah, gini, Pak. Itu ... itu kalau Bapak sudah mengasih jalan untuk saya mengejar Bapak lebih jauh.

Apa gunanya Bapak klarifikasi kalau Bapak tidak tahu ada masalah duluan? Nah, ini pertanyaan saya makanya dari awal Pak, jangan melompat. Kapan Bapak tahu bahwa ada masalah? Kan baru diklarifikasi itu kan setelah ada masalah, kan?

702. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:52:19]

Ya, bisa saya jelaskan utuh Bu (...)

703. KETUA: SALDI ISRA [01:52:23]

Bukan pertanyaan saya aja Pak, ini Pak kepentingannya untuk kepentingan kami Hakim Pak, ya, untuk memutus Perkara ini.

Kapan Bapak tahu ada masalah ijazahnya apa itu ... kandidat itu?

704. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:52:39]

Pada saat tim klarifikasi pertama, waktu itu saya tidak hadir, Yang Mulia, menyampaikan hasil klarifikasinya.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:52:51]

Dari ... dari.

706. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:52:51]

Kan, sebelum tanggal 10 ada klarifikasi tanggal 4.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:52:55]

Klarifikasi tanggal 4 September?

708. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:52:56]

September, yang dilakukan (...)

709. KETUA: SALDI ISRA [01:52:57]

Itu kemana, Pak?

710. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:00]

Di Suku Dinas.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:53:01]

Suku Dinas DKI?

712. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:02]

DKI.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:53:04]

Jak ... Jakda ... Jakarta ... Jakarta Timur, ya?

714. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:07]

Jakarta Utara.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:53:09]

Oh, Jakarta Utara.

Oke, kenapa harus diklarifikasi ke situ, Pak?

716. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:15]

Ini yang saya tidak paham, Yang Mulia, karena jujur saya waktu itu ada di Batam

717. KETUA: SALDI ISRA [01:53:20]

Oke.

718. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:24]

Sekretariat, hanya sekretariat yang berangkat 3 orang dan juga didampingi oleh 3 sekretariat Bawaslu, tidak ada Komisioner di situ, Yang Mulia.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:53:32]

Oke, jadi ketika 4 September mencari informasi klarifikasi. Ada sekretariat yang berangkat 3 orang (...)

720. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:42]

3 orang, Yang Mulia.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:53:42]

Didampingi 3 orang?

722. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:43]

Sekretariat juga Bawaslu.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:53:45]

Sekretariat juga dibawa Bawaslu.

724. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:46]

Bawaslu.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:53:47]

Jangan-jangan nih sekretariatnya lebih kuat dibanding komisionernya sendiri.

Nah, Bapak tanya enggak apa dasarnya mereka berangkat, itu?

726. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:53:54]

Saya tahunya, Yang Mulia, pada saat ada video yang diposting oleh ketua saya di grup komisioner kami.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:54:06]

Ketua KPU?

728. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:06]

Karena sepengetahuan saya, Yang Mulia, saya ke Batam tidak ada masalah.

729. KETUA: SALDI ISRA [01:54:07]

Oke.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:54:07]

Tapi, tiba-tiba ketua KPU posting?

731. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:13]

Ya.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:54:15]

Posting di grup?

733. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:16]

Posting di grup.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:54:17]

Ada orang sekretariat di situ?

735. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:20]

Ada orang sekretariat yang kemudian di situ videonya adalah video atas nama Abdul Salam [!sic] yang terakhir-terakhir ternyata dia cuma staf di Suku Dinas.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:54:31]

Oke, jadi video yang atas nama Abdul Salam [!sic].

737. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:36]

Memberikan keterangan antara terkait ijazah ini.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:54:38]

Oke.

739. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:38]

Ketika teman-teman melakukan klarifikasi tanggal 4 itu di Suku Dinas.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:54:40]

Oke. Setelah dari Suku Dinas, kan balik nih orang ya, kan Pak, dari Suku Dinas kan balik ke Palopo?

741. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:53]

Balik ke Palopo, Yang Mulia.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:54:54]

Ada enggak laporan dari sekretariat ke komisioner?

743. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:54:59]

Nah, hasil ini kemudian kami minta mereka membuat Berita Acara klarifikasi.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:55:02]

Oke.

745. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:55:03]

Dari hasil itu kemudian, kami KPU Kota Palopo melakukan Pleno untuk menindaklanjuti klarifikasi ini. Maka di Pleno itu kami sepakati akan melakukan klarifikasi kembali ke Suku Dinas pada tanggal 10 dan 11 September.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:55:30]

Oke, direncanakan 10 dan 11 September akan klarifikasi lagi.

747. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:55:33]

Siap, Yang Mulia.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:55:34]

Jadi enggak berangkatnya?

749. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:55:35]

Jadi.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:55:36]

Siapa yang pergi, Pak?

751. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:55:37]

Yang berangkat, saya sendiri sebagai kordin teknis penyelenggaraan, Kemudian ketua saya atas nama Irwandi Jumadin, kemudian divisi Hukum dan Pengawasan Haris Zulfikar, didampingi oleh staf saya namanya Azhar Rusli. Kemudian atas dari Bawaslu Saya ingat ada Pak Widiyanto Hendra, Ada stafnya Namanya Mariani, ada staf-nya juga yang namanya Asigin [!sic].

752. KETUA: SALDI ISRA [01:56:06]

Oke, nantilah staf-staf itu terlalu banyak, Pak. Bapak pulang, Bapak pergi, pulang, lalu sampai di suku dinas, dapat keterangan bahwa ini tidak ada terdaftar, begitu?

753. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:56:17]

Kami mendapatkan waktu itu yang Surat 4753 kalau saya tidak salah yang ... Nomor 4753, isinya itu mengatakan bahwa suku dinas tidak pernah mengeluarkan surat sebelumnya.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:56:40]

Surat nomor berapa, Pak?

755. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:56:41]

Kalau saya tidak salah, Yang Mulia, 4793.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:56:49]

Bentar, biar saya cek, Pak.

757. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:56:50]

Yang ditangani oleh. Ibu Heni Handayani [!sic].

758. KETUA: SALDI ISRA [01:56:57]

Ada enggak? Itu dimasukkan, ada dimasukkan di bukti enggak? Termohon?

759. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [01:56:59]

Izin, Yang Mulia. Kami cek dulu.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:57:00]

Oke, sebentar. Ini ada 4739, berdasarkan surat keterangan nomor bla bla bla bla, Uswatun Husanah[sic!]. Bahwa nama peserta didik di bawah ini, Trisal Tahir bla bla bla, Program Paket C. Bahwa nama tersebut di atas adalah benar siswa PKBM uswa ... Uswatun Hasanah dan telah lulus tahun ajaran 2015/2016. Betul? Betul ini suratnya, Pak?

761. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:57:45]

Betul, Yang Mulia.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:57:45]

Nah, kalau ini kan klir ini. Lalu apa masalah? Apa hasilnya?

763. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:57:50]

Kemudian (...)

764. KETUA: SALDI ISRA [01:57:52]

Ya.

765. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:57:52]

Ada surat yang kedua juga, Yang Mulia, dari suku dinas, itu (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [01:57:56]

Nomor?

767. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:57:57]

Nomor, yang (...)

768. KETUA: SALDI ISRA [01:58:06]

5428?

769. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:58:10]

Ya.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:58:10]

Betul?

771. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:58:13]

Yang berisi keterangan terkait dengan penulisan ijazah, apa semua pimpinan ... Yang Mulia, surat (...)

772. KETUA: SALDI ISRA [01:58:21]

Yang mana itu?

Oke, ini surat lima ri ... 5200, Jakarta Utara, betul? Yang soal bentuk tulisan ijazah, format tulisan?

773. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:58:38]

Siap, Yang Mulia, ya.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:58:39]

Oke. Ini suratnya tanggal 10 September.

775. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:58:43]

10 September.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Surat yang pertama tadi.

777. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:58:51]

Jadi, hasil klarifikasinya 2 surat itu, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:58:52]

Ini tanggalnya tanggal 14 Agustus lho, Pak, yang tadi.

Oke. Jadi ini banyak sekali surat, Pak, surat tanggal 14 Agustus, itu yang tadi yang saya bacakan. Katanya Bapak ke sana tanggal 10 dan 11, ini suratnya tanggal 14 Agustus 2024, Pak, yang mengatakan benar tadi itu. Baru kemudian muncul lagi surat menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat itu, surat bertanggal 14 Agustus itu.

779. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:59:53]

Siap.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:59:53]

Ya, kan?

781. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [01:59:53]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:59:54]

Nah, baru kemudian yang September. Nah, Bapak maksud surat yang mana tadi? Kalau yang tanggal 14 Agustus tuh klir benar bahwa (...)

782. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:06]

Ini Surat Nomor 5200, Pimpinan tertanggal 10 September.

783. KETUA: SALDI ISRA [02:00:12]

5200 tadi, ya?

784. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:14]

Ya. Dan Surat 4793.

785. KETUA: SALDI ISRA [02:00:27]

Oke. Kita saja pusing lihat surat-surat ini banyak. Sabar, Pak. Ini 5200. Nah, Bapak pertemuan setelah surat 5200 ini, pembahasan di KPU?

786. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:44]

Ini yang menjadi bahan kami dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan.

787. KETUA: SALDI ISRA [02:00:48]

Karena ada perbedaan antara surat Agustus dengan September?

788. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:53]

Siap, Yang Mulia.

789. KETUA: SALDI ISRA [02:00:53]

Kemudian dilaksanakan?

790. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:54]

Rapat Pleno.

791. KETUA: SALDI ISRA [02:00:56]

Rapat. Oke. Apa hasil ra ... Rapat Plenonya, Pak?

792. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:00:58]

Tidak memenuhi syarat.

793. KETUA: SALDI ISRA [02:00:59]

Oke, tidak memenuhi syarat?

794. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:02]

Siap, Yang Mulia.

795. KETUA: SALDI ISRA [02:01:02]

Nah, coba Bapak ceritakan. Apa dan bagaimana dari TMS itu menjadi MS? Nah, gitu.

796. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:11]

Saya ... sebelum ... saya sedikit singgung sedikit, Yang Mulia.

797. KETUA: SALDI ISRA [02:01:14]

Ya.

798. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:14]

Ini yang untuk menjadi pemahaman bagi teman Saksi di depan (...)

799. KETUA: SALDI ISRA [02:01:16]

Bukan, Pak. Bapak enggak perlu kasih tahu itu (...)

800. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:18]

Bahwa (...)

801. KETUA: SALDI ISRA [02:01:18]

Begini, Pak. Dengar, ya. Sekarang ini semua keterangan itu pentingnya untuk Hakim, Pak.

802. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:24]

Ya, ya.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:01:24]

Bapak (...)

804. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:25]

Siap, Yang Mulia.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:01:25]

Mau berbeda dan segala macam, enggak karena Hakim yang harus diberikan pemahaman utuh agar tidak salah memutus.

806. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:33]

Siap, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:01:33]

Bapak setuju atau tidak dengan yang lain tuh, abaikan saja, Pak.

808. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:36]

Siap, Yang Mulia.

809. KETUA: SALDI ISRA [02:01:36]

Silakan.

810. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:39]

Saya pengantar sedikit, Yang Mulia. Bahwa kenapa kemudian status calon menjadi TMS.

811. KETUA: SALDI ISRA [02:01:44]

Ya.

812. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:01:44]

Karena di dalam ... ker ... di dalam aplikasi Silon, itu kan jelas di situ 12 komponen yang menjadi syarat calon, salah satunya adalah ijazah. Ketika salah satu dari komponen syarat calon ini belum benar.

813. KETUA: SALDI ISRA [02:02:00]

Ya.

814. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:00]

Maka otomatis status calon pasti (...)

815. KETUA: SALDI ISRA [02:02:03]

MS?

816. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:05]

Tidak memenuhi syarat.

817. KETUA: SALDI ISRA [02:02:05]

Oke. Itu klir.

818. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:06]

Nah (...)

819. KETUA: SALDI ISRA [02:02:06]

Kita catat, Pak.

820. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:08]

Oke.

821. KETUA: SALDI ISRA [02:02:08]

Pertanyaan saya tadi, apa, bagaimana, atau mengapa dari TMS menjadi MS?

822. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:14]

Siap, Yang Mulia.

823. KETUA: SALDI ISRA [02:02:16]

Ya.

824. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:16]

Kami penetapan tanggal 13, pengumuman tanggal 14 September.

825. KETUA: SALDI ISRA [02:02:20]

Ya.

826. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:20]

Setelah itu tanggal 16.

827. KETUA: SALDI ISRA [02:02:22]

Ya.

828. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:23]

Ada tanggapan masyarakat.

829. KETUA: SALDI ISRA [02:02:26]

Ya.

830. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:26]

Kemudian (...)

831. KETUA: SALDI ISRA [02:02:27]

Siapa masyarakat yang kasih tanggapan, Pak?

832. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:29]

Saya ... tapi ada tanggapan yang masuk ke kami, KPU, Yang Mulia.

833. KETUA: SALDI ISRA [02:02:34]

Ya.

834. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:34]

Sehingga respons kami sebagai KPU adalah melakukan konsultasi berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan sampai kepada KPU RI.

835. KETUA: SALDI ISRA [02:02:47]

Ya.

836. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:02:47]

Nah di samping itu, ternyata calon ini juga mengajukan sengketa ke Bawaslu.

837. KETUA: SALDI ISRA [02:02:56]

Satu-satu dulu, Pak. Oke.
Bapak tadi mengatakan konsultasi berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, ya?

838. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:03]

Sulawesi Selatan sampai KPU RI.

839. KETUA: SALDI ISRA [02:03:04]

KPU RI.
Apa hasil di KPU Sulawesi Selatan, apa hasil di KPU RI?

840. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:10]

Hasil konsultasi kami di KPU RI, kami mendapatkan (...)

841. KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

Sulawesi Selatan dulu, Pak.

842. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:15]

Arahannya KPU Provinsi adalah mengarahkan kami untuk melanjutkan konsultasi ke KPU RI.

843. KETUA: SALDI ISRA [02:03:21]

Nah, itu hasilnya.

844. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:22]

Ya. Dan (...)

845. KETUA: SALDI ISRA [02:03:22]

Oke, kalau begitu KPU RI apa hasilnya?

846. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:26]

Dari konsultasi kami di KPU RI, itu keluar Surat Dinas 2070.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:03:34]

Surat dinas dari?

848. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:34]

KPU RI.

849. KETUA: SALDI ISRA [02:03:36]

Oke.

850. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:36]

2070.

851. KETUA: SALDI ISRA [02:03:38]

Apa itu isinya, Pak?

852. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:03:41]

Yang dimana kal ... isinya adalah bila yang perihalnya ijazah calon (...)

853. KETUA: SALDI ISRA [02:03:52]

Ibu, itu dijadikan bukti, ya? Dari Termohon, ya? Bukti berapa?

854. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:03:41]

Bukti, Yang Mulia, T-7, Yang Mulia.

855. KETUA: SALDI ISRA [02:03:57]

T-7.

- i. Coba Bapak ceritakan, Pak. Apa Pak?

856. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:00]

Nah, setelah kami ... apa ... konsultasi, keluar Surat Dinas 2070 ini. Kemudian pada tanggal 19, kami juga mendapatkan undangan dari Bawaslu untuk menghadiri Sidang Mediasi di Bawaslu.

857. KETUA: SALDI ISRA [02:04:20]

Satu-satu dulu, Pak.

858. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:24]

Ya.

859. KETUA: SALDI ISRA [02:04:24]

Jadi, ini kita satu kotak-satu kotak. Bapak menerima Surat 2070?

860. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:27]

Siap.

861. KETUA: SALDI ISRA [02:04:27]

Ini saya belum baca ini, Pak.

862. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:28]

Siap.

863. KETUA: SALDI ISRA [02:04:28]

Apa ini isinya, Pak? Bapak bacakan. Bapak ingat kan, Bapak memutuskan, pasti Bapak sudah baca ini.

864. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:34]

Ini perihal status calon.

865. KETUA: SALDI ISRA [02:04:37]

Ya.

866. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:37]

Tidak memenuhi syarat karena ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar.

867. KETUA: SALDI ISRA [02:04:44]

Oke. Jadi, itu mengatakan bahwa calon yang Bapak persoalkan itu tidak memenuhi syarat?

868. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:04:50]

Ya. Di sini arahan KPU RI bila terjadi kasus seperti ini, maka KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi kembali ke sekolah.

869. KETUA: SALDI ISRA [02:05:05]

Oke. Bapak klarifikasi ke sekolah?

870. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:08]

Belum, pim (...)

871. KETUA: SALDI ISRA [02:05:10]

Oke.

872. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:10]

Yang Mulia.

873. KETUA: SALDI ISRA [02:05:10]

Oke. Itu perintahnya.

874. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:13]

Ya.

875. KETUA: SALDI ISRA [02:05:13]

Lalu setelah itu, ketemu dengan Bawaslu?

876. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:14]

Ket ... ini menjadi bahan kami pada saat sidang mediasi di Bawaslu.

877. KETUA: SALDI ISRA [02:05:20]

Oke. Jadi, tanggal berapa itu sidang mediasinya, Pak?

878. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:23]

Tanggal 2 ... 19 dan tanggal 20, 2 hari, Yang Mulia.

879. KETUA: SALDI ISRA [02:05:29]

19 dan 20 September? Itu KPU dengan Bawaslu, ya? Betul? Tanggal berapa, Pak?

880. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:42]

20, 21, Yang Mulia.

881. KETUA: SALDI ISRA [02:05:44]

Eh, beda-beda tipislah itu, Pak.

882. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:46]

Ya.

883. KETUA: SALDI ISRA [02:05:46]

Oke.

884. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:48]

Ya.

885. KETUA: SALDI ISRA [02:05:48]

20. Setelah dimediasi, apa yang terjadi dalam proses mediasi itu?

886. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:05:55]

Ada kesepakatan, Yang Mulia. Menja ... itu ... itu ... dituangkan dalam putusan Bawaslu.

887. KETUA: SALDI ISRA [02:06:01]

Putusan Bawaslu yang?

888. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:06:03]

Yang salah satunya poinnya adalah memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan klarifikasi kembali kepada partai politik, gabungan partai politik, calon yang bersangkutan, dan sekolah.

889. KETUA: SALDI ISRA [02:06:16]

Dan sekolah, ya? Oke.

Jadi, hasil mediasi di suruh KPU mengklarifikasi, ke partai politik atau gabungan partai politik, kemudian ke calon dan ke sekolah?

890. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:06:28]

Ke sekolah, Yang Mulia.

891. KETUA: SALDI ISRA [02:06:28]

Oke. Bapak lakukan itu?

892. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:06:31]

KPU tindak lanjuti putusan tersebut, Yang Mulia.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:06:35]

Oke, dijalankan.

Apa hasilnya? Memenuhi syarat?

894. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:06:39]

Hasilnya adalah berdasarkan klarifikasi ke sekolah yang kami lakukan ke ... kepada kepala sekolah atas nama Bonar Jhonson,

mengakui bahwa Trisal Tahir benar pernah bersekolah, tamat di PKBM Yusha dan dia adalah murid di PKBM Yusha.

895. KETUA: SALDI ISRA [02:06:58]

Oke. Bapak tanya enggak, dia Paket C, Paket C-nya, itu?

896. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:05]

Waktu itu yang mengklarifikasi kami 3 orang, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:07:09]

Ya. Bapak nanya enggak ke sekolahnya? Nanti saya akan tanya Beliau itu. Bapak tanya enggak ke sekolahnya, ini orang Paket C, ada enggak Bapak tanya, itu?

898. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:17]

Kalau dari saya pribadi, ndak ada, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [02:07:20]

Siapa yang menanya, di antara yang bertiga?

900. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:23]

Kalau saya tidak salah, Pak Abbas.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:07:26]

Nah, berarti kan KPU tahu bahwa ini kandidat bukan tamat dengan jalur ijazah biasa.

902. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:33]

Benar, Yang Mulia.

903. KETUA: SALDI ISRA [02:07:33]

Tapi tamat dengan jalur ijazah Paket C?

904. KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

Benar, Yang Mulia.

905. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:37]

Dan itu ditanya di sekolah?

906. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:39]

Siap, Yang Mulia.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:07:39]

Jawaban sekolah?

908. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:39]

Benar, Yang Mulia.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:07:42]

Benar bahwa?

910. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:43]

Ijazah Paket C, Yang Mulia.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:07:45]

Ijazah Paket C. Katanya dikeluarkan sekolah atau dikeluarkan dinas?

912. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:49]

Di ... dikeluarkan oleh sekolah.

913. KETUA: SALDI ISRA [02:07:54]

Dikeluarkan oleh sekolah, oke.
Cukup, Pak?

914. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:07:56]

Siap.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:07:56]

Bapak mau tanya, silakan. Jangan lama-lama, Pak ini enggak selesai nanti nih.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:08:01]

Siap, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:08:01]

Soal ijazah aja bisa berjam-jam kita menyelesaikan.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:08:04]

Sedikit, sedikit saja, Yang Mulia.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:08:05]

Ya.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:08:05]

Tambahan pertanyaan dari kami kepada Saksi.

Yang pertama, pada saat pelaksanaan tahapan klarifikasi tersebut, terdapat surat atau ijazah atas nama Trisal Tahir. Apakah keterangan atau surat tersebut langsung menyatakan apa ... pernyataan dari surat tersebut menyatakan tidak terdaftar atau tidak benar?

921. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:08:26]

Yang dari Suku Dinas menyatakan *tidak terdaftar*.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:08:29]

Tidak terdaftar, itu satu.

Yang kedua, nah kami tanyakan kepada Saksi, tadi sempat dilakukan proses sengketa pada Bawaslu Kota Palopo. Nah, kemudian dari hasil sengketa itu keluarlah putusan. Putusan 001 yang kemudian mengharuskan saksi, dalam hal ini waktu itu masih menjabat sebagai komisioner untuk melaksanakan putusan dan klarifikasi.

Nah, pada saat klarifikasi tersebut selain daripada komisioner, adakah pihak lain yang juga turut hadir dalam klarifikasi tersebut?

923. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:09:07]

Turut dihadiri oleh Bawaslu Kota Palopo.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:09]

Bawaslu juga hadir dalam proses.

925. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:09:11]

Dan bahkan Bawaslu pun ikut bertanya.

926. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:12]

Ikut bertanya juga dalam proses klarifikasi tersebut.

927. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:09:15]

Ya.

928. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:15]

Artinya, Bawaslu juga tau bahwa klarifikasi sudah dilakukan.

929. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:09:20]

Siap, Bawaslu tau.

930. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:21]

Nah, kemudian yang jadi soal di sini, Yang Mulia. Karena Bawaslu juga tau dan turut melakukan klarifikasi untuk menjalankan Putusan 001. Tapi, setelah lewatnya tahapan pencalonan kemudian Bawaslu menjadikan hal tersebut temuan dan mengeluarkan rekomendasi (...)

931. KETUA: SALDI ISRA [02:09:41]

001 itu Anda jadikan bukti, enggak?

932. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:43]

Siap, Yang Mulia.

933. KETUA: SALDI ISRA [02:09:43]

Bukti berapa?

934. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:09:44]

001 kami jadikan bukti T ... Izin, Yang Mulia.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:09:51]

Ya.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:00]

T-2, Yang Mulia.

937. KETUA: SALDI ISRA [02:10:01]

T-2.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:01]

Siap.

939. KETUA: SALDI ISRA [02:10:01]

Oke. Ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo?

940. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:06]

Siap, Yang Mulia.

941. KETUA: SALDI ISRA [02:10:06]

Terus, apa lagi?

942. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:08]

Nah, kan (...)

943. KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Sudah, itu sudah, pokoknya Bawaslu sudah terlibat dari situ.
Apa yang lain lagi?

944. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:11]

Siap, Yang Mulia.

945. KETUA: SALDI ISRA [02:10:12]

Pindahkan pertanyaannya.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:14]

Kemudian, kami ingin tanyakan kepada Saksi.

Nah, apakah pada saat Saksi melakukan konsultasi berjenjang, Saksi mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan Pasal 113 bahwa untuk melakukan klarifikasi itu bukan hanya kepada sekolah atau dinas, ada kewajiban Saksi untuk melaksanakan klarifikasi pada Partai Politik (...)

947. KETUA: SALDI ISRA [02:10:36]

Itu sudah tadi. Sudah Pertanyaan (...)

948. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:39]

Itu dilaksanakan juga? Belum ketahuan tadi, Yang Mulia. Apakah itu dilaksanakan?

949. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:10:42]

Siap, Yang Mulia.

950. KETUA: SALDI ISRA [02:10:43]

Ya.

951. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:43]

Berarti telah memenuhi sebagaimana-mana pasal ... Surat Dinas 2070 sudah dilaksanakan?

952. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:10:50]

Siap.

953. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:10:51]

Nah, apakah pada saat melakukan Pleno dan sebelum mengambil keputusan, apakah Saudara Saksi melibatkan atau meminta pendapat Ahli?

954. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:02]

Pada saat menindaklanjuti rekomendasi, kami meminta 4 pendapat Ahli.

955. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:11:06]

Siapa saja yang Saudara Saksi ketahui?

956. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:08]

Yang pertama, Prof. Aswanto.

957. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:11:10]

Siapa lagi?

958. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:11]

Kemudian, Prof. Muhammad.

959. KETUA: SALDI ISRA [02:11:13]

Ya.

960. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:14]

Muhammad, mantan ketua DKPP.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:11:15]

Pokoknya, yang prof-prof saja semuanya.

962. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:16]

Kemudian, Prof. Anwar Borahima.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:11:19]

Ya.

964. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:20]

Dan, La Ode Arumahi.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:11:23]

Oke.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:11:24]

Nah, dari 4 pendapat Ahli tersebut yang menjadi salah das ... yang menjadi salah satu dasar Saksi untuk mengeluarkan rekomendasi menjadi ... tidak menindaklanjuti atau menindaklanjuti rekomendasi itu.

Apa yang menj ... apa yang Saudara Saksi ketahui di situ dari poin pernyataan atau keterangan atau pendapat Ahli?

967. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:11:42]

Pada intinya, pendapat Ahli mengarah kepada PKPU 8, itu Pasal 133, dalam hal terdapat temuan atau apa ... aduan terhadap kebenaran ijazah pasangan calon pascapenetapan calon, maka KPU meneruskan ke instansi yang berwenang.

968. KETUA: SALDI ISRA [02:12:07]

Oke.

969. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:12:07]

Apakah KPU meneruskan hal tersebut?

970. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:12:11]

Kami teruskan ke Kepolisian Resor Kota Palopo.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:12:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

972. KETUA: SALDI ISRA [02:12:17]

Cukup, Terima kasih.

Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan ke Saksinya atau cukup?

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:12:26]

Saya hanya sedikit, Majelis, klarifikasi saja kepada Saksi tadi.

974. KETUA: SALDI ISRA [02:12:31]

Ya.

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:12:32]

Soal bahasa surat, tadi Saudara Saksi menyebut, mana yang betul? Tidak ... tadi ... Kuasa Pemohon tadi ... Termohon tadi menyampaikan pertanyaan ke Saudara, tidak benar, tidak terdaftar, atau tidak ditemukan datanya pada arsip digital? Ini soal konkretnya bahasa surat.

976. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:12:52]

Kalau di surat itu tidak terdaftar.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:12:54]

Di surat tanggal berapa ini? Tanggal 10 September?

978. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:12:56]

Yang di tanggal 10 September, dari suku dinas.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:12:59]

Oke. Tidak terdaftar. Kalau surat tanggal 18 sebut ... 18 September itu sebutannya apa?

980. KETUA: SALDI ISRA [02:13:09]

Kalau sudah ada, disebut saja ke kami biar kami yang mengecek.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:11]

Ya. Kami ... siap, Majelis.

982. KETUA: SALDI ISRA [02:13:13]

Ya. Jangan dipaksa juga dia cari-cari, itu sudah pusing dia, Pak.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:17]

Baik, Majelis.

984. KETUA: SALDI ISRA [02:13:18]

Kalau tanggal 18 itu apa bunyinya?

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:19]

Tidak terdaftar.

986. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:13:19]

Tidak terdaftar.

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI D [02:13:20]

Tidak terdaftar.

988. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:13:21]

Tidak terdaftar.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:13:19]

Oke.

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:21]

Baik. Saya mau langsung ke klarifikasi yang Saudara dan Tim KPU lakukan atas tindak lanjut keputusan Bawaslu. Konkret ke sekolah tadi, apa hasilnya klarifikasi kepada sekolah?

991. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:13:33]

Intinya Pihak Kepala Sekolah mengakui Saudara Trisal Tahir sebagai siswa tamat di PKBM Yusha 2016.

992. KETUA: SALDI ISRA [02:13:34]

2016.

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:47]

Itu kepala sekolah yang sampaikan sebetulnya langsung?

994. SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:13:49]

Kepala sekolahnya langsung.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [02:13:51]

Baik, terima kasih.
Cukup, Yang Mulia.

996. KETUA: SALDI ISRA [02:13:54]

Terima kasih. Pemohon silakan, satu/dua pertanyaan.

997. KUUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI [02:13:56]

Ada beberapa pertanyaan, Yang Mulia.

998. KETUA: SALDI ISRA [02:13:58]

Ya, 3 lah, jangan lebih dari 3 ya.

999. KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:01]

Tadi ada surat yang disampaikan Agustus, 4739. Itu diserahkan oleh Pihak Terkait, ya? 4739, tadi yang mengatakan suku dinas benar terdaftar ijazah Pihak Terkait. Yang tadi 4739 yang disampaikan oleh, Yang Mulia, Agustus.

1000.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:20]

Itu masuk lewat aplikasi Silon.

1001.KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:22]

Nah, Pertanyaan saya, apakah surat itu dibantah oleh suku dinas melalui Surat 5215 bahwa dia tidak pernah mengeluarkan surat itu?

1002.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:31]

Benar.

1003.KUUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:31]

Benar, ya?

1004.KETUA: SALDI ISRA [02:14:32]

Jangan bersemangat, tenang.

1005.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:33]

Ya.

1006.KETUA: SALDI ISRA [02:14:33]

Yang paling penting substansinya.

1007.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:36]

Siap.

1008.KETUA: SALDI ISRA [02:14:36]

Tenang saja, diturunkan.

1009.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:37]

Intinya, pemahaman kami, Yang Mulia.

1010.KETUA: SALDI ISRA [02:14:39]

Ya.

1011.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:39]

Suku dinas mengatakan bahwa surat itu bukan suratnya.

1012.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:44]

Bukan suratnya, ya?

1013.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:46]

Ya.

1014.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:46]

Jadi, apakah dokumen yang tadi 4739 itu diserahkan oleh Pihak Terkait masuk ke Silon?

1015.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:14:50]

Masuk ke Silon.

1016.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:14:51]

Berarti ada satu lagi surat yang tidak diakui oleh suku dinas ya, selain ijazah tadi melalui klarifikasi Saudara.

Nah kemudian, tadi Saudara mengatakan bahwa Putusan Bawaslu itu memerintahkan ... tapi ini kan kesepakatan Saudara ya, Saudara yang membuat kesepakatan dengan Pihak Terkait. Kemudian dituangkan dalam bentuk Putusan Bawaslu. Benar seperti itu?

1017.KETUA: SALDI ISRA [02:15:12]

Nanti, itu biar saya tanya ke Bawaslu nanti.

1018.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:15]

Baik. Nah pertanyaan saya, Saudara tadi mengatakan bahwa Putusan Bawaslu itu memerintahkan untuk klarifikasi ke kepala sekolah atau sekolah. Apakah bahasanya seperti itu atau instansi yang berwenang?

1019.KETUA: SALDI ISRA [02:15:28]

Bukan, bukan begitu. Katanya, klarifikasi ke partai politik atau gabungan partai politik, ke yang bersangkutan, kemudian ke sekolah ya?

1020.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:37]

Sekolah.

1021.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:15:37]

Sekolah.

1022.KETUA: SALDI ISRA [02:15:38]

Sekolah atau instansi?

1023.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:15:39]

Sekolah.

1024.KETUA: SALDI ISRA [02:15:40]

Sekolah.

1025.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:41]

Sekolah atau instansi yang berwenang?

1026.KETUA: SALDI ISRA [02:15:42]

Sudah-sudah.

1027.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:15:42]

Sekolah.

1028.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:43]

Sekolah, ya? Nah (...)

1029.KETUA: SALDI ISRA [02:15:44]

Sudah. Kalau saya sudah tanya cukup.

1030.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:15:46]

Siap, Yang Mulia.

1031.KETUA: SALDI ISRA [02:15:47]

Nanti kalau enggak, Anda duduk di sini, saya pindah ke sana.

1032.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:49]

Siap, siap.

1033.KETUA: SALDI ISRA [02:15:50]

Ya, gantian kita.

1034.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:52]

Kemudian, lanjut, Yang Mulia.

1035.KETUA: SALDI ISRA [02:15:54]

Terakhir ini.

1036.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:56]

Masih 2, Yang Mulia.

1037.KETUA: SALDI ISRA [02:15:57]

Nah, silakan.

1038.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:15:58]

Nah, tadi Saudara mengatakan bahwa ada klarifikasi yang dilakukan oleh ... pada saat putusan Bawaslu itu oleh kepala sekolah atas nama Bonar Jhonson.

1039.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:16:05]

Ya.

1040.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:16:06]

Nah pertanyaan saya, Saudara melakukan klarifikasi via zoom melalui Bonar Jhonson itu, ada enggak bukti tertulis yang diperlihatkan oleh Bonar Jhonson atau hanya sekedar lisan saja pada saat Zoom itu?

1041.KETUA: SALDI ISRA [02:16:30]

Silakan. Ketika Pak Bonar Jhonson di Zoom itu memperlihatkan bukti atau hanya menyampaikan lisan.

1042.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:16:31]

a. Pernyataan dan itu ada videonya, Yang Mulia.

1043.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:16:32]

Pernyataan saja, ya? Tidak seperti klarifikasi pertama Saudara yang ada surat, Saudara datang langsung ke suku dinas (...)

1044.KETUA: SALDI ISRA [02:16:34]

Sabar, Anda ini jangan terlalu agresif, santai.

1045.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:16:35]

Baik, Yang Mulia.

1046.KETUA: SALDI ISRA [02:16:36]

Kita ini mau mencari kebenaran lho, ini kalau orang enggak mau ... menyembunyikan kebenaran, nanti kan repot Hakim jadinya.
Sudah, apa lagi?

1047.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:16:47]

Sedikit, Yang Mulia.

1048.KETUA: SALDI ISRA [02:16:53]

Ya, ini sedikit yang terakhir, enggak ada lagi setelah ini.

1049.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:16:54]

Nah, tadi Saudara mengatakan bahwa ada petunjuk teknis dari KPU RI melalui Surat 2070. Nah, kami juga menyerahkan Surat 2070 itu, Yang Mulia, melalui P-57. Dan bahkan di surat ini KPU menyampaikan kalau ditemukan sepanjang hal tersebut diketahui sebelum masa tanggapan masyarakat, nah seharusnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini tidak ada satu pun frasa di 2070 ini yang menyatakan bahwa harus mengklarifikasi ke sekolah dan sekolah jadi acuan, Yang Mulia. Ini kami baca langsung di sini dan tadi tidak disampaikan oleh (...)

1050.KETUA: SALDI ISRA [02:17:32]

Oke, Silakan bacakan.

1051.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:32]

Dan kami mengajukan (...)

1052.KETUA: SALDI ISRA [02:17:35]

Untuk poin berapa itu?
Sabar Anda jangan ganggu dulu, ya. Sabar. Jangan (...)

1053.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:36]

Di poin di halaman 2, di halaman 2 Nomor 3, Yang Mulia, dan ini juga sempat (...)

1054.KETUA: SALDI ISRA [02:17:38]

Surat berapa itu?

1055.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:39]

2070.

1056.KETUA: SALDI ISRA [02:17:40]

Sebentar. Karena sudah banyak surat menyurat nih.
Nah ini 20. Poin berapa?

1057.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:41]

Poin 3, Yang Mulia.

1058.KETUA: SALDI ISRA [02:17:42]

Ya.

1059.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:43]

3.A, calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Nah, di sini kami melihat bahwa harusnya bukan diubah atau
diubah status menjadi TMS menjadi MS, Yang Mulia. Tetap ...
seharusnya menurut (...)

1060.KETUA: SALDI ISRA [02:17:44]

Jangan ... jangan ... jangan Anda yang menilai faktanya ... biar
kami yang menilai nanti, ya.

1061.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:17:45]

Nah, kami juga di bukti video, Yang Mulia, di pemeriksaan DKPP,
hal ini juga sempat dinyatakan oleh Majelis DKPP bahwa seharusnya
berdasarkan surat ini kalian bukan mengubah dari TMS menjadi MS,
tetapi harusnya tetap TMS itu pernyataan dari Hakim DKPP yang kami
lampirkan bukti, Yang Mulia, di persidangan ini.
Kemudian (...)

1062.KETUA: SALDI ISRA [02:18:38]

Cukup. Ini sudah terakhir tadi, lho.

1063.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:18:40]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

1064.KETUA: SALDI ISRA [02:18:42]

Ini terakhir, ya?

1065.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:18:43]

Siap, Baik. Yang Mulia.

Nah kemudian, tadi Saudara ... kami coba ke bukti, ya, yang diserahkan oleh Pihak Terkait. Kan ada 2 bukti untuk berkaitan dengan ijazah. Yang pertama ijazah yang dilegalisir di PKBM, Kemudian yang kedua adalah tadi yang 2 ... 4739 itu. Nah, untuk 4739 sudah dibantah oleh 5215, surat dari suku dinas. Kemudian untuk ijazah legalisir itu juga sudah dibantah bahwa tidak terdaftar melalui klarifikasi dan bukti kami.

1066.KETUA: SALDI ISRA [02:19:19]

Itu tidak perlu ditanyakan ke situ, kasih tahu ke kami biar kami yang memutuskan.

1067.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:19:24]

Pertanyaan kami, alat bukti apa yang diserahkan oleh Pihak Terkait yang tidak terbantahkan karena 2 surat tadi sudah di ... terbantahkan, yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa Trisal Tahir itu adalah mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah, selain 2 tadi ya karena dua-duanya sudah dibantah oleh suku dinas.

1068.KETUA: SALDI ISRA [02:19:42]

Oke, Anda (...)

1069.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:19:42]

Alat bukti apa? Satu saja, satu saja.

1070.KETUA: SALDI ISRA [02:19:44]

Sudah. Anda ndak juga bisa menggunakan apa-apa alat bukti itu, itu Hakim pekerjaannya. Silakan, Anda mau jawab?

Ada ndak bukti lain di luar surat itu yang tidak terbantahkan untuk menyatakan ijazah itu benar.

1071.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:00]

Ada keterangan dari Pihak Bonar Jhonson, di sini ini (...)

1072.KETUA: SALDI ISRA [02:20:05]

Ada (...)

1073.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:08]

Ada surat sanggahan, surat sanggahan dari kepala sekolah yang ditandatangani oleh Bonar Jhonson, itu surat sanggahan suku dinas.

1074.KETUA: SALDI ISRA [02:20:17]

Oke, surat sanggahan suku dinas.

1075.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:19]

Surat sanggahan sekolah terhadap suku dinas.

1076.KETUA: SALDI ISRA [02:20:22]

Oke.

1077.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:23]

Tertanggal 13.

1078.KETUA: SALDI ISRA [02:20:25]

Berapa? Di bukti berapa itu, Pak?

1079.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL: [02:20:32]

Jadi sekolah, ya, Yang Mulia.

1080.KETUA: SALDI ISRA [02:20:33]

Hei, Anda itu diam lagi!

1081.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:20:36]

T-13, Yang Mulia.

1082.KETUA: SALDI ISRA [02:20:37]

T-13.

1083.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:20:38]

Siap, Yang Mulia.

1084.KETUA: SALDI ISRA [02:20:40]

Kalau Anda tidak mau berhenti, saya suruh keluar!
Oke, ini sanggahan, surat sanggahan untuk klarifikasi dari sekolah, itu, ya?

1085.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:55]

Siap, Yang Mulia.

1086.KETUA: SALDI ISRA [02:20:55]

Ini yang digunakan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup?

1087.SAKSI DARI TERMOHON: MUHATZHIR MUH. HAMID [02:20:59]

Cukup, Yang Mulia.

1088.KETUA: SALDI ISRA [02:20:59]

Oke, terima kasih. Miknya dimatikan.
Kita masuk ke, Pak Sekolah ini, Yang Mulia ada yang mau ditanya tambahan? Pak Mulia Pak Ridwan?
Pak Bonar Jhonson.

1089.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:18]

Siap, Yang Mulia.

1090.KETUA: SALDI ISRA [02:21:19]

Apa hubungan Bapak dengan apa ini ... apa namanya ... yang pelari 100%, apa hubungannya 100 meter itu? Siapa namanya? Pakai Jhonson juga yang larinya kencang itu.

1091.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:31]

Oh, ya.

1092.KETUA: SALDI ISRA [02:21:32]

Siapa namanya? Ben Johnson, Pak.

1093.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:34]

Ya.

1094.KETUA: SALDI ISRA [02:21:35]

Ada hubungan enggak?

1095.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:36]

Beda tipis.

1096.KETUA: SALDI ISRA [02:21:38]

Beda-beda tipis, Pak, dia agak lebih tinggi sedikit, Pak, ya.

1097.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:40]

Ya.

1098.KETUA: SALDI ISRA [02:21:42]

Pak, Bapak sekarang masih kepala sekolah di ... apa ... di PKPM?

1099.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:47]

Ya benar, Pak.

1100.KETUA: SALDI ISRA [02:21:48]

Sejak kapan Bapak jadi kepala sekolah di situ, Pak?

1101.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:51]

2023.

1102.KETUA: SALDI ISRA [02:21:53]

2023, ya.

1103.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:53]

Ya.

1104.KETUA: SALDI ISRA [02:21:54]

Ini harus pelan-pelan, ya, Pak, 2023.
2016 itu siapa kepala sekolah, Pak?

1105.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:21:59]

Muhammad Elias Nur.

1106.KETUA: SALDI ISRA [02:22:02]

Muhammad Elias atau Ilias?

1107.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:06]

Elias.

1108.KETUA: SALDI ISRA [02:22:06]

Elias, ya?

1109.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:08]

Ya.

1110.KETUA: SALDI ISRA [02:22:08]

Elias Nur. Sekarang masih ada di sekolah beliau atau ke mana?

1111.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:13]

Sudah diberhentikan tidak hormat.

1112.KETUA: SALDI ISRA [02:22:14]

Sudah diberhentikan tidak hormat. Tidak usah kita ceritakan itu,
Pak, sudah selesai.

1113.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:17]

Ya, Pak.

1114.KETUA: SALDI ISRA [02:22:19]

Kan Bapak tahu kan bahwa kasus yang terjadi berkaitan dengan ijazah itu, lalu Bapak mengeluarkan ... apa namanya ... atau beginilah, saya mundurkan sedikit.

Kapan pihak-pihak yang bertikai ini datang ke Bapak untuk klarifikasi? Nah, itu mulainya dulu.

1115.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:42]

Dari pihak mana, Pak?

1116.KETUA: SALDI ISRA [02:22:43]

Bawaslu kah atau KPU kah, gitu?

1117.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:46]

Alhamdulillah, mereka hanya datang untuk BAP doang.

1118.KETUA: SALDI ISRA [02:22:51]

Yang KPU Bawaslu?

1119.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:52]

Ya, ke sekolah.

1120.KETUA: SALDI ISRA [02:22:53]

Hanya untuk itu saja, Pak? Yang lain-lain tidak ada datang, Pak?

1121.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:56]

Tidak ada.

1122.KETUA: SALDI ISRA [02:22:56]

Oke, kapan itu, Pak?

1123.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:22:58]

Kurang-lebih kapan itu ya, September apa ... saya kurang tahu pasti, Pak.

1124.KETUA: SALDI ISRA [02:23:04]

Oke, Bapak sudah lupa, ya?

1125.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:06]

Ya.

1126.KETUA: SALDI ISRA [02:23:06]

Pertanyaan kedua saya, Pak, saya lupa namanya, Pak ... apa namanya ... Pak Tas ... apa? Trisal Tahir itu benar, ya murid di PKPM, Pak?

1127.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:19]

Benar, Yang Mulia.

1128.KETUA: SALDI ISRA [02:23:19]

Oke, benar ikut ujian Tahun 2016 itu?

1129.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:24]

Ikut belajar dulu, Yang Mulia. Baru ikut ujian.

1130.KETUA: SALDI ISRA [02:23:24]

Oke, belajarnya kapan mulainya, Pak?

1131.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:26]

Kita adanya Sabtu-Minggu, Yang Mulia.

1132.KETUA: SALDI ISRA [02:23:29]

Belajarnya itu kapan, Pak?

1133.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:31]

Sabtu-Minggu.

1134.KETUA: SALDI ISRA [02:23:31]

Sabtu, Mingguya kapan?

1135.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:33]

Jam 4 sore sampai jam 6 sore.

1136.KETUA: SALDI ISRA [02:23:36]

Ya, kapannya itu tanggal, bulan, gitu, Pak?

1137.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:37]

Oh, itu saya sudah lupa, Pak.

1138.KETUA: SALDI ISRA [02:23:39]

Lupa, ya?

1139.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:39]

Ya.

1140.KETUA: SALDI ISRA [02:23:41]

Oke, kalau orang ini kan Ujian Paket Persamaan, Pak, ya?

1141.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:45]

Betul.

1142.KETUA: SALDI ISRA [02:23:46]

Disediakan sekolah, sekolah, nanti ikut. Dulu ujiannya di mana, Pak?

1143.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:49]

Ujian apa, Pak?

1144.KETUA: SALDI ISRA [02:23:52]

Tempat ujiannya.

1145.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:53]

Masih di sekolah saya, Pak.

1146.KETUA: SALDI ISRA [02:23:54]

Di sekolah, oke. Bapak jangan marah ke saya, Pak.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:23:56]

Enggak, Pak.

KETUA: SALDI ISRA [02:23:57]

Nanti kalau Bapak marah, bubar nih sidang, Pak.

Kalau saya beda, Pak, datangnya dengan, Bapak, lebih baik-baik dibanding orang-orang inilah. Karena kan kita ini perlu kebenaran, Pak, ya.

1147.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:06]

Ya.

1148.KETUA: SALDI ISRA [02:24:06]

Oke. Tahun 2016, sekolahnya Sabtu-Minggu, ya, Pak.

1149.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:12]

Ya.

1150.KETUA: SALDI ISRA [02:24:12]

Berapa lama ... apanya ... sekolah Sabtu, Minggu-nya, Pak?

1151.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:16]

Kalau yang saya tahu, Pak, itu hanya setahun, Pak.

1152.KETUA: SALDI ISRA [02:24:22]

1 tahun?

1153.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:22]

Ya.

1154.KETUA: SALDI ISRA [02:24:23]

1 tahun, ya, Pak, ya.

1155.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:24]

Ya.

1156.KETUA: SALDI ISRA [02:24:24]

Jadi lama juga ini.

1157.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:25]

Karena saya pada saat itu tata usaha, Pak.

1158.KETUA: SALDI ISRA [02:24:27]

Oh, Bapak TU ketika itu, ya?

1159.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:29]

Ya.

1160.KETUA: SALDI ISRA [02:24:30]

Tata usaha. Oke. Lalu ujiannya juga di tempat, tapi kan itu lokasi saja yang itu pasti berdasarkan penempatan yang dilakukan oleh dinas, ya?

1161.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:43]

Benar.

1162.KETUA: SALDI ISRA [02:24:44]

Oke. Jadi, segala urusan itu urusan dinas, ya?

1163.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:46]

Betul.

1164.KETUA: SALDI ISRA [02:24:48]

Oke. Nah, kalau begitu, Pak. Apakah sekolah dalam hal ini, sekolah yang tempat, Bapak, yang jadi kepala sekolah yang sekarang?

1165.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:24:51]

Ya.

1166.KETUA: SALDI ISRA [02:24:59]

Itu di ... apa ... di PKBM Yusha itu, Bapak punya otoritas ndak mengeluarkan ijazah sekolah?

1167.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:09]

Untuk mengeluarkan ijazah, sekolah tidak pernah mengeluarkan, Pak.

1168.KETUA: SALDI ISRA [02:25:12]

Tidak pernah mengeluarkan, ya?

1169.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:13]

Ya.

1170.KETUA: SALDI ISRA [02:25:13]

Jadi, Bapak hanya mengantarkan calon ke pintu gerbang ujian begitu?

1171.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:20]

Ya, betul, Pak, seperti itu.

1172.KETUA: SALDI ISRA [02:25:20]

Itu bahasa paling cocok itu, Pak.

1173.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:21]

Ya, seperti itu, Pak.

1174.KETUA: SALDI ISRA [02:25:22]

Ya. Nanti sampai di situ lulus atau tidak, itu urusan mereka.

1175.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:27]

Ya.

1176.KETUA: SALDI ISRA [02:25:27]

Ada ijazah atau tidak, itu urusan mereka?

1177.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:31]

Betul.

1178.KETUA: SALDI ISRA [02:25:30]

Nah, lanjut pertanyaan sekarang, Pak. Mana ijazah tadi? Pak Jhonson?

1179.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:37]

Ya.

1180.KETUA: SALDI ISRA [02:25:38]

Ini bukan sekolah yang mengeluarkan, ya?

1181.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:40]

Bukan.

1182.KETUA: SALDI ISRA [02:25:41]

Bukan, ya?

1183.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:42]

Ya.

1184.KETUA: SALDI ISRA [02:25:43]

Ini dikeluarkan oleh suku dinas?

1185.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:45]

Ya.

1186.KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]

Artinya, Bapak dan sekolah tidak bisa menyatakan ini benar atau tidak?

1187.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:25:52]

Betul.

1188.KETUA: SALDI ISRA [02:25:53]

Yang bisa Bapak sampaikan adalah bahwa Trisal pernah bersekolah di situ Sabtu-Minggu.

1189.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:00]

Sebagai peserta didik.

1190.KETUA: SALDI ISRA [02:26:01]

Sebagai peserta didik. Tapi soal ijazah bukan otoritas, Bapak, ya?

1191.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:05]

Betul.

1192.KETUA: SALDI ISRA [02:26:06]

Oke. Semua dengar, ya? Semua dengar? Pihak Terkait dengar juga? Oke, jadi kita bedakan loh. Kalau Beliau menerangkan bahwa ini pernah sekolah di situ, klir. Tapi kalau Beliau mengatakan bukan kami yang mengeluarkan ijazahnya, itu klir juga. Tidak ada yang keberatan, oke.

Nah, soal ini benar atau tidak, itu kan bukan sekolah yang menentukan, Pak, ya?

1193.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:33]

Betul, Pak.

1194.KETUA: SALDI ISRA [02:26:34]

Oke, bukan sekolah yang menentukan. Ada otoritas lain yang menentukan.

1195.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:39]

Itu dia, Pak.

1196.KETUA: SALDI ISRA [02:26:40]

Nah, otoritas lain itulah nanti yang harus menjawab ini.

1197.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:44]

Betul.

1198.KETUA: SALDI ISRA [02:26:46]

Beliau ini hanya penting untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar bersekolah di situ.

1199.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:52]

Betul.

1200.KETUA: SALDI ISRA [02:26:53]

Dan itu terjadi tahun 2016. Sekolah Sabtu-Minggu-nya selama satu tahun.

1201.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:26:59]

Betul.

1202.KETUA: SALDI ISRA [02:27:00]

Oke. Sekarang karena Saksi ini diajukan oleh Pihak Terkait, silakan tanya yang sepanjang itu. Jangan melebar-lebar kemana-mana.

1203.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:27:11]

Baik. Pak Bonar, tadi mengatakan bahwa itu produknya suku dinas (...)

1204.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:17]

Betul.

1205.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:27:20]

Ijazah tersebut. Nah, di ijazah tersebut itu kan ditulis tangan, Pak Bonar.

1206.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:22]

Betul.

1207.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:27:21]

Nah, apakah Saksi tahu siapa yang menulis tangan atau bagaimana prosedurnya?

1208.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:29]

Sepanjang ... sepanjang sepengetahuan saya, kalau kita mau dapat ijazah itu seperti ini. Pihak sekolah menyiapkan data peserta untuk menjadi peserta ujian ke dinas, dulu belum ada yang namanya online.

1209.KETUA: SALDI ISRA [02:27:44]

Ya.

1210.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:45]

Semua manual. Kita bawa, kita serahkan ke dinas, ditetapkan di dinas jadi DNT.

1211.KETUA: SALDI ISRA [02:27:52]

Daftar?

1212.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:53]

Daftar Nominasi Tetap peserta ujian.

1213.KETUA: SALDI ISRA [02:27:55]

Oke, oke.

1214.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:27:56]

Setelah DNT dikasih, dibawa lagi ke sekolah. Setelah dari DNT itu, kita kasih ke anak-anak untuk ikut ujian. Sampai di selesai ujian, dia dinyatakan lulus atau tidak, sekolah yang menentukan.

1215.KETUA: SALDI ISRA [02:28:12]

i. Oke.

1216.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:13]

Setelah lulus, kita kabarin lagi ke dinas atau ke Sudin peserta-peserta yang lulus. Dari yang lulus itu, dikasihlah blangko ijazah ke kami.

1217.KETUA: SALDI ISRA [02:28:23]

i. Oke.

1218.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:24]

Lalu kami tulis, lalu kami serahkan lagi untuk disahkan.

1219.KETUA: SALDI ISRA [02:28:27]

i. Oke.

1220.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:28]

Setelah itu, kita kontribusi ke peserta didik. Situ, Pak.

1221.KETUA: SALDI ISRA [02:28:31]

i. Oke. Disampaikan ke peserta didik, ya?

1222.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:33]

Ya.

1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:34]

Baik. Nah, pada saat itu, ada ndak data pendukung yang dimiliki sekolah? Kan ini kan 2015-2016, ya, Pak Saksi?

1224.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:43]

i. Ya.

1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:44]

Nah, ada ndak data pendukung yang dimiliki sekolah?

1226.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:46]

Ada.

1227.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:46]

Apa itu?

1228.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:48]

Seperti DNT, rapot, sama tanda bukti ijazah, pengambilan ijazah.

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:53]

Yang bersangkutan, Trisal Tahir?

1230.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:55]

i. Ya.

1231.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:55]

Ada, ya?

1232.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:56]

Ada.

1233.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:56]

Ada dimiliki oleh sekolah?

1234.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:28:57]

Ada.

1235.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:28:59]

Nah, pada saat penulisan terkait dengan ijazah tersebut, itu ...
Pak ini kan, Saksi ini kan pada saat itu, tata usaha, ya?

1236.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:29:08]

Betul.

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:29:09]

Tata usaha. Nah, siapa yang menulis di sekolah, mengisi ijazah tersebut? Tau ndak, Saudara?

1238.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:29:14]

Saya tidak tahu.

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:29:15]

Tidak tahu, ya? Nah.

1240.KETUA: SALDI ISRA [02:29:22]

Apa lagi, Pak?

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:29:24]

2015-2016, apakah PKBM Yusha itu memang sudah mendaftarkan keseluruhan siswanya pa ... masuk ke da ... data Dapodik atau bagaimana prosedur pen ... pendaftaran itu?

1242.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:29:37]

Kalau kita bicara Dapodik, itu bicaranya di tahun 2018 ke sini. Kalau dulu semua serba manual, masih didaftarkan. Kita tuh kiblatnya ke Sudin. Kita bawa berkas anak-anak itu, kita serahkan, peserta didik itu.

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:29:54]

i. Ya.

1244.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:29:54]

Tapi untuk di tahun sekarang, sudah mulai pakai Dapodik.

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:29:58]

Baik. Nah, di antara siswa yang bersekolah di PKBM Tahun 2015-2016, ada ndak yang juga tidak terdaftar di Dapodik Sudin?

1246.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:30:10]

Sampai hari ini setelah saya terkoordinasi dengan kementerian, ada 8 siswa yang belum terdaftar.

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:19]

i. Yang di (...)

1248.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S[02:30:19]

Sama kasusnya seperti Pak Trisal.

1249.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:21]

Oh, gitu?

1250.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:30:22]

Hanya hari ini, mereka mungkin tenang-tenang saja.

1251.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:25]

Baik.

Nah, dari 8 siswa itu, apakah sudah membuat keberatan ke Sudin juga?

1252.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:30:34]

Belum ada yang melapor ke saya/ke sekolah.

1253.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:37]

Baik. Nah, Saudara Saksi ini, pernah membuat pernyataan yang pada prinsipnya mengakui bahwa ada kesalahan penulisan di ijazah yang dilakukan oleh sekolah?

1254.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:30:50]

Benar.

1255.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:51]

Nah, bagai ... bisa diceritakan seperti apa sampai ada kesalahan seperti itu, Pak Bonar ... Pak Saksi?

1256.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:30:57]

Mengenai (...)

1257.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:30:59]

i. Ya.

1258.KETUA: SALDI ISRA [02:31:00]

i. Kesalahan tulis apa?

1259.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:01]

Itu setelah diterbitkannya surat yang dari Sudin, klarifikasi itu. Makanya tanpa pemberitahuan Sudin ke pihak sekolah, saya menerbitkan itu, klarifikasi itu.

1260.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:13]

Saudara Saksi menerbitkan yang pada pokoknya ada dari A sampai D, ya?

1261.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:18]

Ya.

1262.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:19]

Pada yang tertanggal 13 September itu.

1263.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:22]

Betul.

1264.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:25]

Ini Saudara Saksi buat, itu berdasarkan apa? Kenapa yakin sekali bahwa Pak Trisal ini adalah siswanya Bapak?

1265.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:31]

Di awal sudah saya bilang, dia peserta didik saya.

1266.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:33]

i. Ya. Ada data pendukung, ya?

1267.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:35]

Ada.

1268.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:37]

i. Oh, ya.

1269.KETUA: SALDI ISRA [02:31:39]

Apa lagi, Pak?

1270.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:40]

Pada saat dibuat dokumen ini ... pada saat dibuat dokumen ini, apa tanggapan Sudin?

1271.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:31:49]

Tetap tidak ada tanggapan.

1272.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:31:51]

Tidak ada tanggapan. Nah, setelah muncul persoalan ini tidak terdaftar atau tidak ditemukan Data Dapodik Trisal Tahir ini, apakah Saudara saksi pernah diminta untuk diskusi dengan PNPk misalnya atau seperti apa, atau instansi lain?

1273.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:09]

Dengan PNPk?

1274.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:08]

Ya.

1275.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:08]

Pernah.

1276.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:10]

Itu sekaitan dengan apa yang dibahas di PNPk itu?

1277.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:12]

Perbaiki data siswa saya.

1278.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:14]

Perbaiki data siswa.

1279.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:14]

Ya.

1280.UASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:14]

Itu tahun berapa, data siswa tahun berapa?

1281.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:19]

Yang 2016.

1282.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:19]

2016.

1283.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:19]

Ya.

1284.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:19]

Nah, apa hasilnya dari itu? Apa output dari diskusi atau dari PNPk itu?

1285.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:27]

On process.

1286.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:29]

Apanya on process?

1287.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:31]

Dalam proses, hasilnya itu nanti.

1288.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:32]

Hasil perbaikan datanya on process?

1289.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:34]

Ya.

1290.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:34]

Begitu. Nah, apakah sudah dilakukan sekarang? Sudah diperbaiki?

1291.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:38]

Belum. Makanya saya bersurat ke Sudin lagi.

1292.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:41]

Kapan bersuratnya?

1293.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:42]

Tanggal 24 ini ... eh, Januari kemarin.

1294.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:46]

Januari. Nah apa hasilnya?

1295.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:48]

Hasilnya hanya diberikan pembinaan.

1296.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:51]

Sudah pernah berdiskusi dengan Sudin? Kapan itu? Pernah ndak berdiskusi atau diundang oleh Sudin?

1297.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:57]

Belum.

1298.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:58]

Ndak, pada saat Saudara bersurat ke Sudin.

1299.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:32:58]

Ya.

1300.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:32:58]

Berdasarkan ... apa namanya ... tindak lanjut dari PNPK itu, apakah ada tindak lanjut lagi dari Sudin? Misalnya diundang kah atau seperti apa?

1301.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:10]

Ya diundang (...)

1302.KETUA: SALDI ISRA [02:33:10]

Sudin itu suku dinas ya, bukan nama orang.

1303.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:12]

Suku dinas. Mohon izin, Majelis.

1304.KETUA: SALDI ISRA [02:33:15]

Ya, soal ada nama orang Sudin. Suding nanti.

1305.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:16]

Siap, Majelis.

1306.KETUA: SALDI ISRA [02:33:16]

Silakan.

1307.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:18]

Nah, hasil dari undangan suku dinas itu kepada, Pak Bonar, Pak Saudara Saksi ini, apa hasilnya? Sudah ada?

1308.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:28]

Belum.

1309.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:27]

Belum?

1310.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:30]

Ya, masih dalam proses juga itu.

1311.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:31]

Apa output dari dis ... atau panggilan tersebut? Tadi Saudara Saksi menyebutkan apa? Diberikan pembinaan?

1312.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:35]

Ya, betul.

1313.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:35]

Oh, dilakukan pembinaan?

1314.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:40]

Ya.

1315.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:39]

Sampai ... sampai disitu tidak ada lagi informasi terkait dengan (...)

1316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:40]

Belum (...)

1317.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:40]

Progres (...)

1318.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:45]

Belum ada kabar perbaikan (...)

1319.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:45]

Perbaikan data 2016?

1320.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:33:46]

Betul.

1321.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:47]

Belum ada.

1322.KETUA: SALDI ISRA [02:33:47]

Cukup, ya?

1323.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:33:50]

Cukup, Majelis.

1324.KETUA: SALDI ISRA [02:33:50]

Oke, terima kasih.

Sekarang, Pemohon.

Kalau panjang nanti saya stop, ya. Karena yang paling penting itu informasi untuk Kami. Jadi, jangan nanti misalnya Saksi enggak bisa jawab, lalu menganggap, "Wah, kita memenangkan perkara ini". Jangan begitu juga ... apanya ... karena kita akan semuanya didasarkan kepada bukti-bukti yang ada. Silakan.

1325.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:16]

Baik. Insha Allah, 3 saja, Yang Mulia.

1326.KETUA: SALDI ISRA [02:34:18]

Jangan dimatikan. Mau menjawab juga, Pak. Biar saja dihidupkan. Silakan!

1327.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:23]

Nah, Saudara Saksi, yang pertama.

Apakah Saudara pernah memberikan keterangan di Sentra Gakkumdu atau Kepolisian di Kota Palopo?

1328.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:34:33]

Itu yang saya bilang tadi (...)

1329.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:33]

Loh pertanyaan (...)

1330.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:34:35]

Mereka datang hanya untuk bikin BAP.

1331.KETUA: SALDI ISRA [02:34:37]

Oke.

1332.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:42]

Pernah, ya?

1333.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:34:39]

Pernah.

1334.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:44]

Pernah, ya?

1335.KETUA: SALDI ISRA [02:34:41]

Pernah, tapi hanya datang untuk BAP.

1336.KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:43]

BAP.

1337.KETUA: SALDI ISRA [02:34:43]

Oke.

1338.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:34:43]

Nah, pertanyaan saya, ini saya kutip dari kajian Bawaslu dan keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu di persidangan ini.

Nah Saudara, menurut Bawaslu dan pemeriksaan Gakkumdu itu, keterangan Bonar Johnson selaku Kepala PKBM Uswatun Hasanah menerangkan bahwa tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusha yang dapat membuktikan bahwa Saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian Paket C di PKBM Yusha.

Berdasarkan ... Nah, apakah benar keterangan Saudara seperti itu di Gakkumdu atau Kepolisian Palopo?

1339.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:35:18]

Tidak. Tidak seperti itu.

1340.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:35:20]

Tidak seperti Saudara sudah di BAP pada saat itu?

1341.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:35:20]

Karna (...)

1342.KETUA: SALDI ISRA [02:35:22]

Pelan, tunggu dia jawab dulu, Pak.

1343.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:35:26]

Karena waktu itu tidak diberikan sekolah untuk mencari arsip yang di tahun 2016 itu.

1344.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:35:32]

Jadi, Saudara membantah BAP yang disampaikan oleh Gakkumdu ... eh sori. Di Bawaslu pada saat persidangan ini dan juga kami quote dari DKPP. Saudara membantah keterangan Saudara yang menyatakan bahwa tidak terdapat data di PKBM Yusha atas nama Trisal Tahir.

1345.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:35:56]

Tidak ada, bukan berarti tidak ada (...)

1346.KETUA: SALDI ISRA [02:35:57]

Belum dicari.

1347.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:35:59]

Tidak ada waktunya belum dicari (...)

1348.KETUA: SALDI ISRA [02:36:00]

Oke.

1349.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:00]

Oh, jadi pada saat itu, Saudara tidak mencari sehingga keterangan Saudara (...)

1350.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:02]

Waktunya juga diberikan mepet.

1351.KETUA: SALDI ISRA [02:36:04]

Oke, pelan-pelan Pak, tenang-tenang.

1352.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:06]

Ya, sa ... saya saja.

1353.KETUA: SALDI ISRA [02:36:06]

Ya.

1354.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:06]

Nah sekarang, database Saudara ada enggak Trisal Tahir?

1355.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:09]

Ada.

1356.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:10]

Apa bukti tertulis yang Saudara bisa tunjukkan kepada publik atau persidangan ini?

1357.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:14]

Sudah saya sampaikan ke penga (...)

1358.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:17]

Nah, sudah, ya, disampaikan.
Nah kemudian, ini kami ada bukti dari suku dinas.

1359.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:24]

Ya.

1360.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:24]

Kemudian dari Kepala Dinas Pendidikan DKI. Kemudian di Kemenristekdikti. 2 pokoknya ... 3 pokoknya, yang pertama ijazahnya itu ada perbedaan tulisan, kemudian nomor (...)

1361.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:38]

Sudah saya jawab.

1362.KETUA: SALDI ISRA [02:36:38]

Oke.

1363.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:40]

Kemudian (...)

1364.KETUA: SALDI ISRA [02:36:40]

Biar saja dulu, Pak. Terus, apa lagi?

1365.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:36:42]

Kemudian terakhir. Bahwa yang bersangkutan di database tidak terdaftar dan kemudian tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional. Gimana Saudara ... Saudara Saksi menanggapi dari 3 instansi ini?

1366.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:36:56]

Saya tidak pernah diundang ataupun membuat klarifikasi ke mereka.

1367.KETUA: SALDI ISRA [02:37:00]

Oke.

1368.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:01]

Mereka memutuskan secara sepihak, biar Saudara tahu.

1369.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:37:06]

Nah, baik. Terakhir, pada saat Saudara diklarifikasi melalui Zoom, ya, tertanggal pada saat Putusan Bawaslu itu, benar Saudara pernah di Zoom, ya?

1370.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:16]

Benar.

1371.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:37:17]

Nah, apakah pada saat itu KPU atau Bawaslu meminta bukti tertulis pada saat (...)

1372.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:23]

Tidak.

1373.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [02:37:24]

Tidak, ya?

1374.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:24]

Video itu sudah jadi bukti.

1375.KETUA: SALDI ISRA [02:37:26]

Oke.

1376.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:26]

Oke.
Cukup, Yang Mulia.

1377.KETUA: SALDI ISRA [02:37:27]

Cukup. Dimatikan mik-nya, nah itu.
Kalau Bapak masih hidup, Pak, mau ditanya oleh Termohon.
Termohon, silakan.

1378.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:37:35]

Satu saja, Yang Mulia.

1379.KETUA: SALDI ISRA [02:37:37]

Nah, itu ... itu kalau satu saja itu, senang saya mendengarnya.

1380.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:37:40]

Makanya satu saja, Yang Mulia.
Izin Saksi, kami cuma ingin mengkonfirmasi kembali biar ternotice dalam persidangan ini. Apakah benar pada saat klarifikasi yang dilakukan via Zoom itu dihadiri oleh Pihak KPU dan Bawaslu?

1381.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:37:58]

Benar sekali.

1382.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:37:59]

Apakah benar bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan itu dari Bawaslu juga ikut melakukan klarifikasi?

1383.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:38:05]

Benar sekali.

1384.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [02:38:06]

Cukup, Yang Mulia. Terima Kasih.

1385.KETUA: SALDI ISRA [02:38:07]

Terima Kasih.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

1386.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Masih pri ... apa ... siap untuk ditanya kan, Pak Bonar? Kok kelihatannya sudah capek benar, gitu, ya. Masih segar, senyumnya masih mengembang dengan baik. Pak Bonar, saya ingin ... apa ... mendalami, ya. PKBM Yusha ini berdiri sejak kapan, Pak?

1387.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:38:43]

Sejak sepanjang ta ... saya baru masuk di situ 2009 (...)

1388.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:49]

2009?

1389.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:38:49]

Dia berdiri 2007.

1390.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:51]

Oke, jadi Bapak di sana ... ada di sana sejak tahun 2009?

1391.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:38:56]

Benar.

1392.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:56]

Dan itu berjalan terus PKBM-nya sampai sekarang? Sampai Bapak jadi (...)

1393.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:00]

Sampai saya diangkat jadi Kepala Sekolah.

1394.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:02]

Oke, kan sekarang masih Kepala Sekolah, kan?

1395.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:05]

Ya.

1396.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:06]

Ya, masih jalan. Banyak siswanya, Pak? Sekarang?

1397.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:09]

Kurang lebih 100, Pak.

1398.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:10]

100, oke.

Nah, saya tidak ingin mempersoalkan apa yang Bapak sampaikan waktu di BAP, tapi saya ingin tanya karena kan posisi yang Bapak sampaikan di persidangan ini bahwa Pak Trisal ini kan, menurut keterangan Bapak tadi adalah siswa lah, saya sebut segitu (...)

1399.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:33]

Betul.

1400.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:33]

Pernah belajar, gitu, ya.

1401.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:35]

Ya.

1402.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:35]

Itu masuk tahun berapa inget enggak, Bapak? Karena Bapak sudah TU (...)

1403.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:39]

Kurang lebih, ya. Kurang lebih, Pak.

1404.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:40]

Ya, kurang lebih.

1405.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:41]

Tahun 13 antara 2013 ... 2013-2014 (...)

1406.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:43]

2013 atau 2014-lah, ya?

1407.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:47]

Ya.

1408.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:47]

Kemudian belajar di sana Sabtu-Minggu, itu katanya, Bapak (...)

1409.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:39:51]

Betul.

1410.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:51]

Sore. Dan itu kemudian PKBM Yusha mengantarkan untuk ujian di tahun 2016, begitu?

1411.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:40:01]

Betul.

1412.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:02]

Oke, ya. Nah, data-data administratif Pak Trisal ini tadi disebut ada yang sudah diberikan ke Pihak Terkait. Itu sudah dijadikan bukti?

1413.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:40:17]

Bukti PT-3 sampai PT-5, Majelis.

1414.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:20]

Oke, PT-3. Apa saja itu, coba ... coba karena saya apa ... belum melihat yang bukti yang itu. Apa saja, coba singkat, Pihak Terkait.

1415.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:40:29]

PT-3 itu rapot siswa.

1416.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:32]

Rapot, ya.

1417.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:40:33]

Rapot kemudian (...)

1418.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:34]

Rapot. Berapa semester atau berapa tahun dari sejak awal?
Enggak, biar Pihak Terkait dulu, Pak. Ya, Pak Bonar.

1419.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:40:44]

Yang sampai ke kami ini. Susah juga menilainya, Majelis.

1420.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:51]

Nah.

1421.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:40:58]

Mungkin yang bersangkutan bisa menjelaskan.

1422.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:00]

Oke, silakan, Pak Bonar. Itu data yang ada di sana tentang Pak Trisal, ini apa? Mulai (...)

1423.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:41:05]

Untuk nilai rapot.

1424.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:07]

Ya.

1425.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:41:08]

Itu kita input di akhir.

1426.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:12]

Input di akhir, ya oke.

1427.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:41:12]

Itu langsung 1 tahun.

1428.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:16]

Oke. Itu rapot itu diberikan kepada siswa bagaimana katakanlah siswa sekolah umum atau cuma diinput dan di setor ke dinas, Pak?

1429.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:41:27]

Cuma diinput dan disetor ke dinas. Kalau sekolah formal baru ada rapot.

1430.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:31]

Oh, jadi kalau kepada peserta (...)

1431.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:41:33]

Non-formal, ya.

1432.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:35]

Non-formal itu tidak diberikan siswanya.

1433.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:71:37]

Tidak ada rapot.

1434.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:38]

Oke. Ini ya, kami sudah pegang ini PT-03 dan kemudian ada juga PT-05, ya. Eh, 04 di bawah-nya (...)

1435.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:41:50]

04 dan 05. Ada 3, Majelis.

1436.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:41:51]

Ya, oke. Kemudian PT-05 ini tanda bukti serah terima ijazah dan SK ini. Ini yang PT-05 yang, Pak Trisal, itu nomor berapa nih?

1437.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:42:08]

36, Majelis.

1438.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:09]

Nomor 36, oh ya, ya, Pak Trisal Tahir. Itu, ya?

1439.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NURSARI [02:42:14]

Siap, Majelis.

1440.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:16]

Ini, Pak Bonar, ya? Ini kan berarti ini kan diambilnya di PKBM (...)

1441.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:40:00]

Yusha.

1442.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:27]

Yusha, ya?

1443.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:27]

Betul.

1444.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:28]

Dan kemudian masing-masing yang mengambil itu apa.

1445.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:32]

Siswa.

1446.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:32]

Tanda tangan, ya?

1447.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:33]

Ya.

1448.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:33]

Tetap apa ... bukti bahwa ijazahnya sudah diambil (...)

1449.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:37]

Betul.

1450.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:37]

Atau sudah diserahkan, kan begitu. Oke, jadi ini tidak sendirian tapi ini ada 49 orang ini.

1451.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:46]

Ya.

1452.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:46]

Oke.

Tadi apa ... meskipun mungkin saya menangkapnya enggak utuh.

1453.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:54]

Ya.

1454.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:54]

Dapodik itu baru mulai tahun 2018, ya?

1455.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:42:59]

19 kalau, ya (...)

1456.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:00]

Ya, artinya 2018-2019 (...)

1457.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:02]

Ya.

1458.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:03]

Ke sini lah (...)

1459.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:04]

Kurang lebih, ya.

1460.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:04]

Sampai sekarang kurang lebih. Nah apa ... ketika kemudian menggunakan Dapodik bukan lagi pencatatan manual seperti sebelumnya.

1461.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:16]

Betul.

1462.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:16]

Yang sebelumnya ini kemudian diinput ke Dapodik atau bagaimana, Pak?

1463.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:21]

Tidak. Karena belum berlaku Dapodik itu, Pak.

1464.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:25]

Ya. Kan Dapodik itu kan kemudian begitu diperkenalkan, diintroduksi, ya.

1465.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:31]

Ya.

1466.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:31]

Ditetapkan. Itu kan tentunya yang utama untuk yang siswa yang sedang berjalan ketika mulai itu, kan? Dapodik sudah (...)

1467.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:38]

Untuk ... untuk sekarang.

1468.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:39]

Ya, ya.

1469.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:40]

Ya.

1470.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:40]

Dari tahun berapa itu? 2019 (...)

1471.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:42]

2019.

1472.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:43]

Sampai sekarang, kan?

1473.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:44]

Ya.

1474.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:44]

Nah, pertanyaan saya, Bapak, tahu enggak, yang sebelum itu. Dimasukkan enggak datanya?

1475.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:43:50]

Oh, tidak. Tidak.

1476.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:50]

Oke. Ya, ya ... ya. Jadi kemudian, ini saya kalau, Bapak tahu, tapi kalau Bapak enggak tahu, ya jawab saja enggak tahu, enggak masalah. Dasar kemudian untuk katakanlah suku dinas itu menyatakan bahwa, "Oh ya ini apa ... terlepas bawa ijasahnya, tulisannya lazim atau tidak lazim, atau umum atau tidak umum itu soal nantilah. Itu soal.

Itu apa dong untuk menyatakan itu, dinas biasanya, yang misalnya alumni PKBM Yusha 25 apa ... 2015, 2016, 2014, dan sebelumnya itu. Kalau tidak ada di dapodik, kemudian tidak tercatat, miss-lah katakanlah.

1477.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:33]

Ya.

1478. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:34]

Ya, itu apa biasanya, adakah (...)

1479.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:36]

Ada (...)

1480.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:37]

Kasus seperti itu?

1481.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:38]

Ada, Pak.

1482.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:40]

Jadi, gimana?

1483.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:41]

Karena, kita kan dulu, Saya bilang kita itu inputnya manual.

1484.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:44]

Manual. Ya.

1485.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:45]

Ya.

1486.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:45]

Saya bisa membayangkan lah.

1487.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:46]

Nah, ya. Kalo itu bisa kececer.

1488.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:48]

Ya.

1489.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:48]

Tapi, mungkin masih ada yang namanya di softcopy-nya di komputer.

1490.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:53]

Ya.

1491.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:44:55]

Kita input.

1492.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:56]

Kan, apa yang, Bapak lakukan ketika jamannya masih manual seperti itu, sampai 2016 ini misalnya? Apa Bapak, apa manual itu yang Bapak setorkan itu apa berkas? ke dinas?

1493.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:05]

Berkas, berkas ijazah, ya (...)

1494.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:07]

Berkas, berkas hard copy?

1495.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:08]

Ya.

Ya, berkas-berkas, ya.

1496.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:10]

Ya, kan waktu itu kan sudah ada komputer juga bisa dibuat (...)

1497.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:12]

Ya.

1498.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:13]

Softcopy-nya (...)

1499.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:13]

Ya.

1500.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:14]

Ini hardcopy-nya atau sama softcopy-nya?

1501.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:16]

Hardcopy, nanti kita dikasih softcopy-nya dari dinas. Udah berbentuk (...)

1502.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:19]

Yang Bapak, yang Bapak serahkan apa hardcopy-nya (...)

1503.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:22]

Hardcopy (...)

1504.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:23]

Kepada dinas itu?

1505.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:24]

Ya.

1506.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:25]

Ya apa, apa apa bentuknya apa? Apakah daftar siswa (...)

1507.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:28]

Berbentuk berkas, berbentuk berkas (...)

1508.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:29]

Daftar ujian?

1509.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:30]

Berkas.

1510.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:31]

Berkas itu apa? Isinya apa?

1511.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:35]

Kartu keluarga.

1512.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:36]

Kartu keluarga dari peserta didik?

1513.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:38]

Ya.

1514.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:39]

Oke.

1515.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:40]

Ijazah terakhir peserta didik.

1516.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:41]

KTP-nya dia?

1517.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:42]

Ya, betul.

1518.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:43]

Gitu.

1519.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:43]

Ya, itu.

1520.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:44]

Oke, nah Bapak serahkan itu?

1521.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:47]

Ya.

1522.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:47]

Biasanya dinas melakukan apa kalau kemudian terima dari Bapak itu hardcopy?

1523.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:52]

Itu nanti yang akan menjadi DNT.

1524.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:55]

Apa itu DNT?

1525.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:56]

Daftar Nominasi Tetap.

1526.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:58]

Oke.

1527.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:45:59]

Yang untuk pengikut ujian.

1528.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:00]

Oh, untuk pengikut ujian.

1529.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:01]

Ya.

1530.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:00]

Oke, setelah mengikut ujian kan tadi Bapak bilang ujiannya ... tetap di sekolah Bapak kan?

1531.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:11]

Ya.

1532.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:12]

Yang menentukan lulus atau enggak lulus kan tadi Bapak bilang sekolah?

1533.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:16]

Betul.

1534.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:17]

Oke, nah setelah misalnya ditentukan oleh sekolah lulus, apa yang Bapak setor secara manual juga tentunya?

1535.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:24]

Ya.

1536.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:25]

Apa, itu?

1537.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:25]

Nanti kita rekap nilainya. Nilai kelulusan (...)

1538.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:27]

Nilainya.

1539.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:29]

Ya.

1540.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:30]

Terus, Bapak bawa ke?

1541.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:31]

Sudin.

1542.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:31]

Ke Sudin.

1543.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:32]

Ya.

1544.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:33]

Apa yang dilakukan Sudin?

1545.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:34]

Nanti dari situ kita bikin berita acara bahwa siapa peserta yang lulus.

1546.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:37]

Oke.

1547.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:38]

Yang untuk menjadi blangko ijazah.

1548.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:39]

Kemudian Bapak diberi blangko ijazah?

1549.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:44]

Benar.

1550.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:45]

Oke, blangko ijazah kan diisi nama dan nilai yang dibelakangnya (...)

1551.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:49]

Betul.

1552.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:50]

Oleh sekolah.

1553.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:50]

Ya.

1554.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:51]

Tapi yang tanda tangan kan Sudin.

1555.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:53]

Betul, kembalikan lagi ke Sudin.

1556.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:54]

Bapak datang lagi ke Sudin (...)

1557.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:56]

Ya, untuk disahkan.

1558.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:57]

Untuk tanda tangan (...)

1559.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:58]

Ya.

1560.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:58]

Disahkan.

1561.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:46:59]

Ya.

1562.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:00]

Ada proses verifikasi lagi enggak oleh Sudin? Kan (...)

1563.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:02]

Tidak.

1564.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:03]

Tentunya yang Sudin yang tanda tangan kan enggak, enggak Sudin astek kan?

1565.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:06]

Ya.

1566.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:07]

Sudin asal teken maksudnya kek saya begitu, gitu ya.
Nah, bukan astek. Itu kan, kan enggak begitu.

1567.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:14]

Enggak.

1568.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:15]

Hati-hati, lho.

1569.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:16]

Ya.

1570.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:17]

Gitu, lho. Ini kami ini, kalau mau tanda tangan setiap putusan itu kita cek lagi nih. Amarnya benar apa enggak yang tertulis, gitu lho. Kan kalau kita tanda tangan ternyata amarnya beda dengan diucapkan kan bisa geheran nanti. Itu kami bertiga ... bersembilan lah. Bersama Panitera, kan kita cek itu amarnya.

Nah, Sudin kemudian kan tanda ... apa Bapak bawa kesana setelah diisi, Sudin akan tanda tangan itu, dia ngecek-ngecek apa lagi, Pak?

1571.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:44]

Ya.

1572.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:45]

Atau asal teken aja? Oh, percaya sama Pak Bonar lah, Pak Bonar orang baik.

1573.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:48]

Bukan.

1574.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:49]

Sambil merem kita teken gitu, gitu enggak?

1575.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:51]

Bukan gitu Pak.

1576.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:52]

Gimana?

1577.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:53]

Tetap jadi nanti kita kan dilihat ada daftar yang penerimanya.

1578.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:55]

Ya.

1579.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:47:57]

Oh, ya ini ada 16, dilihat.

1580.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:58]

Oke, dilihat. Enggak satu-satu di cek enggak sama Sudin. Oh, ya, ini benar deh itu.

1581.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:48:03]

Saya kurang tahu kalau itu, Pak. Kalau kerjanya dia ngecek.

1582.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:06]

Oh Sudin, enggak tau, ya, Bapak, ya itu loh.

1583.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:48:07]

Ya, enggak tahu.

1584.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:08]

Itu, tapi yang pen ... yang apa ... yang terjadinya tidak pernah kemudian, itu tadi astek gitu, loh. Sambil gitu loh ... apa ... sambil ada sesuatunya lah, misalnya enggak gitu kan. Ini suudzon saja, gitu ya, prasangka gitu. Ya sudah, jadi itu penting, ya.

1585.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:48:26]

Ya, Pak.

1586.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:27]

Tapi yang paling penting adalah ... apa ... di data Bapak yang namanya, Pak Trisal, itu ada termasuk menuliskan dan mengisi ijazah pun itu Bapak akui dilakukan oleh sekolah, oleh PKBM Yusha, itu, ya itu. Oke, soal terdaftar atau enggak terdaftar dan segala macam, Bapak enggak tau lah karena kan bukan Bapak yang menuliskan daftar.

Oke, terima kasih Pak Bonar, ya terima kasih.

Saya kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

1587.KETUA: SALDI ISRA [02:49:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Ridwan?

1588.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:08]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak Bonar, ya, Saksi sedikit lagi.

Tanggal 27 itu kan tadi sudah sebenarnya ini hanya mengulang, cuma saya ingin memastikan saja dari Saudara. 27 Agustus itu kan tanda tangan Saudara itu, ya, Bonar, yang kemudian digunakan. 10 hari kemudian, itu tanggal 13 itu kan Pihak Termohon menetapkan tidak memenuhi syarat, kan begitu. Kemudian di hari yang sama juga, Saudara kan ada apa namanya ... kesediaan Saudara untuk mengakui kesalahan, nah itu kan.

1589.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:49:43]

Ya.

1590.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:44]

Yang mengenai bahwa ada kesalahan-kesalahan dalam surat bantahan itu sebagai bentuk klarifikasi.

1591.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:49:48]

Ya.

1592.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:50]

Nah, kemudian baru tanggal 21 itu yang kemudian dinyatakan bahwa benar kemudian berubah lagi kan seperti itu. Pertanyaan saya adalah yang di tanggal 13 bahwa Saudara mengakui kesalahan itu, Saudara itu sudah tahu apa yang akan dilakukan, kesalahan Saudara itu apa, sudah tahu waktu itu?

1593.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:03]

Ya, yang dari surat Sudin itu.

1594.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:04]

Berisi dalam surat itu saja?

1595.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:06]

Ya.

1596.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:08]

Nah, tadi berarti Saudara mengakui dari situ waktu itu, ya?

1597.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:10]

Ya.

1598.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:11]

Tetapi ketika ini di tanggal 21, hari yang berikutnya itu, Saudara ndak tahu itu?

1599.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:18]

Eenggak tahu.

1600.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:19]

Bahwa ijazah itu dinyatakan benar gitu, ndak tahu lagi Saudara?

1601.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:24]

Ndak tahu.

1602.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:25]

Tidak mengikuti lagi?

1603.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:26]

Enggak.

1604.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:50:27]

Oh, ya.
Terima kasih, Yang Mulia.

1605.KETUA: SALDI ISRA [02:50:31]

Pak Bonar. Nah ini sebelum kita break ini.

1606.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:33]

Siap.

1607.KETUA: SALDI ISRA [02:50:34]

Pertanyaan saya, Bapak, masih simpan ndak bukti sektor manual nama-nama ke Sudin? Yang usulan dari sekolah?

1608.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:43]

Saya usahakan, saya cari.

1609.KETUA: SALDI ISRA [02:50:45]

Oke, satu.
Bapak, masih simpan ndak pengumuman lulus ujian?

1610.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:52]

Seperti apa, Pak?

1611.KETUA: SALDI ISRA [02:50:54]

Ya kan, kalau dulu kan kita ini sama-sama pernah SMA itu kan, nama-nama yang lulus,

1612.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:50:58]

Oh yang ditempel.

1613.KETUA: SALDI ISRA [02:51:00]

Ada yang masih disimpan enggak?

1614.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:01]

Enggak.

1615.KETUA: SALDI ISRA [02:51:02]

Arsip-arsipnya segala macam?

1616.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:04]

Ya.

1617.KETUA: SALDI ISRA [02:51:05]

Kalau Bapak disuruh cari, bisa dapat enggak? Apa yang bisa berkaitan dengan itu?

1618.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:19]

Maksudnya yang Bapak minta?

1619.KETUA: SALDI ISRA [02:51:21]

Ya, semacam apalah, yang di dalam-nya ada nama Trisal.

1620.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:23]

Bisa

1621.KETUA: SALDI ISRA [02:51:24]

Yang diumumkan lulus itu.

1622.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:24]

Bisa. Bisa, Pak.

1623.KETUA: SALDI ISRA [02:51:25] [02:51:25]

Dengan berapa? 39 atau 40 berapa?

1624.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:28]

Ya, betul.

1625.KETUA: SALDI ISRA [02:51:29]

Berapa orang semuanya, Pak?

1626.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:30]

49.

1627.KETUA: SALDI ISRA [02:51:32]

49 yang lain itu, yang satu paket itu.

1628.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:34]

Betul.

1629.KETUA: SALDI ISRA [02:51:35]

Kan mengumumkannya satu paket itu.

1630.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:35]

Satu ... satu angkatan.

1631.KETUA: SALDI ISRA [02:51:36]

Ya, satu angkatan itu.

1632.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:37]

Ya.

1633.KETUA: SALDI ISRA [02:51:38]

Lembar pengumumannya.

1634.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:39]

Ya.

1635.KETUA: SALDI ISRA [02:51:41]

Yang ketiga, nilai manual dari Sudin itu, itu Bapak masih simpan enggak? Kan dikasih blangko.

1636.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:49]

Ya.

1637.KETUA: SALDI ISRA [02:51:50]

Ada nilai dikirim ke sekolah.

1638.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:51]

Ya.

1639.KETUA: SALDI ISRA [02:51:52]

Sekolah mengisi lalu dikirim lagi ke Sudin untuk tanda tangan itu.

1640.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:56]

Saya sudah cari, tapi enggak ada itu.

1641.KETUA: SALDI ISRA [02:51:57]

Bapak (...)

1642.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:51:55]

Yang nilai manual.

1643.KETUA: SALDI ISRA [02:51:59]

i. Ya kan mungkin karena kepepet, ya?

1644.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:52:00]

i. Ya.

1645.KETUA: SALDI ISRA [02:52:00]

Nanti kalau kita kasih waktu, Bapak masih bisa mencarinya, enggak?

1646.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:52:05]

Sepanjang sepengetahuan saya, saya sudah enggak ketemu lagi, Pak.

1647.KETUA: SALDI ISRA [02:52:08]

Ya, jangan ... jangan ... jangan dibilang ndak. Usaha dulu, Pak.

1648.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [02:52:11]

Ya, ya.

1649.KETUA: SALDI ISRA [02:52:11]

Ya. Karena ini kan, kita ni begini juga, Pak. Diproses-proses begini, kita mau memberikan pelajaran juga agar ke depan yang kayak begini ini, jangan terjadi lagi. Kan kasihan kita, gitu.

Jadi penyelenggara terutama, itu harus hati-hati betul. Ya, kalau orang tidak memenuhi syarat, misalnya, itu dari awal memang jangan diputar-putar begitu. Sudah jadi di ujung baru ditarik lagi. Kalau memenuhi syarat, ya lepas begitu. Karena apa? Jangan kemudian proses kita berdemokrasi ini rusak gara-gara kurang cermatan. Nah, itu yang ... yang ... yang paling penting, ya. Tanpa harus mempermasal ... mempersalahkan siapa. Nah ini, ini penting. Nah oleh karena itu, kami mohon waktu 5-10 menit break. Kami akan diskusi, apakah kami merasa cukup dengan data ini atau kami harus melakukan extension sidang tambahan beberapa hari ke depan.

Mohon ... apa ... yang dalam ruangan ini tidak keluar, kami minta waktu paling lama 10 menit untuk mendiskusikan di antara kami bertiga, apa ini sudah cukup atau belum.

Bisa diterima semua, ya? Oke, kalau begitu sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.24 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.34 WIB

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Nah ini, disampaikan, kami telah berunding di ruang yang terpisah tadi. Bahwa kami masih memerlukan waktu. Jadi, kita akan ada sidang lanjutan pada tanggal 17 Pukul 13.30 WIB. Jadi hari Senin, ya, dicatat. Ini sekaligus jadi pengumuman. Jadi, Saksi-Saksi enggak perlu hadir lagi. Tapi KPU, tetap. Bawaslu, tetap. Bapak enggak usah. Bapak juga enggak.

Nah, Pak Bonar diharap hadir lagi. Ya? Terserah Bapak, berundinglah dengan pihak ini. Ini perintah pengadilan, Pak, perintah Mahkamah. Nah, kami berencana mau memanggil.

1. Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ya, Pak, ya? Benar, ya? Pak Bonar, ya? Kemudian Suku Dinas Jakarta Tim ... Jakarta Utara. Dinas Pendidikan DKI dan Suku Dinas ... apa ... Jakarta Utara. Begitu benar, ya Pak, ya? Jakarta Utara. Kemudian Dinas Pendidikan DKI, ya. Akan kita surati, tapi yang Dikbud enggak usah.

Nah oleh karena itu, kita nanti apa yang kita perlukan dari Dinas Pendidikan dan suku dinas nanti akan kita surati, kita akan panggil. Tapi, Pak Bonar Bapak diminta untuk menyediakan.

1 ... kalau bisa dicatat, Pak, kalau Bapak enggak ada pena ini saya kasih, Pak. Boleh nanti, Bapak, bawa pena Hakim pulang ini Pak hadiah dari Hakim Konstitusi untuk Bapak, ini. Ini Pak, saya kasih pena mahal Pak. Nah, itu.

1. Kami perlu dari Bapak nanti membawa ... sudah dicatat, Pak? Enggak ada kertas juga, Pak, oh kacamata, itu perlu itu, Pak, kalau kacamata itu, Pak. Bapak bawa usulan peserta ujian dari sekolah ke suku dinas yang tahun 2016.

Pakai mik, Pak!

1650.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:05:14]

Itu kita cari yang aslinya atau bagaimana, Pak?

1651.KETUA: SALDI ISRA [03:05:16]

Pokoknya kami tahu, Bapak bisa mendatangkan itu, mau asli atau bagaimana.

1652.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:05:22]

Oh siap.

1653.KETUA: SALDI ISRA [03:05:22]

Kan 2016 masih belum terlalu jauh itu Pak.

1654.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:05:25]

8 tahun, Pak.

1655.KETUA: SALDI ISRA [03:05:26]

8 tahun, Pak. Jauh lebih jauh lagi yang perkara yang sebelumnya tadi, Pak, tahunnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, pengumuman lulus, Pak.

Yang ketiga, contoh ijazah lain di luar ijazahnya Pak Trisal kalau Pak Trisal kita sudah punya ini, ya, Pak, ya?

1656.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:05:55]

Ya.

1657.KETUA: SALDI ISRA [03:05:56]

Pak Bonar, jadi yang lain.

1658.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:05:56]

Ya.

1659.KETUA: SALDI ISRA [03:05:57]

Yang 2016.

Yang keempat, registrasi masuknya sebagai siswa, Pak Trisal.

1660.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:07]

Registrasi.

1661.KETUA: SALDI ISRA [03:06:08]

Di sekolahnya, kan dia mendaftar awalnya kan, Pak, ya? Nah itu, registrasi masuk.

1662.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:12]

Itu Formulir Pendaftaran ya, Pak?

1663.KETUA: SALDI ISRA [03:06:13]

Ya pendaftaran, ya betul. Nanti kalau saya minta bukti bayar uang sekolahnya nanti ketahuan, Pak, berapa Bapak apa ... uang sekolahnya per bulan, itu enggak perlu lah.

Kalau ada bukti-bukti hadir ketika sekolah, Pak, daftar hadir.

1664.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:28]

Oh, ya.

1665.KETUA: SALDI ISRA [03:06:28]

Absen namanya kalau dulu, daftar hadirlah yang bisa Bapak perlihatkan dan kalau juga bisa, bukti ... dulu ketika menerima ijazah ada malam ada apa enggak penerimaan resminya enggak? Datang sendiri-sendiri begitu?

1666.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:43]

Ya, Pak.

1667.KETUA: SALDI ISRA [03:06:44]

Kan ada wisudanya enggak?

1668.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:46]

Enggak, Pak.

1669.KETUA: SALDI ISRA [03:04:47]

Enggak, jadi datang sendiri-sendiri, ya? Yang tadi, Bapak, lampirkan bukti pengambilan ijazahnya.

1670.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:51]

Ya.

1671.KETUA: SALDI ISRA [03:06:51]

Nah, itu bukti itu sudah ada. Kalau ada bukti lain yang bisa menunjukkan Trisal sekolah di situ.

1672.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:06:58]

Ya.

1673.KETUA: SALDI ISRA [03:06:58]

Nah, foto dan segala macam gitu, Pak. Bisa Pak, ya? Ini enggak banyak permintannya, Pak. Sebab nasib orang ini ditentukan oleh ruangan ini, Pak.

1674.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:07:08]

Ya.

1675.KETUA: SALDI ISRA [03:07:09]

Ya Pak, ya? Pak apa ... Pak Johnson dan yang lain-lain nanti kita akan apa ... akan minta langsung menyurati Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan DKI.

Pihak Terkait ada yang mau disampaikan? Setuju enggak dengan itu? Setuju, ya?

1676.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. FARID WAJDI [03:07:30]

Setuju, Majelis.

1677.KETUA: SALDI ISRA [03:07:31]

Ya. Karena kita ini mau mencari mana yang benar, ya. Jadi kita undang itu supaya nanti klir. Nah nanti kita akan klarifikasi. Ini dulu sistem manual, ini sistem database. Nah kan kita akan cari kalau orang ini ada atau tidak dicek di database, kan ndak match dia dengan model manual. Nah, nanti kita akan lihat apa yang masuk usulan dari sekolah ke suku dinas itu. Nah, begitu caranya jadi Pemohon bisa menerima itu, ya?

1678.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [03:08:02]

Siap.

1679.KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Oke. Termohon bisa, ya?

1680.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:08:05]

Siap, Yang Mulia.

1681.KETUA: SALDI ISRA [03:08:06]

Oke. Bawaslu, ini belum nih. Kami mau tanya nih setelah ini, karena tadi belum ke Bawaslu dan Pihak Terkait nanti akan apa ... akan ... apa ... kami yang memanggil suku dinas dan Dinas Pendidikan DKI.

Bawaslu, coba Anda jelaskan apa sih yang terjadi, kenapa tiba-tiba berubah dari awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Anda yang bikin surat memerintahkan untuk ... apa itu ... untuk ditetapkan sebagai memenuhi syarat itu. Silakan.

1682.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:08:41]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, setelah ada keputusan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

1683.KETUA: SALDI ISRA [03:08:52]

Ya.

1684.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:08:52]

Ada Permohonan Sengketa yang masuk ke Bawaslu.

1685.KETUA: SALDI ISRA [03:08:55]

Oke. Kapan tanggal itu, Pak?

1686.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:08:58]

Tanggal (...)

1687.KETUA: SALDI ISRA [03:09:03]

Permohonan Sengketa dari siapa, Pak?

1688.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:05]

Dari pasangan Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin.

1689.KETUA: SALDI ISRA [03:09:08]

Oke. Karena dia yang dirugikan, ya?

1690.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:10]

Benar, Yang Mulia.

1691.KETUA: SALDI ISRA [03:09:12]

Sengketa. Tanggal berapa, Pak?

1692.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:14]

Tanggal 19, Yang Mulia.

1693.KETUA: SALDI ISRA [03:09:16]

19 September.

1694.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:18]

Benar, Yang Mulia.

1695.KETUA: SALDI ISRA [03:09:19]

Oke. Lalu kemudian Bapak panggil untuk mediasi KPU?

1696.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:24]

Ya, kemudian kita panggil sesuai dengan (...)

1697.KETUA: SALDI ISRA [03:09:28]

Sebelum Bapak memanggil itu, Bapak memiliki apa saja untuk memanggil KPU? Data tentang Trisal?

1698.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:33]

Ada hasil pengawasan kami, Yang Mulia. Sampai dengan (...)

1699.KETUA: SALDI ISRA [03:09:37]

Sampai terbentuknya ... apa (...)

1700.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:37]

Proses klarifikasi data yang sama yang dimiliki oleh KPU, Yang Mulia.

1701.KETUA: SALDI ISRA [03:09:41]

Itu yang Bapak datang ke sekolah-sekolah itu, ya?

1702.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:42]

Ya, benar, Yang Mulia.

1703.KETUA: SALDI ISRA [03:09:43]

Bapak ketemu dengan Pak ... apa ... enggak ... Bonar, enggak?

1704.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:47]

Pernah ketemu dengan Pak Bonar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara.

1705.KETUA: SALDI ISRA [03:09:52]

Oh, ketemu di situ?

1706.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:53]

Ya, benar.

1707.KETUA: SALDI ISRA [03:09:54]

Untuk kepentingan ini?

1708.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:09:55]

Sebenarnya kita klarifikasinya ke suku dinas, tapi entah kenapa ada Pak Bonar di sana. Kita tidak tahu, Yang Mulia.

1709.KETUA: SALDI ISRA [03:10:02]

Ya, Pak Bonar? Ada ketemu di situ?

1710.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:10:04]

Ya, Pak. Saya dipanggil sama orang dinas ... orang suku dinas.

1711.KETUA: SALDI ISRA [03:10:07]

Tapi untuk kepentingan yang sama, ya?

1712.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:10:09]

Ya, betul.

1713.KETUA: SALDI ISRA [03:10:11]

Oke.
Terus, Pak.

1714.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:13]

Kemudian dari hari pertama musyawarah tertutup atau mediasi, di tanggal 20 (...)

1715.KETUA: SALDI ISRA [03:10:23]

Oke.

1716.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:24]

Kedua Para Pihak belum menemukan kata sepakat.

1717.KETUA: SALDI ISRA [03:10:29]

Oke.

1718.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:29]

Kemudian di hari kedua (...)

1719.KETUA: SALDI ISRA [03:10:31]

Para Pihak ini siapa ini, Pak? KPU dan (...)

1720.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:33]

Para Pihak, KPU dan (...)

1721.KETUA: SALDI ISRA [03:10:34]

Pak Trisal, ya?

1722.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:35]

Pak Trisal.

1723.KETUA: SALDI ISRA [03:10:36]

Oke.

1724.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:36]

Kemudian di musyawarah tertutup tanggal 21 di hari kedua.

1725.KETUA: SALDI ISRA [03:10:42]

Ya.

1726.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:43]

Ada terjadi kesepakatan antara Para Pihak.

1727.KETUA: SALDI ISRA [03:10:47]

Antara KPU?

1728.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:48]

Antara KPU.

1729.KETUA: SALDI ISRA [03:10:49]

Apa yang menjadi titik poin orang ini bersepakat?

1730.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:10:52]

Titik poinnya adalah adanya surat dinas dari KPU RI. Jadi, karena kalau (...)

1731.KETUA: SALDI ISRA [03:11:01]

Oh, ini karena ada surat dari KPU RI tadi?

1732.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:04]

Ya, itu karena sebenarnya begini, Yang Mulia.

1733.KETUA: SALDI ISRA [03:11:06]

Ya.

1734.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:07]

Proses ... proses musyawarah tertutup itu, negosiasi itu antara Para Pihak.

1735.KETUA: SALDI ISRA [03:11:11]

Oke.

1736.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:12]

Sehingga mereka lah yang kemudian (...)

1737.KETUA: SALDI ISRA [03:11:14]

Bernego?

1738.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:14]

Bernegosiasi, untuk kemudian meghasilkan keputusan.

1739.KETUA: SALDI ISRA [03:11:17]

Jadi Bapak jadi mediator saja, ya?

1740.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:19]

Mediator. Dan tentu kami mengawal keputusan atau kesepakatan tidak boleh melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1741.KETUA: SALDI ISRA [03:11:25]

Itu ... itu ba ... itu apanya?
Waktu tertutup itu, yang hadir KPU?

1742.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:34]

KPU.

1743.KETUA: SALDI ISRA [03:11:35]

Pak ... apa ... Pak sri ... apa?

1744.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:38]

Prinsipal (...)

1745.KETUA: SALDI ISRA [03:11:39]

Pak Trisal.

1746.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:39]

Dan kuasa hukum, dan (...)

1747.KETUA: SALDI ISRA [03:11:41]

Disaksikan oleh Bawaslu?

1748.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:42]

Ya, dipimpin oleh Bawaslu.

1749.KETUA: SALDI ISRA [03:11:44]

Dipimpin oleh Bawaslu, oke. Terus, Pak, Bapak ceritakan, Pak, apa yang terjadi di situ?

1750.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:49]

Setelah itu terjadi lah 5 kesepakatan (...)

1751.KETUA: SALDI ISRA [03:11:52]

Yang tadi?

1752.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:52]

Antara Para Pihak yang tadi dibacakan itu.

1753.KETUA: SALDI ISRA [03:11:54]

Termasuk salah satunya meng ... mengubah dari TMS menjadi (...)

1754.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:11:58]

Tidak ada ... tidak ada ... tidak ada keputusan ... tidak ada kesepakatan yang berbicara soal memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tapi ada ... akan ada proses klarifikasi.

1755.KETUA: SALDI ISRA [03:12:09]

Oke.

1756.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:10]

Yang akan dilakukan oleh ... oleh KPU dan kami juga melihat bahwa memang keterpenuhan Pasal 113 yang kemudian harusnya diklarifikasi memang harusnya juga mengklarifikasi partai pengusul dan juga calon.

1757.KETUA: SALDI ISRA [03:12:23]

Oke.

1758.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:24]

Sehingga tentu dari kesepakatan kami melihat bahwa tidak ada yang salah dan tentu ini menjadi kesepakatan para pihak. Mungkin juga KPU masih membutuhkan proses klarifikasi yang lain untuk ... untuk menentukan sikap.

1759.KETUA: SALDI ISRA [03:12:37]

Setelah mereka melakukan klarifikasi, datang lagi enggak ke Bawaslu?

1760.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:43]

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

1761.KETUA: SALDI ISRA [03:12:43]

Tidak, ya?

1762.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:44]

Ya. Karena pascakesepakatan (...)

1763.KETUA: SALDI ISRA [03:12:46]

Jadi, setelah 5 poin tadi, mereka kemudian menindaklanjuti termasuk klarifikasi ke partai politik gabungan yang bersangkutan ke sekolah tadi kan?

1764.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:54]

Benar, Yang Mulia.

1765.KETUA: SALDI ISRA [03:12:55]

Setelah hasilnya itu ke KPU ... ke Bawaslu lagi enggak?

1766.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:12:56]

Tidak, Yang Mulia.

1767.KETUA: SALDI ISRA [03:12:57]

Itu hasilnya diputuskan oleh KPU sendiri?

1768.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:13:00]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1769.KETUA: SALDI ISRA [03:12:59]

Benar begitu, Ibu? Benar.

Jadi, setelah dari mereka diklarifikasi KPU, lalu kemudian ada surat klarifikasi dari sekolah, ya? Jadi salah satu dasar mengubah TMS itu karena surat dari sekolah tadi? KPU?

1770.TERMOHON: UPI HASTATI [03:13:19]

Ya, pernyataan dari Pak Bonar karena ada klarifikasi langsung via Zoom.

1771.KETUA: SALDI ISRA [03:13:26]

Ya.

1772.TERMOHON: UPI HASTATI [03:13:27]

Yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo ketika itu.

1773.KETUA: SALDI ISRA [03:13:30]

Oke, Ibu, hadir di situ? Tidak, ya?

1774.TERMOHON: UPI HASTATI [03:13:32]

Saya tidak hadir.

1775.KETUA: SALDI ISRA [03:13:33]

Ibu, setelah ada masalah baru hadir, ya. Oke.
Apa lagi, Bawaslu?

1776.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:13:39]

Ya. Kemudian dalam proses pelaksanaan putusan itu, Yang Mulia,
kami mengawasi sebagai tugas dan fungsi kami tanggal 22.

1777.KETUA: SALDI ISRA [03:13:52]

22 itu kan penetapan pasangan calon, Pak?

1778.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:13:59]

Ya, tanggal 21. Tanggal 22, Yang Mulia bahwa (...)

1779.KETUA: SALDI ISRA [03:14:03]

Tanggal 21 atau 22, Pak?

1780.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:15]

Tanggal 22, Yang Mulia.

1781.KETUA: SALDI ISRA [03:14:16]

22.

1782.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA KETUA: SALDI ISRA [03:14:17]

Ya.

1783.KETUA: SALDI ISRA [03:14:18]

Apa itu, Pak?

1784.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:19]

Dilakukan pelaksanaan putusan berupa klarifikasi kepada partai politik ... eh, partai pengusul calon dan dari sekolah.

1785.KETUA: SALDI ISRA [03:14:33]

Itu melalui Zoom semua?

1786.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:34]

Ada yang Zoom, ada yang langsung, Yang Mulia.

1787.KETUA: SALDI ISRA [03:14:36]

Yang langsung siapa, Pak?

1788.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:37]

Yang langsung itu calon.

1789.KETUA: SALDI ISRA [03:14:40]

Calon.

1790.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:42]

Dan Partai Gerindra kalau saya tidak salah, Yang Mulia.

1791.KETUA: SALDI ISRA [03:14:45]

Gerindra.

Berapa sih partai pendukungnya ini, Pak? Pemenangnya ini?

1792.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:49]

2.

1793.KETUA: SALDI ISRA [03:14:50]

Apa saja, Pak?

1794.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14:51]

Gerindra dan Demokrat.

1795.KETUA: SALDI ISRA [03:14:52]

Oke.

Kalau yang ... yang apa ... yang apa namanya ... yang Pemohon ini partai pendukungnya apa, Pak?

1796.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:03]

Yang Pemohon, NasDem.

1797.KETUA: SALDI ISRA [03:15:05]

NasDem. Apa lagi?

1798.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:07]

1 saja, Yang Mulia.

1799.KETUA: SALDI ISRA [03:15:08]

Oh, 1 saja.

1800.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:10]

Yang pengusulnya, ya.

1801.KETUA: SALDI ISRA [03:15:11]

Oke. Apa lagi, Pak, yang mau Bapak jelaskan?

1802.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:13]

Ya. Jadi, ketika proses klarifikasi itu dilakukan yang bersangkutan saudara ... Saudara dari pihak sekolah menyatakan benar yang bersangkutan pernah bersekolah. Hanya saja kami mau mempertanyakan beberapa hal, Yang Mulia. Salah satunya adalah bukti-bukti dukung untuk kemudian menguatkan pernyataan dari pihak sekolah dan waktu itu pihak sekolah menyatakan tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

1803.KETUA: SALDI ISRA [03:15:43]

Oke, itu ditetapkan.

Pemohon ini, kapan dia melakukan keberatan terhadap penetapan itu. Ada enggak?

1804.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

1805.KETUA: SALDI ISRA [03:15:51]

Tidak ada, ya?

1806.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:52]

Ya.

1807.KETUA: SALDI ISRA [03:15:53]

Jadi setelah ditetapkan, mereka tidak ada mengajukan keberatan.

1808.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:15:57]

Tidak ada.

1809.KETUA: SALDI ISRA [03:15:58]

Keberatan itu baru muncul nanti setelah kapan, Pak?

1810.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:00]

Setelah penetapan calon, ada laporan yang masuk, Yang Mulia.

1811.KETUA: SALDI ISRA [03:16:03]

Ya, penetapan calon kan tanggal 22, kan ndak ada tuh, Pak.

1812.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:06]

i. Ya.

1813.KETUA: SALDI ISRA [03:16:07]

Maksud saya, setelah penetapan calon tanggal 22 itu, ada enggak keberatan dari mereka?

1814.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:10]

Dari Pemohon tidak ada, Yang Mulia.

1815.KETUA: SALDI ISRA [03:16:12]

Dari masyarakat? Ada, ya?

1816.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:13]

Ada, Yang Mulia.

1817.KETUA: SALDI ISRA [03:16:14]

Tanggal berapa? 24 tadi?

1818.

BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:16]

Tanggal 24.

1819.KETUA: SALDI ISRA [03:16:17]

i. 24.

1820.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:17]

Ada laporan yang masuk.

1821.KETUA: SALDI ISRA [03:16:18]

Masuk ke Bawalsu?

1822.

BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:19]

Masuk ke Bawaslu.

1823.KETUA: SALDI ISRA [03:16:20]

Bawaslu melakukan apa?

1824.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:22]

Kita melakukan proses penanganan pelanggaran.

1825.KETUA: SALDI ISRA [03:16:25]

Terus?

1826.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:25]

Sesuai dengan peraturan.

1827.KETUA: SALDI ISRA [03:16:28]

Hasilnya?

1828.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:29]

Hasilnya adalah (...)

1829.KETUA: SALDI ISRA [03:16:32]

Bapak nyatakan tidak memenuhi syarat?

1830.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:34]

(...) Tidak, Yang Mulia. Jadi, dia masuk di pidana, Yang Mulia. Pidana

1831.KETUA: SALDI ISRA [03:16:37]

i. Tidak ada.

1832.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:37]

4 ... 4 terlapor.

1833.KETUA: SALDI ISRA [03:16:39]

Oke.

1834.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:40]

i. Kemudian (...)

1835.KETUA: SALDI ISRA [03:16:40]

Itu yang tadi, ya?

1836.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:41]

Ya.

1837.KETUA: SALDI ISRA [03:16:42]

3 Anggota KPU. 1?

1838.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:43]

1 calon.

1839.KETUA: SALDI ISRA [03:16:44]

i. Calon?

1840.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:44]

i. Ya.

1841.KETUA: SALDI ISRA [03:16:45]

Trisal, ya?

1842.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:46]

Benar, Yang Mulia.

1843.KETUA: SALDI ISRA [03:16:47]

Yang kemudian jadi tersangka, tapi tidak bisa diapa-apain karena waktunya lewat.

1844.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:50]

Benar, Yang Mulia.

1845.KETUA: SALDI ISRA [03:16:51]

Setelah itu Bawaslu melakukan apa?

1846.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:16:55]

Kita melau ... setelah itu karena harapan kita, Yang Mulia, bahwa (...)

1847.KETUA: SALDI ISRA [03:16:59]

Bukan harapan kita, Pak. Harapan kami.

1848.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:00]

Ya, harapan kami (...)

1849.KETUA: SALDI ISRA [03:17:01]

i. Ya.

1850.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:02]

Bahwa yang kasus ini bisa sampai ke pengadilan untuk kemudian kami mengambil sikap.

1851.KETUA: SALDI ISRA [03:17:09]

i. Oke.

1852.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:09]

Untuk kemudian masuk ke pelanggaran administrasi. Tetapi ketika proses, rupanya harus berhenti karena waktu 14 hari tidak ... tidak memeriksa tersangka sehingga kasusnya daluwarsa.

Kemudian ada beberapa informasi-informasi yang kemudian kita terima dalam proses penyidikan (...)

1853.KETUA: SALDI ISRA [03:17:29]

i. Ya.

1854.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:29]

Di Kepolisian.

1855.KETUA: SALDI ISRA [03:17:30]

Apa itu, misalnya informasi itu?

1856.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:31]

Pertama, ada informasi awal ba ... bahwa ada perubahan keterangan dari Saudara kepala sekolah.

1857.KETUA: SALDI ISRA [03:17:37]

i. Ya.

1858.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:17:38]

Yang waktu itu, awalnya mengatakan mengetahui dalam ... dalam BAP-nya itu mengatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui yang bersangkutan pernah bersekolah. Kemudian ada juga petunjuk teknis pembuatan ijazah yang kemudian di ... didapatkan. Kemudian beberapa keterangan-keterangan lain, Yang Mulia.

1859.KETUA: SALDI ISRA [03:17:59]

Ada ... ada ketidakkonsisten gitu, ya?

1860.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:18:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

1861.KETUA: SALDI ISRA [03:18:02]

Oke.

Pak Bonar, dulu ketika di DKPP, Bapak diundang juga?

1862.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:18:09]

Tidak, Pak.

1863.KETUA: SALDI ISRA [03:18:09]

Tidak, ya?

1864.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:18:10]

Tidak.

1865.KETUA: SALDI ISRA [03:18:11]

Sekolah ada yang diundang dari DKPP?

1866.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BONAR JHONSON S [03:18:13]

Tidak.

1867.KETUA: SALDI ISRA [03:18:13]

Siapa yang hadir dari DKPP? Pak ... apa ... Bapak, namanya? Di sekolah, ada diundang DKPP, ndak? Ketika mau memutuskan ini? Yang diundang hanya Suku Dinas? Tidak sampai ke sekolah, ya? Oke.

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

1868.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:18:32]

Bawaslu, ya. Sedikit nih. Kan tadi disampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu. Kemudian, dibeo ... ke pa ... dibawa ke Sentra Gakkumdu, kan? Sehingga jadilah itu ... apa ... proses penyidikan yang sampai menetapkan tersangka.

Pertanyaan saya, kan begini, ketika penyidik itu menetapkan seseorang atau beberapa orang jadi tersangka. Itu kan paling tidak ada 2 alat bukti. Nah, itu sepengetahuan, kan ini kalau Bapak tahu karena ini kan pertanyaannya harusnya kepada penyidik di Gakkumdu, ya. Itu apa? Yang dianggap sebagai 2 alat bukti itu untuk menetapkan tersangka?

1869.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:19:23]

Jadi, sepengetahuan kami itu dari keterangan saksi, saksinya itu dari (...)

1870.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:33]

Pak Bonar ini?

1871.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:19:33]

Pak Bonar juga.

1872.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:34]

i. Pak Bonar, oke.

1873.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:19:35]

Dari dinas.

1874.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:36]

Dari dinas?

1875.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:19:37]

Dari dinas.

1876.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:38]

Oke, ya, ya. Nah, itu apakah dari dinas mengatakan ... ini ... ini tersangkanya, apa sih? Ijazah palsu atau apa?

1877.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:19:50]

Ijazah yang tidak pernah dikeluarkan dari instansi yang berwenang, Yang Mulia.

1878.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:19:53]

Nah, ya. Ya itu kan dalam bahasa teknis hukumnya kan ijazah palsu, ya, itu. Yang tanda tangan di Ijazah itu diperiksa enggak setelah pengetahuan itu? Karena yang paling ... yang paling bisa menjawab itu kan yang namanya ada di yang menjadi penanda tangan di ijazah itu. Diperiksa enggak pengetahuan Bawaslu itu?

1879.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:20:14]

Tidak diperiksa, Yang Mulia, sebenarnya ada upaya untuk kesana tapi tidak, sudah tidak ada lagi informasi kaitan dengan (...)

1880.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:19]

Kalau gitu, dinas siapa yang memberikan keterangan?

1881.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:20:23]

Dari Ibu, saya lupa, Ibu Heni Handayani [!sic].

1882.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:30]

Oke, tau jabatannya apa? Engga (...)

1883.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:20:35]

Kepala (...)

1884.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:36]

Tapi yang jelas yang menandatangani di ijazah itu bukan yang diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik Gakkumdu, ya?

1885.BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:20:45]

Bukan, Yang Mulia.

1886.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:47]

Oke, yaudah itu. Karena ya buat saya menjadi ada tanda tanya juga gitu loh, gitu. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini palsu, saya yang tanda tangan ijazah kok bukan saya yang dimintai keterangan gitu loh. Itu saja jadi tanda tanya.

Oke, terima kasih.

1887.KETUA: SALDI ISRA [03:21:09]

Cukup.

Pak Ridwan? Cukup ya.

Sementara sidang kita skors, kita akan melanjutkan sidang tanggal 17, Pukul 13.30.

Tadi, Pak Bonar, sudah catat ya yang mau dilengkapi ya. Jadi, tolong kami dibantu, Pak, agar kami bisa memutus secara adil. Karena ini kan kalau Hakim memutus tidak adil. Nah, tantangannya berat, Pak, soal masuk neraka itu. Tapi kalau kami memutus salah, tapi itu dengan apa namanya ... ikhtiar yang sungguh-sungguh masih dapat pahala satu, Pak. Tapi kalau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, nah, itu yang repot. Makanya kita mau ada banyak bahan atau bukti yang diserahkan ke kami untuk memutus itu. Terima kasih.

1888.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:21:57]

Izin, Yang Mulia?

1889.KETUA: SALDI ISRA [03:21:57]

Ya.

1890.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:21:59]

Untuk ... menjaga hubungan profesional kami dengan Termohon, Yang Mulia.

1891.KETUA: SALDI ISRA [03:22:03]

Ya.

1892.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:22:03]

Tadi kami lupa menyebutkan nama Kepala Divisi Hukum dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Yang Mulia. Namanya Ibu Upi Hastati, Yang Mulia, terima kasih.

1893.KETUA: SALDI ISRA [03:22:11]

Ya, panggilnya, Ibu Upi.

1894.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:22:12]

Siap, Yang Mulia.

1895.KETUA: SALDI ISRA [03:22:13]

Ibu Upi, ya, dan walaupun ndak disebutkan nama Ibu, profesional fee tetap harus dibayar. Kalau ada bukti tambahan yang harus kita sahkan, mana?

Ya, nanti masih boleh.

Pemohon menambahkan Bukti P-59 sampai P-62, betul?

1896.KKUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD NURSAL [03:22:35]

Betul, Yang Mulia.

1897.KETUA: SALDI ISRA [03:22:36]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-32?

1898.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN IDHAM [03:22:40]

Siap, Yang Mulia.

1899.KETUA: SALDI ISRA [03:22:40]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait enggak ada ya? Cukup itu buktinya? Nanti kalau ada, masih ada kesempatan loh tanggal 17.

Termasuk Bawaslu, ya, kalau di sini juga mau.

Dengan demikian, kami berterima kasih ini. Kita sudah, walaupun suasananya kadang-kadang naik turun begitu, enggak apa-apalah. Ini pendewasaan kita berdemokrasi. Nah, itu harus diterima oleh Semua Pihak. Dan sidang untuk Perkara 168 PHPU Wali Kota 2025 Kota Palopo, kita skors sampai 17 Februari, Senin Pukul 13.30.

Sidang dinyatakan diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.56 WIB

Jakarta, 7 Februari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

